

# Buku Perpajakan

*by* Satria Indra Kusuma

---

**Submission date:** 31-Mar-2024 12:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2335675326

**File name:** BUKU\_PERPAJAKAN\_AKUNTANSI.docx (4.51M)

**Word count:** 48968

**Character count:** 326066

## **Bab 1**

### **Keuangan Negara Dan Pencatatannya**

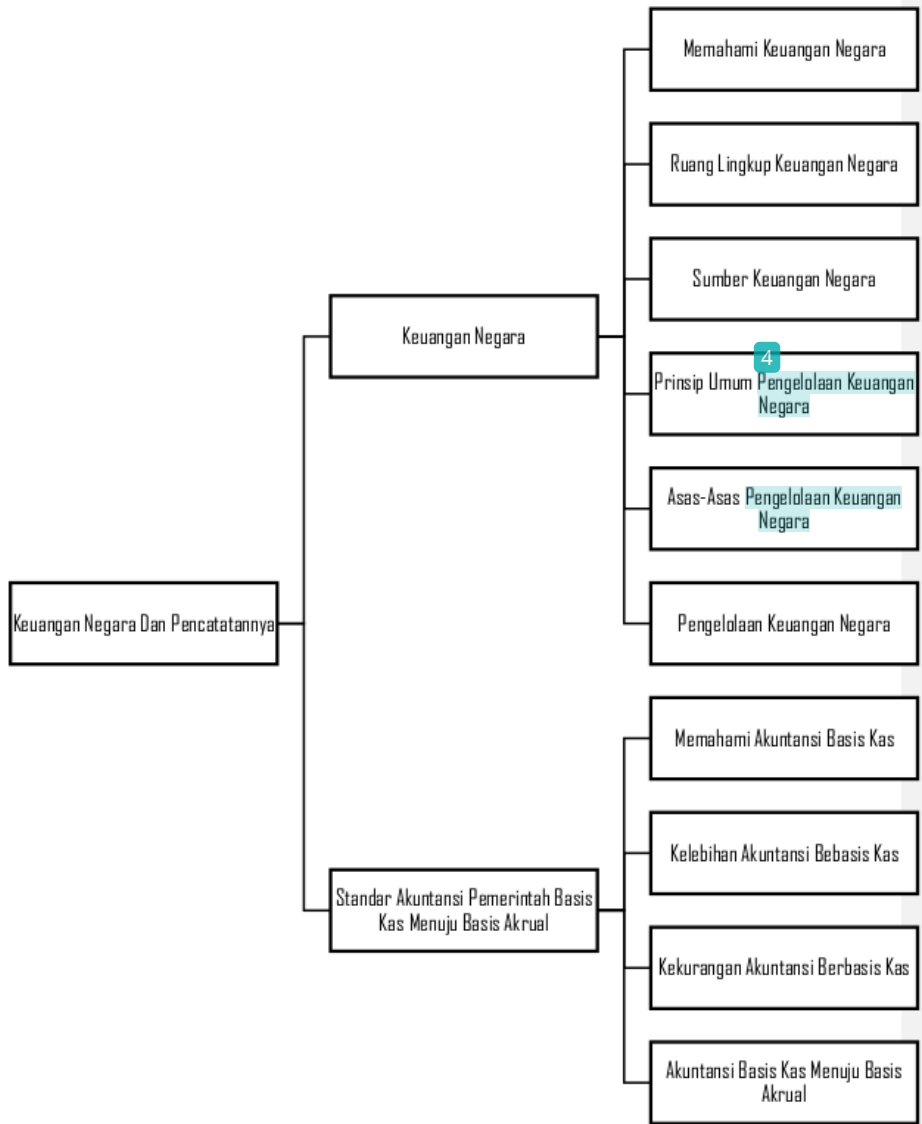
#### **Tujuan Pembelajaran Bab**

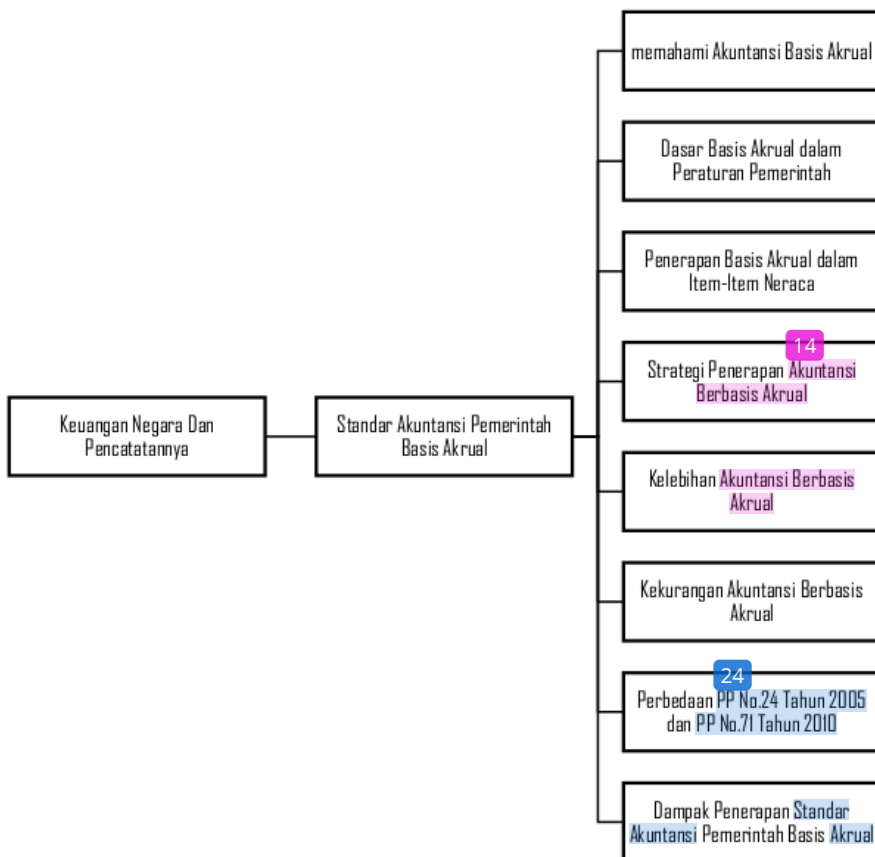
Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu :

1. Memahami keuangan negara.
2. Memahami ruang lingkup keuangan negara.
3. Memahami sumber keuangan negara.
4. Memahami prinsip umum pengelolaan keuangan negara.
5. Memahami asas-asas pengelolaan keuangan negara.
6. Memahami pengelolaan keuangan negara.
7. Memahami akuntansi basis kas.
8. Memahami kelebihan akuntansi basis kas.
9. Memahami kekurangan akuntansi basis kas.
10. Memahami akuntansi basis kas menuju basis akrual.
11. Memahami akuntansi basis akrual.
12. Memahami dasar basis akrual dalam peraturan pemerintah.
13. Memahami penerapan basis akrual dalam item-item neraca.
14. Memahami strategi penerapan akuntansi berbasis akrual.
15. Memahami kelebihan akuntansi berbasis akrual.
16. Memahami Kekurangan akuntansi berbasis akrual.
17. Memahami perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010
18. Memahami dampak penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual.

#### **Profil Pelajar Pancasila**

Peta Konsep





Apa yang kalian ketahui tentang keuangan negara? Bagaimana pencatatan dari keuangan negara tersebut? Keuangan negara merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, dikaji, dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Istilah keuangan negara sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia karena keuangan negara sangat berkaitan erat dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara umum, keuangan membicarakan mengenai masalah penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Pada bab ini, kita akan mempelajari secara gamblang mengenai keuangan negara dan pencatatannya.

### A. Keuangan Negara

Berikut ini penjelasan secara lengkap mengenai keuangan negara.

#### 1. Memahami Keuangan Negara



Gambar 1.1 Sistem pengelolaan keuangan negara

Sumber : Syarif, 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu terdapat pendapat dari para ahli mengenai keuangan negara.

Berikut ini pendapat dari beberapa mengenai definisi dari keuangan negara.

##### a. M. Ichwan

M. Ichwan berpendapat bahwa keuangan negara merupakan perencanaan kegiatan yang dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka yang diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan diterapkan di masa yang akan datang, biasanya satu tahun dari sekarang.

Commented [NM1]: <https://j/2003/17tahun2003uu.htm#:~:t undang%20ini%20yang,pelaksan ajiiban%20tersebut.>

Commented [NM2]: <http://re 4/BAB%20II.pdf>

Commented [NM3R2]: [https://nisi-keuangan-negara/#Keuangan\\_Negara\\_Me](https://nisi-keuangan-negara/#Keuangan_Negara_Me)

Commented [NM4]: <https://l/pengelolaan-keuangan-negara-l>

b. Geodhart

Geodhart berpendapat bahwa keuangan negara adalah semua undang-undang yang telah ditetapkan secara periodik yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dan menentukan sarana pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

c. Ulbrich (2003)

Ulbrich berpendapat bahwa studi mengenai keuangan negara telah berkembang menjadi bidang studi yang lebih luas, yaitu ekonomi sektor publik atau *public sector economics*. Meskipun demikian istilah keuangan dalam keuangan negara mempersempit pembahasannya hanya pada pendapatan negara, pengeluaran, dan penganggaran negara saja.

d. Arifin P. Soeria Atmadja

Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa keuangan negara dari segi pertanggung jawaban oleh pemerintah, mendefinisikan bahwa keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah merupakan keuangan negara yang hanya bersumber dari APBN. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan keuangan yang bersumber dari APBN.

Arifin P. Soeria Atmadja memaparkan dualisme konsep dari keuangan negara, yaitu keuangan negara dalam arti luas dan keuangan negara dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, keuangan negara merupakan keuangan yang berasal dari APBN, APBD, keuangan Unit-Unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakekatnya merupakan seluruh kekayaan negara. Sedangkan dalam arti yang sempit keuangan negara merupakan keuangan yang hanya bersumber dari APBN.

e. John F. Due,

Budget keuangan negara merupakan perencanaan keuangan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran belanja pemerintah atau *government budget* merupakan suatu pernyataan yang berkaitan dengan pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode di masa yang akan datang dan di masa lalu. John F. Due menyamakan konsep keuangan negara dengan budget negara.

f. Suparmoko (2012)

Suparmoko berpendapat bahwa keuangan negara adalah studi mengenai pengaruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi negara, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta peningkatan efisiensi dan penciptaan kesempatan kerja.

g. Hasan Akmal

Keuangan negara merupakan definisi keuangan dalam arti luas yang berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.

h. Van der Kemp

34

Van der Kemp berpendapat bahwa keuangan negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.

i. Otto Ekstein

Otto Ekstein berpendapat bahwa keuangan negara merupakan bidang yang mempelajari mengenai dampak dari anggaran belanja terhadap ekonomi, khususnya dampak dari tercapainya tujuan ekonomi yang utama, yaitu pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.

j. Pasal 1 34 1 UUKN

Definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUKN mempunyai substansi yang dapat ditinjau dalam dua artian yaitu artian yang luas dan artian yang sempit. Dalam arti yang luas, keuangan negara berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak termasuk dalam APBN. Sedangkan dalam arti yang sempit, keuangan negara hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam APBN pada tahun yang bersangkutan.

Berikut ini definisi keuangan negara yang telah tercantum dalam penjabaran umum UUKN.

1) Dari sisi objek

Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Dari sisi subjek

Kuangan negara merupakan semua objek sebagaimana yang telah disebut yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara.

3) Dari sisi proses

Kuangan negara mencakup semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan objek yang telah disebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban.

4) Dari sisi tujuan

Kuangan negara mencakup segala kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek yang telah disebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada dasarnya, keuangan negara dalam artian yang sempit merupakan bagian dari keuangan negara dalam artian yang luas. Dalam kaitannya dengan negara, keuangan negara dalam artian yang sempit adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam artian yang sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam artian yang luas, sehingga keudanya tidak sama secara yuridis. Oleh karena itu, kandungan keuangan negara dalam artian yang sempit hanya berfokus pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam bentuk undang-undang.

## 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pada dasarnya, keuangan negara merupakan sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Dengan demikian, ruang lingkup tersebut menentukan isi yang terkandung dalam keuangan negara. Sebenarnya

Commented [NM5]: <http://r4/BAB%20II.pdf>



keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang mengelola keuangan negara.

Berikut ini penjelasan mengenai <sup>16</sup> ruang lingkup keuangan negara yang dijelaskan menurut pasal 2 UUKN dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

a. Ruang lingkup **keuangan negara** menurut **pasal 2 UUKN**

Ketika kita berbicara tentang undang-undang keuangan negara, maka kita akan membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari sudut pandang yuridis. Berikut ini penjelasan ruang lingkup keuangan negara menurut **pasal 16 UUKN**.

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan **uang**, dan melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan Negara.
- 4) Pengeluaran Negara.
- 5) Penerimaan Daerah.
- 6) <sup>34</sup> pengeluaran Daerah.
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka <sup>34</sup> penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah <sup>32</sup>

Sektor pengelolaan **keuangan negara yang sangat luas** dapat dikelompokkan menjadi beberapa sub bidang, yaitu sub bidang **pengelolaan fiskal**, sub bidang **pengelolaan moneter**, dan sub bidang **pengelolaan <sup>27</sup>kekayaan negara yang terpisah**.

b. Ruang lingkup **keuangan negara** menurut **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003**.

Berikut ini penjelasan mengenai ruang lingkup **keuangan negara** menurut **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003**.

- 1) Pengelolaan moneter

**Commented [NM6]:** ini tidak pendapat menurut Undang-und

Pengelolaan moneter dilakukan melalui beberapa rangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan banyaknya barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2) Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal mencakup pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, administrasi perpajakan, penganggaran, perbendaharaan, administrasi kepabeanan, dan pengawasan keuangan negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan (penerimaan) dan belanja (pengeluaran) pemerintah.

3) Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Selain itu, terdapat kekayaan negara yang juga dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan tersebut biasanya disebut dengan Badan Usaha Milik negara dan Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).

**3. Sumber Keuangan Negara**

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa sumber keuangan negara.

a. Keuntungan BUMN/BUMD

Keuntungan perusahaan BUMN mencakup perusahaan pemilik modal asing (PMA) maupun pemilik modal dalam negeri (PMDN). Sebagai pemilik BUMN, negara berhak memperoleh bagian dari laba yang didapat oleh BUMN. Sama halnya dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD juga berhak untuk mendapatkan bagian dari laba BUMD.

b. Pajak

**Commented [NM7]:** <https://16/09/pengertian-ruang-lingkup-negara.html>



Gambar 1. Ilustrasi pajak

Sumber : Wiranuari, 2022

6

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada wajib pajak tertentu, menurut undang-undang pemungutan pajak dapat dipaksakan, tanpa memberikan imbalan secara langsung bagi pembayarinya. Pada periode tahun 2006-2010, PPH adalah komponen terbesar dalam pendapatan pajak dalam negeri yaitu sebesar 52,1%. Sedangkan PPN dan PPnBm menjadi penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar 32,6%. Sedangkan pajak perdagangan internasional hanya berkontribusi sebesar 4,0% terhadap total pendapatan perpajakan dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1% dan bea keluar sebesar 0,9%.

c. Pencetakan uang

Pemerintah biasanya melakukan pencetakan uang untuk menutupi defisit anggaran, jika pemerintah tidak memiliki pilihan lain untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Jumlah uang yang dicetak harus ditentukan dengan cermat agar pencetakan uang tersebut tidak menimbulkan terjadinya inflasi.

d. Pinjaman

Pinjaman pemerintah adalah sumber pendapatan negara yang dilakukan pada saat terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah akan menjadi beban bagi pemerintah dikemudian hari karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali beserta bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman dapat bersumber dari pemerintah, perbankan, lembaga non perbankan ataupun perorangan.

e. Sumbangan, Hadiah dan Hibah

**Commented [NM8]:** <https://1064/pajak-adalah-kontribusi-wa-fungsi-dan-jenisnya>

Negara dapat menerima hadiah, sumbangan maupun hibah dari individu, lembaga, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Negara tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, maupun hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukanlah pendapatan negara yang dapat dipastikan perolehannya karena sumbangan, hadiah, dan hibah bergantung pada kerelaan dari pihak yang memberikan sumbangan, hadiah, atau hibah tersebut.

f. Denda dan Sita



Gambar 1. Ilustrasi Penyitaan

Sumber : Mahono, 2021

Negara berhak untuk memberikan denda atau menyita aset milik masyarakat jika masyarakat (individu/kelompok/organisasi) kepadatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Contohnya denda pelanggaran lalu lintas, denda peraturan perpajakan, penyitaan barang illegal, penyitaan jaminan terhadap hutang yang tidak tertagih, dan lain sebagainya.

g. Cukai

Cukai merupakan pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang perlu dibatasi, diawasi produksi dan peredarannya. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peran cukai tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara saja, tetapi juga

**Commented [NM9]:** <https://109261-410-bidang-tanah-barat-bts-dipasang-tanda-penyitaan.h>

memperhatikan aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Dengan demikian, dasar perhitungan besarnya penerimaan cukai bergantung pada jumlah barang yang dikenakan cukai, besaran tarif cukai, dan harga dasar barang yang dikenakan cukai.

h. Retribusi



Gambar 1. Contoh retribusi

18 Sumber : pajakonline, 2021

Commented [NM10]: <https://agam-retribusi-jasa-umum-cek-l>

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah akan memberikan imbalan secara langsung bagi pembayarannya. Misalnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan parkir oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dan lain sebagainya.

i. Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Negara dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu lembaga tertentu untuk menyelenggarannya. Jumlah yang diterima oleh negara merupakan selisih antara penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasional dan besarnya hadiah yang dibagikan. Banyak negara yang melakukan penyelenggaraan undian berhadiah, antara lain, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, dan Indonesia.

4. Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara biasanya merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya finansial yang tersedia, termasuk penerimaan, belanja, dan utang negara. Beberapa prinsip umum yang sering diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu:

a. Prinsip efisiensi

Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya finansial yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Prinsip transparansi

Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang cara-cara yang digunakan untuk mengelola keuangan negara, termasuk penerimaan, belanja, dan utang negara.

c. Prinsip akuntabilitas

Pemerintah harus bertanggung jawab atas cara-cara yang digunakan untuk mengelola keuangan negara, termasuk memberikan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang keuangan negara kepada masyarakat.

d. Prinsip keadilan

Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya finansial yang tersedia diakses secara adil oleh semua orang di negara tersebut, dan tidak hanya diakses oleh segelintir orang saja.

e. Prinsip kepatuhan terhadap hukum

Pemerintah harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk peraturan tentang pajak dan anggaran.

**5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara**

Aturan pokok mengenai keuangan negara telah dijelaskan dalam asas-asas umum yang mencakup asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara maupun asas-asas baru yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini penjelasan mengenai asas-asas pengelolaan keuangan negara sebelum dan setelah berlakunya UUKN.

a. Asas-asas pengelolaan keuangan negara sebelum berlakunya UUKN

Sebelum berlakunya UUKN, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan telah diakui keberlakuannya dalam pengelolaan keuangan negara untuk masa depan. Berikut ini beberapa asas pengelolaan keuangan negara sebelum UUKN berlaku.

1) Asas kesatuan

Asas kesatuan mensyaratkan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dapat disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2) Asas universalitas

Commented [NM11]: <http://4/BAB%20II.pdf>

Asas universalitas mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3) Asas tahunan

Asas tahunan membatasi masa belakunya anggaran dalam satu tahun tertentu.

4) Asas spesialisitas

Asas spesialisitas mensyaratkan agar kredit anggaran yang disediakan harus terperinci dengan jelas peruntukannya.

b. Asas-asas pengelolaan keuangan negara setelah berlakunya UUKN

Dengan diberlakukannya UUKN, maka terdapat beberapa asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini beberapa asas pengelolaan keuangan yang terdapat pada UUKN yang bersifat *best practice*.

1) Asas akuntabilitas

16

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2) Asas profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara.

3) Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan kompetensi berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara

Asas keterbukaan merupakan asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) Asas <sup>4</sup>meriksaan

Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaa yang bebas dan mandiri merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tanpa adanya pengaruh dari siapapun.

6. **32** **gelolaan Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara, Pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, diantaranya yaitu, perencanaan keuangan negara, pelaksanaan keuangan negara, pengawasan keuangan negara, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung j<sup>32</sup> menteri keuangan yang berperan sebagai bendahara umum negara yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara yang berupa uang rupiah dan valuta asing. Sedangkan uang negara terdiri atas uang dalam kas negara dan uang yang ada pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara.

Berikut ini penjelasan mengenai wewenang bendahara umum negara dan perincian pengelolaan keuangan negara.

a. Wewenang bendahara umum negara

Berikut ini beberapa wewenang dari bendahara umum negara dalam pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh kuasa bendahara umum negara pusat.

- 1) Penetapan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.
- 2) Penunjukkan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
- 3) Mengusahakan dan mengatur dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan anggaran negara.
- 4) Menyimpan uang negara.
- 5) Menempatkan uang negara.
- 6) Pengelolaan investasi melalui pembelian surat utang negara.
- 7) Melakukan pembayaran atas permintaan pejabat yang menggunakan anggaran terhadap beban rekening kas umum negara.

Commented [NM12]: <http://4/BAB%20II.pdf>



8) menyajikan informasi mengenai keuangan negara.

b. Perincian pengelolaan keuangan negara

Pengelolaan keuangan negara dapat dirinci menjadi beberapa tahapan yaitu pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh kementerian negara, lembaga non kementerian, dan lembaga negara. Kemudian pengelolaan uang untuk kebutuhan kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara. Perincian tersebut bertujuan untuk membedakan fungsi pengelolaan keuangan tersebut agar dapat tetap terarah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Berikut ini penjelasan mengenai perincian pengelolaan keuangan negara.

1) Pengelolaan Kas Umum Negara

Uang negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **30** **anggaran negara, sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Uang negara disimpan dalam rekening kas umum negara sehingga bendahara umum negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola rekening pemerintah sehingga dapat membuka rekening kas umum negara pada bank sentral. Sebenarnya tujuan pembukuan rekening kas umum negara pada bank sentral yaitu agar uang negara tetap berada dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh bank sentral.

2) Pelaksanaan Penerimaan Negara

Jika pihak bendahara umum negara memberikan persetujuan, maka Menteri/pimpinan lembaga non kementerian dan pimpinan lembaga negara yang menjadi pengguna anggaran dapat membuka rekening untuk kebutuhan pelaksanaan penerimaan di lingkungannya. Penerimaan tersebut digolongkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian, diperlukan seorang bendahara untuk menyelenggarakan penerimaan tersebut. Sebenarnya Menteri/pimpinan lembaga non kementerian, dan pimpinan lembaga negara diwajibkan untuk mengangkat bendahara dalam menjalankan tugas tersebut dan bertanggung jawab kepadanya.

3) Pengelolaan Uang Persediaan

Selain rekening yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan penerimaan, Menteri/pimpinan lembaga non kementerian, dan pimpinan lembaga juga dapat membuka rekening untuk kebutuhan pelaksanaan pengeluaran di lingkungannya. Akan tetapi mereka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan selaku bendahara umum negara terlebih dahulu. Setelah pembukaan rekening telah dilakukan, maka mereka wajib mengangkat bendahara yang akan bertugas mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Menteri/pimpinan lembaga non kementerian, dan pimpinan lembaga negara. Pertanggung jawaban bendahara diberikan kepada atasannya ataupun pada badan pemeriksaan keuangan (BPK).

## 5 B. Standar Akuntansi Pemerintah Basis Kas Menuju Basis Akkrual

Berikut penjelasan mengenai standar akuntansi pemerintah basis kas menuju basis akrual.

### 1. Memahami Basis Kas

Basis kas adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi. Pencatatan akuntansi dengan menggunakan basis kas merupakan teknik pencatatan pada saat terjadi transaksi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi basis kas merupakan basis akuntansi yang mencatat pengaruh transaksi dan peristiwa lain ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar dan digunakan untuk pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.

Basis kas akan mencatat kegiatan keuangan ketika kas atau uang telah diterima. Contohnya perusahaan menjual produknya, namun uang pembayaran masih belum diterima, maka pencatatan pendapatan penjualan dari produk tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, apabila kas telah diterima maka transaksi tersebut baru dapat dicatat seperti halnya pada basis akrual. Hal tersebut berlaku untuk semua jenis transaksi yang dilakukan, kedua basis tersebut akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Apabila menggunakan basis akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang, sehingga akan memberikan pengaruh pada besarnya piutang. Sedangkan apabila yang digunakan adalah basis kas, maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi.

Commented [NM13]: <https://www.revisi.com/2019/07/19/7199/Kas-Basis-Vs-Akrual-Basis-Akrual.html>

Terdapat dua pilar yang mendasari konsep basis kas, yaitu:

a. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada basis kas adalah proses mencatat pendapatan pada saat uang atau kas diterima dari transaksi yang terkait. Dalam sistem akuntansi berbasis kas, pendapatan hanya diakui setelah terjadi perpindahan uang atau kas.

Contoh pengakuan pendapatan pada basis kas yaitu seorang penjual menjual produk senilai Rp 1.000.000 kepada pelanggan. Pendapatan tidak akan diakui sampai pelanggan membayar uang atau kas kepada penjual. Sebuah perusahaan memperoleh jasa konsultasi senilai Rp 10.000.000. Pendapatan tidak akan diakui sampai perusahaan menerima uang atau kas dari klien.

Pengakuan pendapatan pada basis kas memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat transaksi terjadi dan membantu perusahaan dalam mengendalikan keuangan dan menghindari kecurangan atau penyimpangan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak mengakui piutang atau hutang yang belum diterima atau dibayarkan dan tidak mengakui biaya yang belum dikeluarkan, yang dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

b. Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya pada basis kas adalah proses mencatat biaya pada saat uang atau kas dikeluarkan untuk membayar biaya tersebut. Dalam sistem akuntansi berbasis kas, biaya hanya diakui setelah terjadi perpindahan uang atau kas.

Contoh pengakuan biaya pada basis kas yaitu sebuah perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp 5.000.000. Biaya gaji akan diakui pada saat perusahaan mengeluarkan uang atau kas untuk membayar gaji tersebut. Seorang penjual membeli produk senilai Rp 1.000.000 untuk dijual kembali. Biaya pembelian akan diakui pada saat penjual mengeluarkan uang atau kas untuk membeli produk tersebut.

Pengakuan biaya pada basis kas memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat transaksi terjadi dan membantu perusahaan dalam

mengendalikan keuangan dan menghindari kecurangan atau penyimpangan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak mengakui aset yang belum diterima dan tidak mengakui penyusutan atau amortisasi, yang dapat mengurangi nilai perusahaan dan profitabilitas perusahaan.

## 2. Kelebihan Akuntansi Berbasis Kas

Berikut ini beberapa kelebihan dari pencatatan akuntansi berbasis kas.

- a. Sistem akuntansi berbasis kas mudah dipahami dan dijalankan. Hal ini karena sistem ini hanya mencatat transaksi yang terjadi pada saat uang atau kas diterima atau dikeluarkan, sehingga tidak memerlukan penghitungan yang rumit.
- b. Akuntansi berbasis kas memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat transaksi terjadi. Hal ini karena sistem ini tidak mengakui piutang atau hutang yang belum diterima atau dibayarkan, sehingga tidak ada estimasi yang diperlukan.
- c. Sistem akuntansi berbasis kas tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu mendalam tentang akuntansi. Hal ini membuat sistem ini lebih sesuai untuk digunakan oleh perusahaan kecil yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola sistem akuntansi yang lebih kompleks.
- d. Akuntansi berbasis kas dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang arus kas perusahaan. Hal ini karena sistem ini hanya mencatat transaksi yang terkait dengan uang atau kas yang diterima atau dikeluarkan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang arus kas perusahaan.
- e. Akuntansi berbasis kas dapat digunakan sebagai alat pengendalian internal yang efektif. Hal ini karena sistem ini hanya mencatat transaksi yang terjadi pada saat uang atau kas diterima atau dikeluarkan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan keuangan dan menghindari kecurangan atau penyimpangan.

## 3. Kekurangan Akuntansi Berbasis Kas

Berikut ini beberapa kekurangan dari akuntansi berbasis kas.

- a. Akuntansi berbasis kas tidak mengakui piutang atau hutang yang belum diterima atau dibayarkan. Ini berarti bahwa transaksi yang belum terjadi tidak akan tercatat dalam laporan keuangan, yang dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Commented [NM14]: [https://www.researchgate.net/publication/317199/Kas\\_Basis\\_Vs\\_Akrual\\_Basis](https://www.researchgate.net/publication/317199/Kas_Basis_Vs_Akrual_Basis)

Commented [NM15]: [https://www.researchgate.net/publication/317199/Kas\\_Basis\\_Vs\\_Akrual\\_Basis](https://www.researchgate.net/publication/317199/Kas_Basis_Vs_Akrual_Basis)

- b. Akuntansi berbasis kas tidak mengakui biaya yang belum dikeluarkan. Ini berarti bahwa biaya yang terjadi tetapi belum dibayarkan tidak akan tercatat dalam laporan keuangan, yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan.
- c. Akuntansi berbasis kas tidak mengakui aset yang belum diterima. Ini berarti bahwa aset yang diperoleh tetapi belum diterima tidak akan tercatat dalam laporan keuangan, yang dapat mengurangi nilai perusahaan.
- d. Akuntansi berbasis kas tidak mengakui penyusutan atau amortisasi. Ini berarti bahwa biaya yang terkait dengan penggunaan aset dalam jangka panjang tidak akan tercatat dalam laporan keuangan, yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan.
- e. Akuntansi berbasis kas tidak selalu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

5  
4. Akuntansi Pemerintah Basis Kas Menuju Basis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis yang dimodifikasi dari basis kas menuju basis akrual (*cash toward accrual*) yang berguna untuk menggabungkan penerapan basis kas menuju basis akrual dengan basis akrual secara penuh.

Berikut ini cakupan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

- a. No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. No 02 tentang Laporan realisasi anggaran
- c. No 03 tentang Laporan Arus Kas
- d. No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- e. No 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. No 06 tentang Akuntansi Investasi
- g. No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- h. No 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengejaan
- i. No 09 tentang Akuntansi kewajiban
- j. No 10 tentang koreksi dan peristiwa luar biasa
- k. No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Commented [NM16]: <https://ent/400790060/Makalah-Cas>

5

SAP berbasis kas menuju akrual merupakan Standar Akuntansi Pemerintah yang mencatat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, liabilitas, dan ekuitas dana berbasis akrual. Dalam basis kas menuju akrual tersebut melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu penerimaan dicatat saat kas diterima ke kas negara dan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan dari kas negara). Dan di akhir periode dibutuhkan penyesuaian dalam mencatat pengeluaran harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan dengan menggunakan metode kolorari, serta mencatat hak dan kewajiban negara.

Basis kas untuk pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan pada periode anggaran akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan menggunakan jurnal kolorari) akan menghasilkan neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas yang merupakan unsur dari neraca, sedangkan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan merupakan unsur dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual secara bertahap diatur dengan Peraturan Menteri keuangan oleh pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan SAP

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang di tanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus / defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/ kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan (PP NO 71 Tahun 2010).

Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan-laporan yang saling berhubungan. Pendapatan yang merupakan isi Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya belanja<sup>28</sup> yang juga menjadi isi Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ekuitas dana lancar merupakan unsur neraca sehingga pendapatan dan belanja seharusnya langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar dalam neraca. Akan tetapi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja berdasarkan basis kas hanya mempengaruhi jumlah kas tetapi tidak secara langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akun-akun pendapatan dan belanja merupakan akun pembantu ekuitas dana lancar. Penerimaan pendapatan dicatat terlebih dahulu dalam akun pendapatan dan pengeluaran belanja dicatat dalam akun belanja kemudian pada akhir tahun ditutup ke akun ekuitas dana lancar. (Bandingkan dengan pengertian pendapatan dan biaya sebagai akun pembantu modal dalam akuntansi komersial). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus ada dalam anggaran artinya harus melalui atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran akan diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan hanya mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi komponen lainnya dalam pos neraca pada saat penerimaan dan pengeluaran kas. Akibat perlakuan seperti ini, neraca hanya terdiri dari sisi debit kas sisi kredit ekuitas. Itupun ekuitas muncul pada akhir periode pada saat pendapatan dan biaya ditutup ke ekuitas dana lancar.

Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkanannya penggunaan jurnal korolari. Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100.000.000 secara tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara:

Dr. Belanja Kendaraan	Rp100.000.000
Cr. Kas	Rp100.000.000

Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan

disajikan dalam Neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah, dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi penerapan basis kas menuju akrual ini.

Dr. Kendaraan	Rp. 100.000.000
Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 100.000.000

Pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan SAP karena telah menyajikan akun Neraca dengan basis akrual dan menyajikan akun Laporan Reliasasi Anggaran dengan basis kas. Jurnal korolari ini penting supaya transaksi yang melibatkan akun riil selain kas bisa tetap disajikan dalam Neraca dan disisi lain komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan. Jurnal korolari digunakan agar transaksi yang mempengaruhi akun Neraca (selain kas) dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dicatat pada waktu yang sama.

### C. Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual

Berikut ini penjelasan mengenai standar akuntansi pemerintah dengan menggunakan basis akrual.

#### 1. 35 mahami Standar Akuntansi Basis Akrual

Peraturan Pemerintah No. 23 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

13 SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan



dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis AkruaI dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan SAP Berbasis AkruaI dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan uraian persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Teknik Basis AkruaI memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akruaI digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Terdapat dua pilar yang mendasari konsep basis akruaI, yaitu:

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan pada basis akruaI adalah proses mencatat pendapatan pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat uang atau kas diterima. Dalam sistem akuntansi berbasis akruaI, pendapatan diakui pada saat terjadi pertukaran yang nyata, bukan hanya pada saat terjadi perpindahan uang atau kas.

Contoh pengakuan pendapatan pada basis akruaI yaitu seorang penjual menjual produk senilai Rp 1.000.000 kepada pelanggan dengan pembayaran yang akan diterima dalam waktu 30 hari. Pendapatan akan diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat pelanggan membayar uang atau kas kepada penjual. Contoh lainnya yaitu sebuah perusahaan memperoleh jasa konsultasi senilai Rp 10.000.000 dengan pembayaran

yang akan diterima dalam waktu 60 hari. Pendapatan akan diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat perusahaan menerima uang atau kas dari klien.

Pengakuan pendapatan pada basis akrual memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan jangka panjang dan mengakui piutang atau hutang yang belum diterima atau dibayarkan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti memerlukan estimasi yang tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

b. Pengakuan biaya

Pengakuan biaya pada basis akrual adalah proses mencatat biaya pada saat terjadi pertukaran yang nyata, bukan pada saat uang atau kas dikeluarkan untuk membayar biaya tersebut. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual, biaya diakui pada saat terjadi pertukaran yang nyata, bukan hanya pada saat terjadi perpindahan uang atau kas.

Contoh pengakuan biaya pada basis akrual yaitu sebuah perusahaan membeli produk senilai Rp 1.000.000 untuk dijual kembali dengan pembelian yang akan diterima dalam waktu 30 hari. Biaya pembelian akan diakui pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat perusahaan mengeluarkan uang atau kas untuk membeli produk tersebut. Contoh lainnya yaitu sebuah perusahaan menyewa gedung kantor selama 1 tahun dengan biaya sewa bulanan sebesar Rp 10.000.000. Biaya sewa akan diakui secara bulanan, bukan pada saat perusahaan mengeluarkan uang atau kas untuk membayar sewa tersebut.

Pengakuan biaya pada basis akrual memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan jangka panjang dan mengakui aset yang belum diterima dan penyusutan atau amortisasi. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti memerlukan estimasi yang tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan

perusahaan dan laporan keuangan perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

2. **17** ar Standar Akuntansi Basis Akrual dalam Peraturan Pemerintah

Commented [NM17]: <https://05/Penerapan-SAP-Basis-Akrual>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara mengatur bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan standar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah wajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mencatat pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan modal dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN atau APBD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa peraturan mengenai pengakuan dan penilaian pendapatan dan berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 mengenai perbendaharaan negara menegaskan bahwa peraturan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan pengeluaran berbasis akrual belum dilaksanakan, maka akan diakui dengan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut menggunakan basis kas menuju akrual. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut bersifat sementara, sehingga harus diganti. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual dengan harapan entitas pelaporan dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015.

Laporan keuangan yang baik yaitu laporan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual tercakup dalam kerangka konseptual dan penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAP Nomor 1.

### 3. Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrual Dalam Item-Item Neraca

Berikut ini penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi basis akrual dalam item-item neraca.

#### a. Persediaan

Persediaan diakui ketika manfaat ekonomi potensial mengalir ke pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat ditentukan secara andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya dialihkan.

#### b. Investasi

suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jika telah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut.

- 1) Ada kemungkinan negara akan menerima manfaat ekonomi dan sosial atau potensi hasil dari investasi di masa depan.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat ditentukan secara andal. Pengeluaran yang terkait dengan perolehan investasi jangka pendek dimasukkan ke dalam pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pengeluaran dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran yang terkait dengan perolehan investasi jangka panjang dimasukkan ke dalam pengeluaran keuangan.

#### c. Aktiva tetap

Agar dapat diakui sebagai aset tetap, maka suatu aset harus berwujud dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Jangka waktu ekonomisnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal.
- 3) Tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan.
- 4) Diperoleh atau dibangun untuk digunakan

#### d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda yang berwujud dapat diakui sebagai KDP apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Kemungkinan aset tersebut akan menghasilkan manfaat finansial di masa depan.

Commented [NM18]: <http://ment/400790060/MakalahBasis>

2) biaya perolehan dapat ditentukan secara andal.

3) Aset tersebut masih dalam pengerjaan.

KDP dialihkan ke aset tetap yang sesuai jika persyaratan tersebut terpenuhi pada saat pengerjaan selesai secara substansial; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

e. Kewajiban

Suatu kewajiban dapat diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah digunakan secara eksternal untuk menyelesaikan kewajiban sampai saat ini dan perubahan kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat ditentukan secara andal.

#### 4. Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Berikut ini strategi dalam penerapan akuntansi dengan menggunakan basis akrual.

Tahun	Strategi Penerapan SAP Akrua
2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, b. Mengembangkan framework Akuntansi berbasis Akrua dan BAS c. Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (Proses bisnis dan requirement) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (Lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2013	a. Piloting beberapa KL dan BUN b. Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan sistem c. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2014	a. Parallel run dan konsolidasi seluruh LK b. Review, Evaluasi dan penyempurnaan sistem c. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Akrua

Sumber: Rahayu dan Zahri, 2018

## 5. Kelebihan Akuntansi Berbasis Akrua

Berikut ini beberapa kelebihan penggunaan akuntansi berbasis akrual.

- a. Memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Dalam basis akrual, transaksi diakui saat terjadi, tidak peduli apakah pembayaran sudah atau belum dilakukan. Sehingga, laporan keuangan yang dihasilkan lebih mewakili kondisi keuangan perusahaan saat ini.
- b. Mampu memberikan informasi yang lebih dini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dalam basis akrual, transaksi diakui saat terjadi, sehingga perusahaan dapat memprediksi kemungkinan terjadinya transaksi di masa depan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- c. Dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Dalam basis akrual, transaksi diakui saat terjadi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan mencakup semua transaksi yang terjadi, tidak hanya transaksi yang terkait dengan pembayaran atau penerimaan uang tunai.
- d. Dapat memberikan informasi yang lebih obyektif terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Dalam basis akrual, transaksi diakui saat terjadi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh sifat subyektif dari pembayaran atau penerimaan uang tunai.
- e. Dapat membantu perusahaan dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan menggunakan basis akrual, perusahaan dapat dengan lebih baik mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari aktivitas bisnisnya, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.
- f. Mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan.
- g. Mampu memberikan gambaran yang sangat akurat terkait performa perusahaan secara real time.
- h. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan. Hal tersebut dikarenakan penilaian kesehatan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan.
- i. Penghitungan penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik.

Commented [NM19]: <http://ment/400790060/MakalahBasis>

Commented [NM20]: <https://al>

- j. Walau uang belum masuk ke akun, tapi perusahaan sudah bisa mengklaimnya sebagai pendapatan karena perusahaan sudah memberikan produk barang atau jasa. Dengan demikian, perusahaan dapat menarik uangnya kapanpun uang tersebut dibutuhkan.
- k. Bisa mem<sup>14</sup>paraskan belanja modal dengan akuntansi penyusutan.
- l. Mampu<sup>14</sup> menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik.
- m. Dapat mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.
- n. Pengalokasian sumber daya di perusahaan bisa diketahui dengan lebih akurat.
- o. Proses audit menjadi jauh lebih efektif karena basis akrual menyediakan<sup>14</sup> catatan yang jelas, detil dan koheren.

**6. Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual**

Ada beberapa kekurangan dari akuntansi berbasis akrual, yaitu:

- a. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencatat transaksi. Dalam basis akrual, transaksi diakui saat terjadi, tidak peduli apakah pembayaran sudah atau belum dilakukan. Sehingga, proses pencatatan transaksi menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.
- b. Memerlukan sistem pencatatan yang lebih kompleks. Karena transaksi diakui saat terjadi, maka perusahaan harus memiliki sistem pencatatan yang lebih kompleks untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.
- c. Memerlukan personil yang lebih terlatih. Karena sistem pencatatan yang lebih kompleks, maka diperlukan personil yang lebih terlatih untuk mengelolanya.
- d. Memerlukan biaya yang lebih tinggi. Karena sistem pencatatan yang lebih kompleks dan personil yang lebih terlatih, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengelola akuntansi berbasis akrual akan lebih tinggi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.
- e. Tidak cocok untuk semua jenis perusahaan. Akuntansi berbasis akrual lebih cocok untuk perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang kompleks dan memerlukan laporan keuangan yang lebih akurat dan lengkap. Namun, untuk perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang sederhana atau berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan uang tunai secara langsung, maka akuntansi berbasis kas mungkin lebih sesuai.

Commented [NM21]: <https://al>

- f. AkruaI basis adalah metode yang relatif lebih kompleks dan lebih mahal untuk dilakukan dibanding basis kas.
- g. Dibutuhkan SDM yang lebih kompeten dalam ilmu akuntansi untuk mampu menjalankan akruaI basis.
- h. Jumlah SDM yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih banyak.
- i. Munculnya risiko pendapatan yang tidak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
- j. Dengan adanya pembentukan cadangan maka otomatis akan bisa mengurangi pendapatan perusahaan.
- k. Memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih dengan cara mengenali pendapatan lebih awal ataupun lebih lambat.
- l. Relevansi akuntansi akruaI basis akan menjadi terbatas.
- m. Metode akruaI basis atau dasar akruaI adalah metode yang memerlukan beberapa estimasi. Estimasi tersebut tidak bisa dikatakan benar 100 %, sehingga, pembaca laporan mungkin saja tidak mempunyai tingkat kepercayaan yang sama dengan saat mereka menggunakan metode basis kas.
- n. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.
- o. Tidak bisa memperhitungkan dana akun yang sebenarnya tersedia di akun perusahaan. Mengang semua utang dan piutang tercatat dengan rapi, tapi kadang tidak bisa menunjukkan saldo bank yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu.

**7. Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010**

Berikut ini table perbandingan antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berkaitan dengan komponen laporan keuangan yang dapat mempermudah dalam memahami akuntansi pemerintah yang menggunakan basis akr

**Tabel 1. Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010**



PP No 24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju AkruaI)	PP No 71 Tahun 2010 (Basis AkruaI)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan keuangan	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) Neraca Laporan Arus kas Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Rahayu dan Zahri, 2018

Berikut ini penjelasan dari masing-masing laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang membandingkan anggaran yang telah disetujui dengan realisasi anggaran yang terjadi. Laporan ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi pemerintah untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah disetujui telah diimplementasikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Pendapatan, menunjukkan sejauh mana pendapatan yang dianggarkan tercapai.
- 2) Belanja, menunjukkan sejauh mana belanja yang dianggarkan tercapai.
- 3) Pendapatan dikurangi belanja, menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja yang tercapai.
- 4) Saldo, menunjukkan sejauh mana saldo yang dianggarkan tercapai.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat penting bagi perusahaan atau organisasi pemerintah karena dapat memberikan informasi yang akurat tentang sejauh mana anggaran yang telah disetujui telah diimplementasikan dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara anggaran yang

Commented [NM22]: <http://ment/400790060/Makalah-Basis>

disetujui dengan realisasi anggaran yang terjadi. Dengan mengetahui kesenjangan ini, perusahaan atau organisasi pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

b. **Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)**

**Laporan** Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL) adalah laporan yang menunjukkan perubahan sisa anggaran lebih yang terjadi selama satu periode akuntansi. Laporan ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi pemerintah untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah disetujui telah diimplementasikan dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara anggaran yang disetujui dengan realisasi anggaran yang terjadi.

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL) terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Sisa anggaran lebih awal, menunjukkan sisa anggaran lebih pada awal periode akuntansi.
- 2) Penambahan anggaran lebih, menunjukkan jumlah anggaran lebih yang diberikan selama periode akuntansi.
- 3) Penggunaan anggaran lebih, menunjukkan jumlah anggaran lebih yang digunakan selama periode akuntansi.
- 4) Sisa anggaran lebih akhir, menunjukkan sisa anggaran lebih pada akhir periode akuntansi.

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL) sangat penting bagi perusahaan atau organisasi pemerintah karena dapat memberikan informasi yang akurat tentang sejauh mana anggaran yang telah disetujui telah diimplementasikan dan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara anggaran yang disetujui dengan realisasi anggaran yang terjadi. Dengan mengetahui kesenjangan ini, perusahaan atau organisasi pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

c. **Neraca**

**7** Neraca menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Terdapat beberapa unsur yang dicakup oleh neraca yaitu aset, kewajiban, dan modal. Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur neraca.

1) Aset

30

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu yang diharapkan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban

1

Kewajiban merupakan hutang yang terjadi dari peristiwa di masa lalu yang penyelesaiannya dapat menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3) Ekuitas

15

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menunjukkan hasil operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengukur sejauh mana hasil operasi perusahaan dan memberikan informasi tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Laporan Operasional (LO) terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Pendapatan, menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
- 2) Biaya, menunjukkan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode akuntansi.
- 3) Pendapatan dikurangi biaya, menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya yang terjadi selama periode akuntansi.
- 4) Laba atau rugi, menunjukkan seberapa banyak laba atau rugi yang diperoleh selama periode akuntansi.

Laporan Operasional (LO) sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan informasi yang akurat tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan

mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memuat informasi mengenai kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi, investasi, pembiayaan, dan peralihan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Bagian yang termasuk dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut ini penjelasan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas.

- 1) Penerimaan kas merupakan seluruh aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah.
- 2) Pengeluaran kas merupakan seluruh aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan yang dianggap penting bagi pemahaman laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kebijakan akuntansi: Menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, seperti metode penyusutan atau metode pengakuan pendapatan.
- 2) Estimasi akuntansi: Menjelaskan estimasi akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, seperti estimasi jumlah piutang yang tidak dapat diterima atau estimasi jumlah asuransi yang harus dibayarkan.
- 3) Transaksi dengan pihak terkait: Menjelaskan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak terkait, seperti transaksi dengan pemegang saham atau direksi perusahaan.
- 4) Penyajian ulang laporan keuangan: Menjelaskan jika laporan keuangan yang terdahulu harus disajikan ulang untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Catatan atas laporan keuangan sangat penting bagi pemahaman laporan keuangan karena memberikan informasi tambahan yang dianggap penting bagi pemahaman laporan keuangan dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

#### 8. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat memiliki beberapa dampak bagi perusahaan atau organisasi pemerintah, diantaranya:

- a. Menyediakan informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang kondisi keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual membutuhkan pengakuan pendapatan dan biaya pada saat terjadi pertukaran yang nyata, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah jangka panjang.
- b. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memerlukan pengungkapan informasi yang lebih terperinci tentang transaksi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- c. Memperluas cakupan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memerlukan pengakuan aset tidak berwujud seperti hak cipta dan merek dagang, sehingga dapat memperluas cakupan laporan keuangan pemerintah.
- d. Memerlukan estimasi yang tidak selalu akurat. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memerlukan estimasi untuk pengakuan pendapatan dan biaya, yang tidak selalu akurat dan dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan pemerintah lain yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

#### Tugas Mandiri

##### Refleksi

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25%	50%	75%	100%
1	Memahami keuangan negara.				
2	Memahami ruang lingkup keuangan negara.				

3	Memahami sumber keuangan negara.				
4	Memahami prinsip umum pengelolaan keuangan negara.				
5	Memahami asas-asas pengelolaan keuangan negara.				
6	Memahami pengelolaan keuangan negara.				
7	Memahami akuntansi basis kas.				
8	Memahami kelebihan akuntansi basis kas.				
9	Memahami kekurangan akuntansi basis kas.				
10	Memahami akuntansi basis kas menuju basis akrual.				
11	Memahami akuntansi basis akrual.				
12	Memahami dasar basis akrual dalam peraturan pemerintah.				
13	Memahami penerapan basis akrual dalam item-item neraca.				
14	Memahami strategi penerapan akuntansi berbasis akrual.				
15	Memahami kelebihan akuntansi berbasis akrual.				
16	Memahami Kekurangan akuntansi berbasis akrual.				
17	Memahami perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010				
18	Memahami dampak penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual.				

## Uji Kompetensi

### A. Soal Pilihan Ganda

*Pilihlah jawaban yang paling tepat.*

1. Berikut ini pernyataan mengenai defisini keuangan negara menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 yang benar adalah ...
- A. Semua undang-undang yang telah ditetapkan secara periodik yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dan menentukan sarana pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

- B. Keuangan negara merupakan perencanaan kegiatan yang dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka yang diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan diterapkan di masa yang akan datang, <sup>16</sup>anya satu tahun dari sekarang.
- C. **Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.**
- D. Keuangan negara <sup>16</sup> merupakan definisi keuangan dalam arti luas yang berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.
- E. **Keuangan** negara merupakan bidang yang mempelajari mengenai dampak dari anggaran belanja terhadap ekonomi, khususnya dampak dari tercapainya tujuan ekonomi yang utama, yaitu pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi. <sup>32</sup>
2. Keuangan negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara yang berkaitan dengan hak-hak tersebut merupakan definisi keuangan negara menurut ....
- A. Suparmoko  
B. **Van der Kemp**  
C. M. Ichwan  
D. Hasan Akmal  
<sup>4</sup> John F. Due
3. **Keuangan negara mencakup semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan objek yang telah disebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban merupakan definisi dari keuangan negara menurut pasal 1 ayat 1 UUKN dilihat dari sisi ....**
- A. Objek  
B. Subjek  
C. Tujuan  
D. Manfaat  
E. **Proses**
4. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum merupakan salah satu ruang lingkup keuangan negara menurut ....

- A. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
- B. PP Nomor 24 Tahun 2005
- C. PP Nomor 71 Tahun 2010
- D. Pasal 2 UUKN
- 18 Pasal 1 UUKN
5. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah akan memberikan imbalan secara langsung bagi pembayarnya merupakan salah satu sumber keuangan negara yaitu ....
- A. Retribusi
- B. Pajak
- C. Sumbangan
- D. Denda dan sita
- E. Cukai
6. Perhatikan infografis berikut ini.



Pernyataan yang benar mengenai kriteria warga Indonesia yang tidak perlu membayar pajak penghasilan adalah ....

- A. Pekerja yang memiliki penghasilan sebesar Rp 5 juta tidak perlu membayar pajak.



- B. Pedagang yang memiliki omzet Rp 100-200 juta per tahun diwajibkan membayar pajak.
  - C. **Pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta tidak perlu membayar pajak.**
  - D. Seluruh pekerja diwajibkan untuk membayar pajak.
  - E. Pemilik warung kopi yang memiliki omzet sebesar Rp 700 juta tidak perlu membayar pajak.
7. Pemerintah harus bertanggung jawab atas cara-cara yang digunakan untuk mengelola keuangan negara, termasuk memberikan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang keuangan negara kepada masyarakat merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu ....
- A. Keadilan
  - B. Kepatuhan terhadap hukum
  - C. Transparansi
  - D. Efisiensi
  - E. **Akuntabilitas**
8. Dalam aturan umum pengelolaan keuangan negara terdapat asas lama sebelum berlakunya UUKN dan terdapat asas baru setelah berlakunya UUKN. Berikut ini yang termasuk asas pengelolaan keuangan negara setelah berlakunya UUKN yaitu ....
- A. Asas tahunan
  - B. **Asas proporsionalitas**
  - C. Asas universalitas
  - D. Asas spesialisitas
  - E. Asas kesatuan
9. Asas yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran adalah ....
- A. Asas tahunan
  - B. Asas proporsionalitas
  - C. **Asas universalitas**
  - D. Asas spesialisitas
  - E. Asas kesatuan
10. Berikut ini yang termasuk asas pengelolaan keuangan negara sebelum berlakunya UUKN adalah ....
- A. Asas kesatuan, asas profesionalitas, dan **asas tahunan**

- B. Asas universalitas, asas tahunan, dan asas pemeriksaan
- C. Asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas keterbukaan
- D. Asas kesatuan, asas tahunan, dan asas spesialisitas
- E. Asas spesialisitas, asas keterbukaan, dan asas pemeriksaan
11. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah ....
- A. PP No. 24 Tahun 2005
- B. PP No. 71 Tahun 2005
- C. No. 17 Tahun 2003
- D. PP No. 71 Tahun 2015
- E. PP No. 24 Tahun 2010
12. Cakupan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang membahas mengenai catatan atas laporan keuangan dijelaskan pada nomor ....
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5
13. Perhatikan pernyataan berikut ini.
- 1) Mampu menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik.
  - 2) Jumlah SDM yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih banyak.
  - 3) Dengan adanya pembentukan cadangan maka otomatis akan bisa mengurangi pendapatan perusahaan.
  - 4) Bisa menyelaraskan belanja modal dengan akuntansi penyusutan.
  - 5) Pengalokasian sumber daya di perusahaan bisa diketahui dengan lebih akurat.
- Berdasarkan pernyataan di atas, kelebihan dari standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ditunjukkan pada nomor ....
- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 3), dan 5)
- C. 1), 4), dan 5)
- D. 2), 3), dan 4)
- E. 3), 4), dan 5)

- 31
14. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah ....
- A. PP No.24 Tahun 2005 membahas mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
  - B. PP No. 71 Tahun 2010 membahas mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual
  - C. PP No. 24 Tahun 2005 berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus, catatan atas laporan keuangan
  - D. PP No. 24 Tahun 2005 membahas tentang laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
  - E. PP No. 71 Tahun 2010 hanya berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan saja.
15. Laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan yang dianggap penting bagi pemahaman laporan keuangan adalah ....
- A. Laporan arus kas
  - B. Catatan atas laporan keuangan
  - C. laporan perubahan ekuitas
  - D. Laporan operasional
  - E. Laporan realisasi anggaran

#### B. Soal Uraian

**Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.**

1. Jelaskan bagaimana cara pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.
2. Jelaskan mengapa dalam pengelolaan keuangan negara harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Jelaskan mengapa standar akuntansi pemerintah berganti dari berbasis kas menuju berbasis akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.
4. Jelaskan kelebihan dan kekurangan akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual.
5. Jelaskan perbedaan antara akuntansi pemerintah berbasis kas dengan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

6.

**C. Tugas Praktik**

**Januari 2022 : PT. Kurnia menerima pendapatan dari PT. Jaya sebesar Rp5.000.000 Tunai**

**Februari 2022 : PT. Kurnia menerima pendapatan sebesar Rp3.000.000 dari PT. Yudha, namun uangnya belum diterima.**

1. Buatlah pencatatan menggunakan metode basis kas untuk laporan Laba Rugi dan laporan Neraca berdasarkan transaksi diatas!
2. Buatlah pencatatan menggunakan metode basis akrual untuk laporan Laba Rugi dan laporan Neraca berdasarkan transaksi diatas!
3. Jelaskan perbedaan metode basis kas dan metode basis akrual berdasarkan transaksksi diatas!

## **Bab 2**

### **Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah**

#### **Tujuan Pembelajaran**

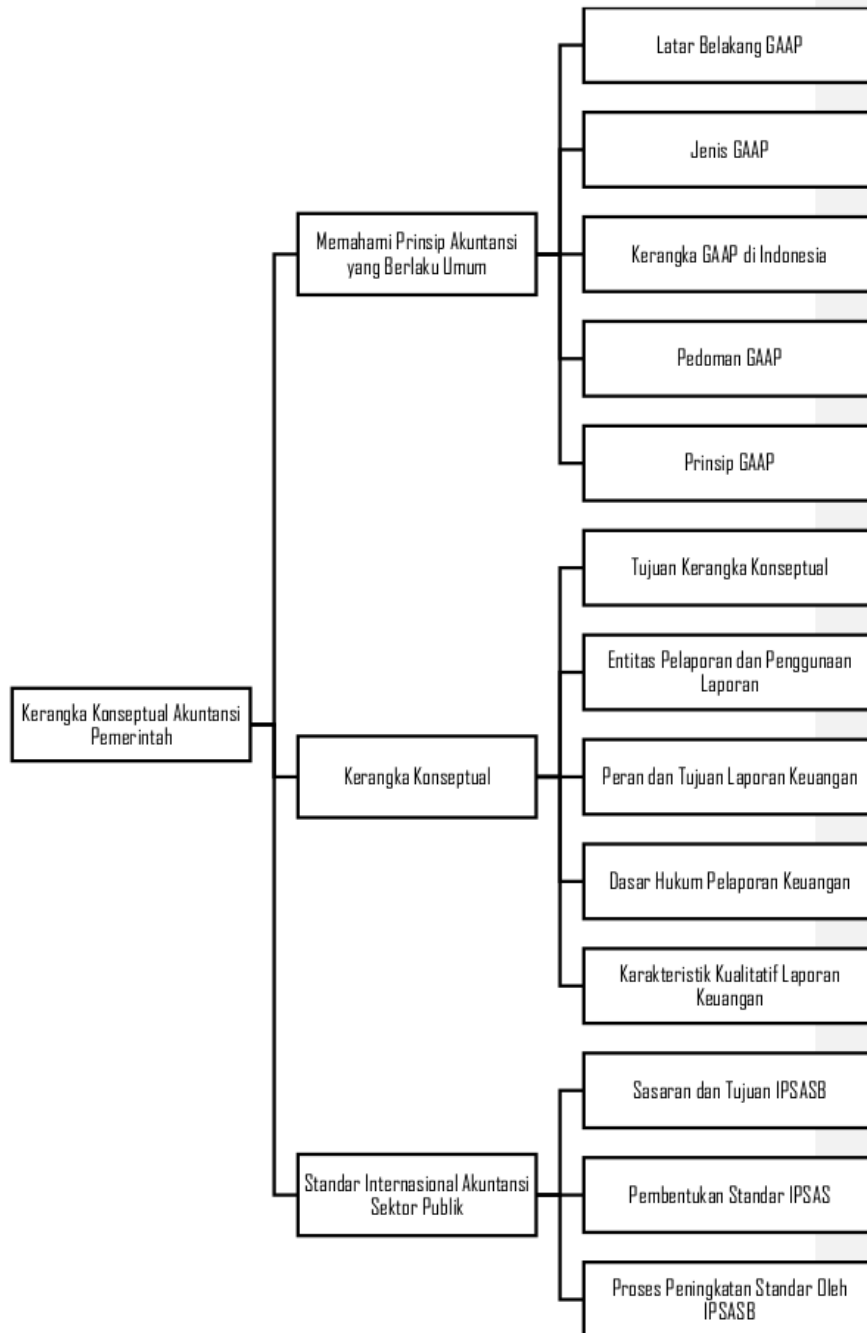
Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu

1. Memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Memahami kerangka konseptual akuntansi pemerintah
3. Memahami standar internasional akuntansi sektor publik

#### **Profil Pelajar Pancasila**

- 1.

**Peta Konsep**



Dalam berbagai organisasi baik swasta maupun pemerintahan tentunya memiliki unsur akuntansi. Akuntansi dalam pemerintahan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah. Proses tersebut antara lain proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan). Akuntansi pemerintah tentunya memiliki prinsip akuntansi, kerangka konseptual, dan standar internasional akuntansi pada sektor publik.

Lalu, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Apa saja kerangka konseptual akuntansi pemerintah? Serta bagaimana standar internasional akuntansi pada sektor publik? Untuk mendapatkan segala jawaban tersebut, perhatikan materi dibawah ini dengan saksama.

#### A. Memahami Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sering disebut dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) menurut Miller at.al merupakan sebuah rangkaian aturan yang terdiri dari aturan umum dan aturan spesifik yang memiliki sifat dinamis sehingga harus diikuti oleh para penyusun laporan keuangan apabila ingin mendapatkan pendapat yang baik dari pihak auditor. GAAP pada dasarnya mengacu pada seperangkat prinsip, prosedur, dan standar akuntansi umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB). Tujuan dari GAAP sendiri adalah untuk meningkatkan konsistensi, kejelasan, dan komparabilitas komunikasi informasi keuangan. Dalam melakukan analisis dan mengekstrak informasi dari laporan keuangan perusahaan, penggunaan GAAP akan sangat memudahkan para investor.

##### 1. Latar Belakang GAAP

Adanya GAAP ditandai dengan terlihatnya peranan akuntansi sebagai bentuk laporan yang menyajikan informasi keuangan kepada berbagai pihak. GAAP secara khusus akan mengatur akuntansi keuangan yang berisi tentang informasi pada pihak luar organisasi. Informasi tersebut tidak hanya berguna untuk pihak luar organisasi saja akan tetapi berguna juga untuk perusahaan tersebut.

Menurut Miller at.al, terdapat tiga kelompok yang ikut serta dalam kegiatan akuntansi keuangan. Ketiga kelompok tersebut adalah pengguna, penyaji, dan auditor. Dalam hal ini, pengguna merupakan seseorang maupun sebuah institusi yang mengandalkan beberapa informasi akuntansi keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan kredit atau investasi.

Commented [FE23]: <https://v/Art4.pdf>

Yang termasuk dalam kelompok pengguna adalah kreditor, analis keuangan, dan investor. Sementara itu, penyaji merupakan salah satu pihak yang bertugas untuk menyusun serta menerbitkan laporan keuangan atau pihak manajemen. Sedangkan auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan dalam menyatakan pendapatnya atas kewajaran.

Ketiga kelompok yang telah disebutkan diatas berpartisipasi dalam akuntansi keuangan yang pelaksanaannya memiliki kepentingan dan tugas yang berbeda-beda. Pendapat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam akuntansi keuangan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya satu aturan yang dapat disepakati oleh pengguna, penyaji dan auditor. Oleh karena itu, arti penting serta latar belakang prinsip akuntansi berlaku umum atau GAAP muncul.

## 2. Jenis GAAP

GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). PABU memiliki berbagai jenis dari berbagai institusi dan lembaga. Berikut jenis-jenis PABU dari berbagai lembaga dan institusi.

### a. PABU versi APB

APB telah meletakkan dasar-dasar penting penyusunan dokumen yang dikenal dengan kerangka konseptual. Dokumen ini (APB Statement No.4) dapat dipandang sebagai embrio kerangka konseptual. PABU yang didefinisikan APB adalah bagian dari dokumen tersebut. *Generally accepted accounting principles* (GAAP) versi APB adalah sarana atau jembatan untuk mengoperasionalkan konsep akuntansi agar secara langsung mempengaruhi bentuk, isi, dan jenis laporan keuangan. Dengan kata lain, GAAP versi APB merupakan pedoman operasional dalam praktik akuntansi.

Prinsip mendasar berisi prinsip tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan atau objek pelaporan lainnya. Misalnya, dalam kategori ini dijelaskan secara umum kapan suatu objek harus diukur, bagaimana menentukan, unit pengukur, kapan hasil pengukuran harus dicatat, apa kriteria pengakuan pendapatan atau biaya, bagaimana pendapatan diasosiasikan dengan biaya dalam rangka menentukan laba, serta dalam kondisi bagaimana penerapan prinsip dapat dikecualikan.

Prinsip operasi umum adalah penjabaran lebih lanjut penerapan prinsip mendasar untuk elemen atau pos-pos laporan keuangan. Dengan kata lain,



kategori ini mendeskripsi tentang perlakuan akuntansi untuk tiap komponen laporan keuangan. Perlakuan akuntansi meliputi pengertian elemen pos, serta pengukuran, pengakuan, penilaian dan penyajian elemen dalam laporan keuangan. Ketentuan tentang perlakuan akuntansi biasanya dituangkan dalam bentuk standar akuntansi.

Prinsip terinci berisi pedoman teknis untuk menjalankan prinsip mendasar dan prinsip operasi umum. Pedoman atau petunjuk teknis ini berisi teknik dan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas transaksi atau kejadian finansial secara spesifik untuk suatu perusahaan. Kategori ini meliputi persyaratan-persyaratan penyajian laporan keuangan, karena landasan konseptual melandasi penurunan atau penjabaran GAAP.

b. PABU versi Rubin

Steven Rubin menganalogi hierarki tersebut dengan suatu bentuk bangunan rumah. PABU bukan merupakan satu buku atau dokumen, tapi lebih merupakan kerangka pedoman yang terdiri atas berbagai sumber dengan berbagai tingkat ke-otoritatifan yang membentuk suatu hierarki. Hierarki dilukiskan sebagai lantai rumah bertingkat dengan pondasi berupa landasan konseptual. Tiap lantai menggambarkan tingkat ke-otoritatifan dengan lantai paling bawah yang berisi sumber yang paling otoritatif. Makin ke atas suatu sumber makin berkurang tingkat ke-otoritatifannya.

c. PABU versi SAS

Kerangka pedoman PABU versi Rubin hanya ditujukan untuk entitas non pemerintahan. Entitas bisnis (khususnya swasta) dan entitas non bisnis atau non laba keduanya adalah sebagai entitas non pemerintahan sebagai pasangan entitas pemerintahan. Karena tujuan, karakteristik, dan yuridiksi operasi entitas pemerintahan yang berbeda, maka diperlukan pelaporan keuangan yang berbeda pula. Untuk itu dibentuklah Governmental Accounting Standards Board (GASB) yang bertanggungjawab untuk menentukan PABU (terutama standar akuntansi) untuk entitas pemerintahan.

### 3. Kerangka GAAP di Indonesia

Di Indonesia, PABU atau GAAP memiliki kerangka yang telah digunakan. Kerangka PABU terbagi menjadi dua, yaitu landasan konseptual dan landasan operasional. Landasan konseptual merupakan landasan atau kerangka dasar yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Sementara itu, landasan operasional atau landasan praktek

memiliki tiga tingkat sebagai landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikut penjelasan dari ketiga tingkatan dalam landasan operasional atau landasan praktek.

a. Tingkat 1

Pedoman yang digunakan pada tingkat 1 telah disediakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI. Pedoman tersebut berbentuk sebuah pengumuman resmi yang berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan.

b. Tingkat 2

Sementara itu, pada tingkatan kedua, pedoman yang digunakan dalam kerangka GAAP di Indonesia adalah buletin teknis, peraturan pemerintah, pedoman atau praktik akuntansi industri, dan simpulan riset akuntansi. Berikut penjelasan dari pedoman yang digunakan pada tingkat 2.

1) Buletin teknis

Karena standar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok, hal-hal yang bersifat teknis pencatatan biasanya diserahkan kepada praktisi untuk menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Buletin ini dapat berisi petunjuk teknis yang diberikan oleh penyusun standar atau badan otoritas lainnya yang beranggotakan ahli akuntansi untuk tujuan menjawab pertanyaan dari praktisi atau untuk tujuan memberi contoh pelaksanaan teknis yang dianggap bermanfaat.

2) Peraturan pemerintah

Banyak peraturan pemerintah yang mempengaruhi atau bahkan harus dijalankan dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan atau penyampaian informasi suatu industri tertentu. Misalnya peraturan pemerintah mengenai BUMN, asuransi dan perbankan. Karena harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan, sumber-sumber tersebut jelas merupakan bagian dari kerangka pedoman.

3) Pedoman atau praktik akuntansi industri

Karena kebutuhan dan kepraktisan dalam industri tertentu, berkembang praktik akuntansi yang banyak digunakan dalam industri tersebut. Untuk kepentingan industri, badan yang berwenang dalam

suatu industri tidak jarang mengeluarkan pedoman akuntansi tertentu yang khusus berlaku dalam industri tersebut. Karena pedoman tersebut berlaku umum dalam industri dan sudah dikenal secara luas, maka sumber ini jelas merupakan bagian dari kerangka kerja PABU. Misalnya pedoman akuntansi untuk industri gula, pedoman akuntansi perbankan, dan pedoman akuntansi untuk pemerintah daerah.

4) Simpulan riset akuntansi

Temuan para ahli mengenai perlakuan akuntansi yang dianggap baik dan informatif dapat dijadikan basis untuk mengungkapkan informasi keuangan, dan dapat dijadikan basis untuk menentukan kelayakan perlakuan akuntansi tertentu yang mungkin kejadiannya sangat khusus. Sumber ini juga menjadi bagian dari kerangka PABU. Tentu saja auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan kelayakan perlakuan yang disarankan dalam sumber ini terhadap kondisi yang dihadapinya.

c. Tingkat 3

Sedangkan, landasan praktek yang digunakan pada tingkat 3 adalah praktik akuntansi yang sehat dan sumber lainnya. Berikut penjelasan dari landasan praktek yang digunakan pada tingkat 3.

1) Praktik akuntansi yang sehat

Praktik, konversi, dan kebiasaan akuntansi/ pelaporan yang dianggap baik dan sehat dapat juga dijadikan acuan untuk menentukan kelayakan perlakuan akuntansi tertentu.

2) Sumber lain

Dalam hal kejadian yang sangat khusus atau yang masih baru dalam dunia akuntansi, yang perlakuannya tidak dapat dicari dalam berbagai sumber sebelumnya. Akuntan dapat mendasarkan diri pada prinsip-prinsip akuntansi (termasuk metode dan teknik) yang dibahas dalam buku teks atau yang disarankan para ahli dalam artikel ilmiah atau akademik. Tentu saja kelayakan perlakuan harus dinilai atas dasar kerangka konseptual dan dipertimbangkan secara profesional.

Apabila ketiga tingkatan yang telah disebutkan diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Prinsip Akuntansi di Indonesia

Sumber: SlidePlayer, t.t

**Commented [NM24]:** <https://772/1>

#### 4. Pedoman GAAP

GAAP atau PABU telah menetapkan beberapa pedoman yang berguna untuk memberlakukan sebuah objek atau informasi yang harus dilaporkan. Berikut penjelasan terkait dengan pedoman GAAP atau PABU.

##### a. Definisi menurut PABU

PABU memberikan batasan atau definisi berbagai elemen, pos, atau objek laporan keuangan. Istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Definisi akan sangat kritis untuk elemen atau pos laporan keuangan. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah telanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang acap kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan.

Dengan pendefinisian elemen. pos, atau istilah dengan cermat, diharapkan pemakai laporan mengartikan simbol-simbol tersebut sesuai dengan pengertian yang didefinisikan dalam standar akuntansi. Sebagai contoh, PABU mendefinisikan aset sebagai manfaat masa datang yang cukup pasti, dikuasai suatu entitas, dan timbul akibat transaksi yang telah terjadi. Demikian juga, pos kas didefinisikan sebagai uang tunai atau alat-alat lain yang disamakan dengan uang tunai. Pengertian ini berbeda dengan pengertian umum kas yang disamakan dengan uang tunai.

b. Pengukuran penilaian

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi.

Berkaitan dengan hal ini misalnya adalah aset tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Pengukuran sering pula disebut penilaian (valuation). Akan tetapi, penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan dalam laporan keuangan.

Penilaian berkaitan dengan masalah apakah misalnya persediaan dilaporkan sebesar kos atau harga pasar. Teori akuntansi menawarkan beberapa pendekatan penilaian antara lain biaya historis, beban pengganti, biaya likuidasi, harga masukan, harga keluaran, dan daya beli konstan.

c. Pengakuan

Pengakuan (recognition) adalah pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam Laporan Keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. PABU memberi pedoman tentang pengakuan ini dengan menetapkan beberapa kriteria pengakuan agar suatu jumlah rupiah suatu objek transaksi dapat diakui serta saat pengakuannya. Misalnya. PABU memberi pedoman tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan atau biaya.

d. Penyajian dan pengungkapan

Penyajian (presentation) menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat Laporan Keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan (disclosure) berkaitan dengan cara penyajian atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui Laporan Keuangan utama.

Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari Laporan Keuangan utama?, bagaimana suatu informasi harus digabung dengan pos Laporan Keuangan yang lain?, dan apakah suatu pos perlu dirinci atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki?

Yang termasuk dalam pengertian pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statemen keuangan. Standar akuntansi mengatur cara-cara mengungkapkan informasi tersebut. Salah satu contoh penyajian yang diatur PABU adalah mengenai utang yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Cara penyajian utang adalah dengan cara mengurutkan atas dasar jangka waktu pelunasan, yaitu yang paling pendek diletakkan paling atas.

Dengan hal-hal pokok yang diatur dalam kerangka PABU seperti diuraikan di atas, diharapkan Laporan Keuangan ditafsirkan dengan benar dan tidak menyesatkan pemakainya. Sebaliknya, agar memperoleh pesan yang benar dari Laporan Keuangan, pemakai harus menggunakan 'tata bahasa' yang baik dan benar sesuai dengan kerangka pedoman PABU. Dengan demikian komunikasi yang efektif akan terjadi dan tujuan pelaporan keuangan akan tercapai.

## 5. Prinsip GAAP

Terdapat sebelas Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Berikut penjelasan dari sebelas prinsip GAAP.

### a. Prinsip biaya historis

Pada prinsip biaya historis akan mengharuskan setiap barang maupun jasa yang telah diperoleh harus dicatat berdasarkan pada keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan dalam mendapatkan barang maupun jasa tersebut.

### b. Prinsip pengakuan pendapatan

Commented [FE25]: <https://v/10-prinsip-akuntansi-yang-perlu>

Adanya pendapatan diakibatkan oleh kenaikan harta yang dihasilkan pada suatu kegiatan usaha seperti penerimaan bagi hasil, penjualan serta dari kegiatan usaha lainnya. Pendapatan akan diakui apabila terdapat kepastian yang berkaitan dengan jumlah atau nominal baik besar maupun kecil yang dapat diukur secara tepat dengan harta yang telah diperoleh dari transaksi penjualan jasa maupun penjualan barang. Dasar yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak-pihak yang bebas.

c. Prinsip mempertemukan

Prinsip mempertemukan yang termasuk dalam prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan menentukan besar atau kecilnya keuntungan bersih pada masing-masing periodenya. Prinsip mempertemukan ini sangat bergantung pada suatu penentuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda maka akan mengakibatkan pembenaran pada biaya yang tidak dapat dilakukan. Contohnya pada transaksi pendapatan yang diterima di muka.

d. Prinsip konsistensi

Pada prinsip konsistensi ini digunakan untuk melakukan pelaporan keuangan tetap serta digunakan secara konsisten yaitu metode dan prosedur yang digunakan tidak berubah-ubah. Prinsip konsistensi ini memiliki tujuan agar suatu laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang terdapat pada periode sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan memberikan manfaat yang lebih pada penggunaannya.

e. Prinsip pengungkapan lengkap

Dalam laporan keuangan diharuskan untuk memiliki prinsip pengungkapan penuh atau lengkap dalam menyajikan sebuah informasi yang dapat dimaklumkan sepenuhnya. Akan tetapi, apabila terdapat suatu informasi yang tidak dapat disajikan pada laporan keuangan maka akan diberikan keterangan berupa catatan kaki maupun lampiran.

f. Prinsip kesinambungan usaha

Pada prinsip ini menganggap bahwa suatu entitas ekonomi maupun bisnis akan dapat berjalan secara berkesinambungan atau secara terus

menerus tanpa adanya pembubaran dan penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang menghalanginya.

g. Prinsip materialitas

Prinsip materialitas merupakan salah satu prinsip akuntansi berlaku umum yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan keseluruhan aturan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa penerapan akuntansi yang tidak mematuhi teori yang ada. Akibatnya tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang bersifat material atau immaterial. Maksudnya adalah setiap informasi akuntansi akan memiliki nominal dan dapat dijual.

h. Prinsip satuan moneter

Prinsip satuan moneter merupakan sebuah prinsip dasar akuntansi yang melakukan pencatatan transaksi hanya dalam bentuk mata uang serta tanpa melibatkan hal-hal non kualitatif. Segala bentuk pencatatan sangat terbatas pada segala sesuatu yang hanya dapat diukur dan dinilai dengan satuan uang. Sementara itu, transaksi nonkualitatif seperti prestasi dan mutu tidak dapat dilaporkan atau tidak dapat dinilai dalam bentuk uang.

i. Prinsip periode akuntansi

Prinsip periode akuntansi atau yang sering disebut dengan kurun waktu merupakan suatu pelaporan dan penilaian keuangan perusahaan yang telah dibatasi oleh periode waktu tertentu. Pada prinsip periode akuntansi contohnya adalah sebuah perusahaan yang menjalankan suatu usahanya berdasarkan periode akuntansi akan dimulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

j. Prinsip entitas ekonomi

Prinsip entitas ekonomi dapat pula diartikan sebagai salah satu konsep pada kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa sebuah perusahaan termasuk dalam satuan ekonomi yang dapat berdiri sendiri serta terpisah dari entitas ekonomi lainnya bahkan dengan pribadi pemiliknya. Oleh karena itu, prinsip entitas ekonomi dapat memisahkan dan membedakan segala bentuk pencatatan transaksi pada kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pemiliknya.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada akuntansi pemerintah merupakan suatu konsep dasar dalam melakukan penyusunan serta pengembangan dalam Standar Akuntansi

Commented [FE26]: <https://v-konseptual-akuntansi-pemerint>



Pemerintah. Selain itu, kerangka konseptual juga dijadikan sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, serta pengguna laporan keuangan ketika mencari suatu permasalahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 1. Tujuan Kerangka Konseptual

<sup>24</sup> Kerangka konseptual merumuskan konsep yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan standar. Tujuan dari kerangka konseptual menjadi acuan bagi pihak-pihak <sup>24</sup> sebagai berikut.

- a. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang telah disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Fungsi dari kerangka konseptual adalah sebagai acuan dalam berbagai permasalahan dalam akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila terjadi hal-hal yang sangat bertentangan antara kerangka konseptual dan standar maka yang lebih dipentingkan adalah ketentuan standar dibandingkan dengan kerangka konseptual. Dengan seiring berjalannya waktu, konflik yang demikian diharapkan mampu untuk diselesaikan sejalan dengan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah pada masa yang akan datang.

### 2. Entitas Pelaporan dan Penggunaan Laporan

Sebelum membahas terkait dengan entitas pelaporan, lebih baik untuk kita memahami terlebih dahulu entitas keuangan. Entitas keuangan merupakan salah satu unit yang terdapat dalam pemerintahan yang bertugas <sup>23</sup> mengelola berbagai anggaran, kewajiban, dan kekayaan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan yang berdasarkan pada akuntansi yang diselenggarakannya.

Se<sup>23</sup>ntara itu, entitas pelaporan merupakan salah satu unit yang terdapat pada pemerintahan yang terdiri atas satu bahkan lebih entitas akuntansi yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Entitas laporan biasanya berupa laporan keuangan yang memiliki tujuan umum, diantaranya sebagai berikut.

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian lembaga atau negara yang berada pada lingkungan pemerintah pusat.
- d. Satuan organisasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah daerah maupun pusat atau organisasi lainnya. Apabila mengacu pada perundang-undangan pada satuan organisasi yang dimaksudkan maka diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan tersebut.

Sebelum melakukan penetapan pada laporan entitas, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah syarat pengelolaan, pengendalian, serta penguasaan suatu entitas terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

### 3. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan

Berikut penjelasan terkait dengan peranan dan tujuan laporan keuangan.

- a. Peranan pelaporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan digunakan untuk menyediakan berbagai informasi relevan yang berkaitan dengan posisi keuangan serta segala bentuk transaksi yang dilakukan pada sebuah entitas pelaporan pada suatu periode pelaporan. Kegunaan laporan keuangan yang utama adalah untuk mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yang terdapat pada pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta dapat membantu dalam menentukan kepatuhannya terhadap beberapa peraturan dalam perundang-undangan.

Entitas pelaporan tentunya memiliki kewajiban dalam melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan berbagai kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut.

- 1) Akuntabilitas

Entitas pelaporan akan mempertanggungjawabkan segala hal yang terdapat dalam pengelolaan sumber daya dan berhasilnya pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

- 2) Manajemen

Entitas pelaporan akan membantu para penggunanya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan segala kegiatan dalam entitas pelaporan yang masih dalam periode pelaporan. Hal tersebut akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas segala aset kewajiban, serta ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Dalam memberikan segala bentuk informasi keuangan dilakukan dengan terbuka serta jujur kepada masyarakat dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas segala bentuk tanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya serta kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Adanya keseimbangan yang terjadi antargenerasi akan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah terhadap periode dalam laporan keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan serta apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Selain itu, pelaporan keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi entitas pelaporan terutama dalam hal menggunakan sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah untuk mencapai segala kinerja yang telah direncanakan.

b. Tujuan pelaporan keuangan

Dalam melakukan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan beberapa informasi yang berguna bagi para pengguna yang akan menilai akuntabilitasnya dan membuat keputusan yang terbaik dalam keputusan ekonomis, maupun politik dengan cara sebagai berikut.

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan akan menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan sumber daya keuangan atau ekonomi dan penggunaannya, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### 4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Dalam melakukan peloran keuangan pemerintah tentunya dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur keuangan pemerintah. Berikut dasar-dasar hukum dalam melakukan pelaporan keuangan pemerintah.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
- 2) Undang-Undang di bidang keuangan negara.
- 3) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 6) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

10

- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

## 5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Adanya karakteristik kualitatif laporan keuangan digunakan untuk menyediakan berbagai informasi yang akan bermanfaat dalam melakukan proses evaluasi dari performa manajerial dan juga operasional. Pelaporan keuangan yang ada akan membantu untuk memenuhi segala kewajiban perusahaan sehingga menjadi semakin akuntabel secara publik. Selain itu, pelaporan keuangan juga akan membantu dalam memenuhi segala keperluan yang dimiliki oleh pengguna laporan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan.

Keterbatasan yang dimiliki dalam hal kewenangan untuk mendapatkan informasi menjadikan para pemilik kepentingan laporan keuangan akan menyandarkan laporan keuangannya menjadi salah satu sumber informasi yang sangat berguna nantinya. Penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah atau yang disingkat dengan SAP. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut SAP, terdapat beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut.

### a. Mudah dipahami (understandability)

Sebuah laporan akan disebut sebagai laporan yang bermanfaat apabila dapat dipahami oleh pembaca atau penerimanya dengan pemahaman yang baik. Agar sebuah laporan dapat dipahami dengan baik maka dibutuhkan pengguna atau pembaca laporan memiliki kemampuan atau pengetahuan yang mumpuni dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu, pengguna juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berasumsi serta memahami konsep yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang mudah untuk dipahami seluruh penggunanya yang bukan termasuk dalam seorang ahli. Akan tetapi, kesederhanaan dan kemudahan pemahaman yang dimiliki oleh laporan keuangan tidak boleh mengorbankan relevansi informasi yang harus disampaikan meskipun tidak terlalu kompleks. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor independen dapat terbaca dengan mudah dan

Commented [FE27]: <https://e...>  
eristik-kualitatif-laporan-keuang

dapat bermanfaat serta tidak mengandung informasi yang menyesatkan bagi pengguna informasi namun juga dapat memahami penggunaannya.

b. Relevan

Laporan keuangan harus memiliki sifat yang relevan. Hal tersebut bertujuan untuk kebermanfaatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus relevan untuk para penggunanya yang nantinya akan berpengaruh pada proses pengambilan sebuah keputusan. Sebuah informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut dipengaruhi oleh penggunanya pada saat melakukan pengambilan suatu keputusan dengan cara membantu mengevaluasi laporan keuangan pada periode sebelumnya, saat ini, maupun periode yang akan datang.

Meskipun demikian, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen dan memiliki tujuan umum kepada para pemilik perusahaan yang penyusunannya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dengan adanya prinsip-prinsip akuntansi, seluruh data yang terdapat pada periode sebelumnya diharapkan tetap dapat digunakan oleh seorang analis keuangan dalam melakukan sebuah prediksi yang berkaitan dengan entitas untuk waktu yang akan datang. Berikut merupakan salah satu contoh informasi laporan keuangan yang relevan.

1) Memiliki manfaat prediktif

Dalam hal ini, informasi akan berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam melakukan prediksi waktu pada periode yang akan datang dengan berdasarkan pada informasi hasil dari periode sebelumnya ataupun pada periode sekarang.

2) Memiliki manfaat umpan balik

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memiliki manfaat umpan balik bagi penggunanya. Maksudnya, informasi mengandung kemungkinan penegasan ataupun koreksi dari hasil pada periode sebelumnya yang dilakukan oleh para pengguna laporan keuangan.

3) Tepat waktu

4) lengkap

c. Materialitas (materiality)

Karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan adalah materialitas. Yang disebut dengan materialitas merupakan sebuah tolak ukur terhadap suatu informasi yang dapat dianggap relevan maupun tidak. Sebuah informasi laporan keuangan akan dianggap sebagai material atau signifikan apabila terdapat kesalahan, salah penyajian, maupun salah dalam mencatat informasi akan berdampak pada sebuah keputusan ekonomi pada pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan.

d. Keandalan (reliability)

Apabila dalam laporan keuangan terdapat suatu penundaan yang tidak semestinya terjadi maka segala informasi yang dihasilkan pun akan kehilangan tingkatan relevansinya. Dengan adanya hal tersebut, pihak manajemen harus mampu untuk menyeimbangkan manfaat relatif yang terjadi antara suatu pelaporan yang tepat waktu dan memiliki ketentuan informasi yang memang dapat diandalkan. Sementara itu, pihak penyedia informasi yang tepat pada waktunya akan mampu meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan tersebut.

Begitupun sebaliknya, apabila sebuah pelaporan ditunda hingga seluruh aspek didalamnya telah diketahui maka informasi tersebut yang telah dihasilkan kemungkinan besar akan menjadi sangat andal namun manfaat yang didapatkan oleh para pengambil keputusan akan berkurang. Oleh karena itu, pengguna software akuntansi akan sangat membantu dalam melakukan penyajian berbagai data laporan agar tepat waktu tanpa harus disusun terlebih dahulu secara manual. Agar suatu informasi dapat diandalkan maka laporan keuangan atau informasi tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan dalam keandalan informasi seperti penyajian yang jujur atau apa adanya, substansi yang mampu untuk **36** ngungguli bentuk, netral, pertimbangan yang sehat, serta lengkap.

e. Dapat dibandingkan (comparability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki sifat yang dapat dibandingkan atau dapat dipertimbangkan dengan baik. Para pengguna laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan pada suatu perusahaan antar

periodenya. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan dapat diidentifikasi apabila terdapat kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Selain itu, para pengguna laporan keuangan juga harus memiliki kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan yang terdapat pada organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Hal tersebut bertujuan agar para pengguna dapat melakukan evaluasi pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara lebih relative. Untuk itu, bentuk penyajian dan juga penyajian pada dampak keuangan dari transaksi dan juga peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk organisasi publik terkait, antar periode organisasi yang serupa, dan untuk organisasi yang berbeda-beda.

Salah satu penerapan yang dianggap penting dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan yang mampu dibandingkan adalah pihak pengguna laporan keuangan harus memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pada sektor publik, perubahan kebijakan, serta pengaruhnya dalam berbagai perubahan tersebut. Setiap pengguna informasi bisa mengidentifikasi adanya perbedaan kebijakan akuntansi yang dilakukan untuk melakukan transaksi dan juga peristiwa lainnya yang sama dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya dalam perusahaan yang berbeda.

### C. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik

Federasi Akuntan Internasional atau IFAC (*International Federation of Accounting*) telah membentuk sebuah komite yang memiliki tugas khusus yaitu untuk menyusun standar akuntansi pada sektor publik. Komite khusus tersebut dinamai dengan *The Public Sektor Committee* yang bertugas untuk menyusun sebuah standar akuntansi yang akan digunakan untuk sektor publik yang berlaku secara internasional. Standar akuntansi yang telah dibuat dinamai dengan *International Public Sektor Accounting Standards* atau IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Dalam penerapannya, komite tersebut tidak hanya bertugas untuk menyusun standar saja, namun juga membuat program yang secara sistematis dapat mendorong penerapan IPSAS oleh entitas publik di seluruh dunia.

Dalam melakukan penyusunan standar tersebut, komite mengacu pada *International Accounting Standard* atau IAS (Standar Akuntansi Internasional). Acuan

Commented [FE28]: [https://10/STANDAR\\_INTERNASIONAL\\_K](https://10/STANDAR_INTERNASIONAL_K)



yang digunakan oleh komite khususnya terdapat pada pernyataan yang sesuai dengan karakteristik dan konteks pada akuntansi sektor publik. Komite tidak hanya menggunakan IAS saja namun juga menggunakan sumber lainnya yang digunakan sebagai acuan pembuatan standar. Sumber lain yang digunakan sebagai acuan seperti asosiasi profesi, perundangan, serta berbagai organisasi lain yang bergerak pada kepentingan dalam akuntansi sektor publik.

IPSAS akan digunakan pada negara yang belum memiliki peraturan hukum dalam melakukan pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik. Namun, apabila sebuah negara tersebut telah memiliki arahan dan peraturan hukum yang menuntuk pelaporan keuangan organisasi sektor publik yang telah dibuat oleh pemerintah maupun badan pengatur atau profesi akuntan maka IPSAS tidak dapat digunakan. IPSAS tidak dapat digunakan untuk menggantikan peraturan yang telah ditetapkan pada suatu negara yang bersangkutan.

Dalam hal ini, IPSAS meliputi standar yang telah dikembangkan pada basis akrual. Selain itu, terdapat juga terdapat suatu bagian dari IPSAS yang terpisah dengan tujuan untuk memperinci kebutuhan yang digunakan untuk basis cash. Dalam penerapannya, IPSAS dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik yang tengah melakukan proses perubahan dari basis cash ke basis akrual. Organisasi sektor publik yang telah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menuju IPSAS harus tetap mengikuti ketentuan waktu yang berhubungan dengan masa transisi dari basis cash menuju basis akrual yang telah diatur oleh IPSAS.

IPSAS merupakan salah satu standar akuntansi yang digunakan untuk entitas sektor publik yang kemudian dikembangkan kembali oleh entitas *International Sector Public Accounting Standart*. Sementara itu, IPSASB merupakan salah satu organisasi internasional yang terbentuk dengan tujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik pada kancah internasional melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan. IPSASB berada dibawah naungan IFAC atau *Internatioanl Federation of Accounting* yaitu salah satu organisasi profesi akuntan yang didirikan pada tahun 1977 di tingkat internasional. IPSASB terbentuk karena adanya kesadaran akan manfaat laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan konsisten. Selain itu, IPSAS termasuk sebagai standar internasional akuntansi sektor publik yang diharapkan akan mampu dalam memainkan peranan utama dalam mewujudkan berbagai manfaat tersebut.

IPSASB pada tahun 2005 telah melakukan pembaharuan pada standar-standar IPSAS yang sebelumnya telah diterbitkan. Pembaharuan dilakukan pada 11 standar

dari total keseluruhan 20 standar yang telah diterbitkan sebelumnya. Tidak hanya melakukan pembaharuan saja, namun IPSASB juga menetapkan tiga exposure draft lainnya. Kegiatan pembaharuan tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi terhadap standar IPSAS dengan IAS atau IFRS. Usaha dalam melakukan konvergensi dimulai dari tahun 2003 melalui *General Improvements Project*.

### **1. Sasaran dan Tujuan IPSASB**

IPSASB dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Salah satu tujuan dalam pembentukan IPSASB adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan serta meningkatkan kualitasnya pada sektor publik. Peningkatan kualitas yang terdapat dalam laporan keuangan diantaranya sebagai berikut.

- a. Adanya informasi yang komprehensif yang ditujukan untuk manajemen keuangan sektor publik dalam rangka membantu pihak manajemen keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan.
- b. IPSASB akan memberikan pembimbingan yang berkaitan dengan isu-isu serta pengalaman dalam melakukan pelaporan keuangan pada sektor publik.
- c. Adanya IPSASB akan menjadikannya sebagai standar akuntansi dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat berguna oleh entitas sektor publik.
- d. Sasaran dan tujuan yang terakhir adalah dapat mempromosikan kepada entitas sektor publik dalam melakukan adopsi standar, serta konvergensi internasional.

### **2. Pembentukan Standar IPSAS**

Dalam menjalankan segala program kerjanya, IPSASB akan mengikuti segala proses hukum yang sangat terstruktur serta akan melibatkan publik pada saat melakukan pengembangan IPSAS. Berdasarkan proses tersebut, kesempatan terbuka dengan lebar bagi orang-orang yang tertarik dalam pelaporan keuangan sektor publik dalam membuat pandangan mereka akan diketahui oleh IPSASB. Selain itu, mereka juga dapat memastikan bahwa pendapat yang telah disalurkan akan dipertimbangkan pada saat melakukan penetapan standar. Berikut beberapa standar akuntansi sektor publik yang telah berhasil ditetapkan oleh IPSAS hingga tahun 2010.

- a. IPSAS 1--- Presentation of financial statements
- b. IPSAS 2 --- cash flow statement
- c. IPSAS 3 --- Accounting Policies, Changes In Accounting Estimators and errors
- d. IPSAS 4 --- the effects of changess in foregn exchange rates

- e. IPSAS 5 --- Borrowing Costs
- f. IPSAS 6 --- consolidated and separate financial statements
- g. IPSAS 7 --- investment in associates
- h. IPSAS 8 --- interests in joint venture
- i. IPSAS 9 --- revenue from exchange transactions
- j. IPSAS 10 --- Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- k. IPSAS 11 --- Construction Contracts
- l. IPSAS 12 --- Inventories
- m. IPSAS 13 --- Leases
- n. IPSAS 14 --- Events After the Date
- o. IPSAS 15 --- Financial Instrument: Disclosure and Presentation
- p. IPSAS 16 --- Investment Property
- q. IPSAS 17 --- Property, Plant, and Equipment
- r. IPSAS 18 --- Segment Reporting
- s. IPSAS 19 --- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- t. IPSAS 20 --- Related Party Disclosures
- u. IPSAS 21 --- Impairment of Non-Cash Generating Assets
- v. IPSAS 22 --- Disclosure of Information about the General Government Sector (IFAC, 2010)
- w. IPSAS 23 --- Revenue from Non-Exchange Transaction (Taxes and Transfers)
- x. IPSAS 24 --- Presentation of Budget Information in Financial Statements
- y. IPSAS 25 --- Employed benefits
- z. IPSAS 26 --- Impairment of Cash Generating Assets
- aa. IPSAS 27 --- Agriculture
- bb. IPSAS 28 --- Financial Instrument: Presentation
- cc. IPSAS 29 --- Financial Instrument: Recognition and Measurement
- dd. IPSAS 30 --- Financial Instrument : Discloser
- ee. IPSAS 31 --- Intangible Assets. (IFAC, 2010)
- ff. IPSAS 32 --- Service Concession Arrangement: Grantor

### **3. Proses Peningkatan Standar Oleh IPSASB**

Pada akhir tahun 1997, IPSASB memulai sebuah program pengembangan IPSAS yang didasarkan kepada International Accounting Standard (IAS) yang diterbitkan International Accounting Standard Board (IASB) tahun 1997. IPSASB mengembangkan persyaratanpersyaratan IAS yang relevan

untuk sektor publik. IPSAS menggunakan persyaratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut.

Pada tahun 2003 melalui proyek General Improvement, IASB menerbitkan revisi IAS. Proyek General Improvement bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi alternatif, pengulangan-pengulangan yang tidak perlu (redundancies), dan juga konflik dalam IAS sendiri. Proyek juga berhubungan dengan isu konvergensi dan berbagai peningkatan lainnya. Tujuannya dari revisi IPSAS yang diterbitkan kali ini adalah agar IPSAS konvergen dengan IAS yang diterbitkan tahun 2003 tersebut.

IPSAS menjadi rujukan karena keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut. Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.

Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam yurisdiksi mereka masing-masing.

IPSAS diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik yang masih menganut basis kas dan telah mengadopsi basis akrual. IPSASB sebagai penyusun standar akuntansi IFAC untuk sektor publik telah menerbitkan empat exposure draft (ED) dalam kerangka konvergensi standar akuntansi sektor publik (IPSAS) ke standar akuntansi sektor komersial/bisnis (IAS/IFRS).

Komponen laporan keuangan akuntansi pemerintah berbasis akrual (IPSAS) di Perancis yaitu neraca, laporan surplus/defisit, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, komponen laporan keuangan di Swedia, yaitu neraca, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan apropriasi, laporan kinerja, dan catatan atas laporan keuangan

**Tugas Mandiri/Kelompok**

**Refleksi**

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25 %	50 %	75 %	100 %
1					
2					
3					
4					

**Uji Kompetensi**

**A. Soal Pilihan Ganda**

*Pilihlah jawaban yang paling tepat.*

**B. Soal Essai Uraian**

*Jawablah dengan tepat dan benar.*

**C. Tugas Praktik**

### **Bab 3**

## **Laporan Keuangan Pemerintah**

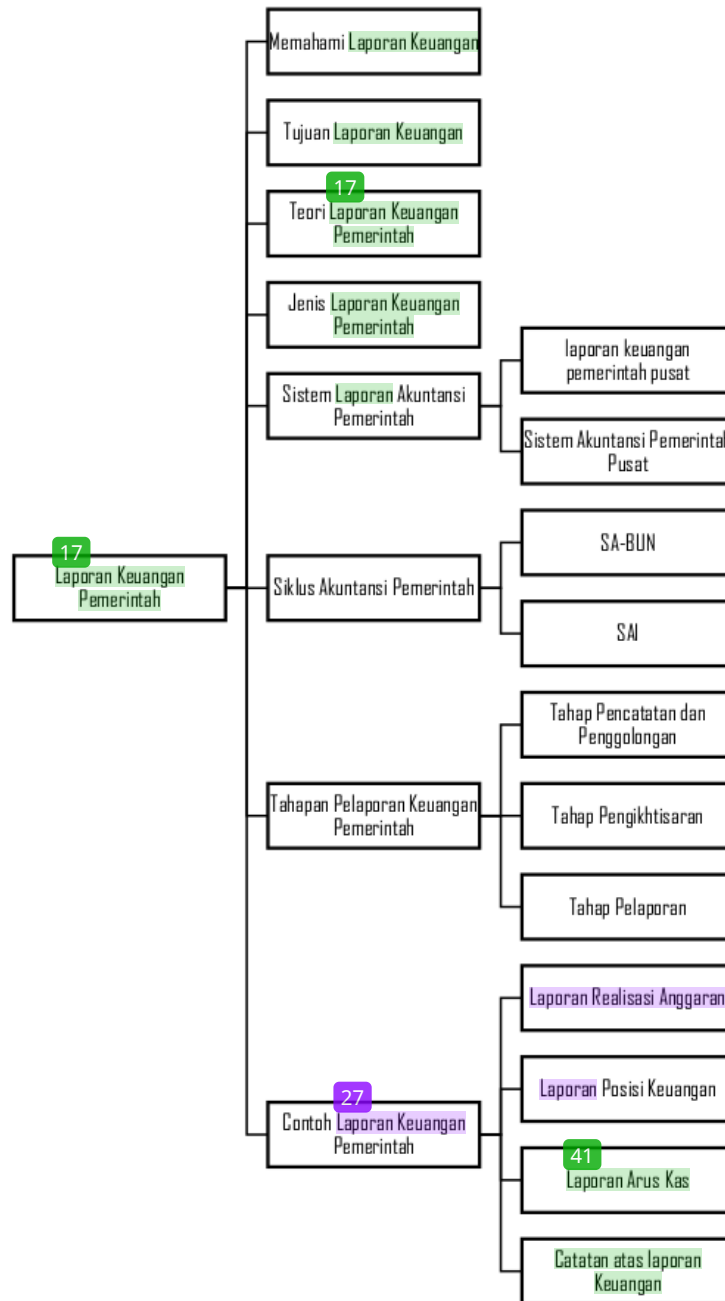
#### **Tujuan Pembelajaran Bab**

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu :

1. Memahami laporan keuangan.
2. Memahami tujuan laporan keuangan.
3. Memahami teori laporan keuangan pemerintah.
4. Memahami jenis laporan keuangan pemerintah.
5. Memahami sistem laporan akuntansi bagian laporan keuangan pemerintah pusat.
6. Memahami sistem laporan akuntansi bagian sistem akuntansi pusat.
7. Memahami siklus akuntansi pada sistem akuntansi bendahara umum negara.
8. Memahami siklus akuntansi pada sistem akuntansi instansi.
9. Memahami tahap pencatatan dan penggolongan laporan keuangan.
10. Memahami tahap pengikhtisarian laporan keuangan.
11. Memahami tahap pelaporan laporan keuangan.
12. Menganalisis contoh laporan realisasi anggaran.
13. Menganalisis contoh laporan posisi keuangan.
14. Menganalisis contoh laporan arus kas.
15. Menganalisis contoh catatan atas laporan keuangan.

#### **Profil Pelajar Pancasila**

Peta Konsep



Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Apa tujuan penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan? Dan bagaimana sistem dan siklus laporan keuangan pemerintah? Laporan keuangan pemerintah adalah salah satu cara bagi pemerintah untuk melaporkan secara transparan tentang aliran dana yang mereka gunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan. Ini membantu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana yang diperoleh dan digunakan telah digunakan secara efektif dan efisien. Pada bab ini kita akan mempelajari secara mendalam mengenai laporan keuangan pemerintah agar dapat pertanyaan-pertanyaan tersebut.

#### A. 8. Memahami Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaporan. Tujuan utama dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu perusahaan pelaporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Laporan keuangan terutama digunakan sebagai pembandingan antara realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan pelaporan serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berikut ini beberapa definisi laporan keuangan menurut para ahli.

1. Ahmad Rodoni dan Herni Ali

Menurut Ahmad dan Herni, laporan keuangan merupakan laporan suatu perusahaan yang ditujukan untuk para pemegang sahamnya yang berisi tentang laporan keuangan dasar dan analisis manajemen atas operasi tahun lalu serta pendapat tentang prospek masa depan dari suatu perusahaan.

2. Bambang Riyanto

Menurut Bambang Riyanto, laporan keuangan adalah pemberian gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu periode tertentu, dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, yang biasanya berlangsung selama satu tahun.

3. Bambang Wahyudiono

Commented [NM29]: <https://ss/economy/seo-intern/pengertimenurut-para-ahli?page=all>



Menurut Bambang Wahyudiono, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab dari manajer atau pimpinan perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya oleh pihak di luar perusahaan.

4. Eugene Brigham dan Joel Houston

Menurut Eugene dan Joel, laporan keuangan merupakan beberapa lembar kertas dengan angka yang tertulis di atasnya, namun penting juga untuk mempertimbangkan aset riil yang berada di balik angka tersebut.

5. Harnanto

Menurut Harnato, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terdiri dari laporan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi, laporan yang bersifat sebagai pelengkap seperti laporan laba ditahan serta laporan perubahan posisi keuangan atau laporan sumber dan penggunaan.

6. Jumingan

Menurut Jumingan, laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan pembuatan ringkasan data keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang berpengaruh atau memiliki kepentingan dengan data keuangan perusahaan yang bersangkutan.

7. Kasmir

Menurut Kasmir, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

8. M Sadeli

Menurut M. Sadeli, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan termasuk informasi histories. Akuntansi sendiri merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan untuk membentuk pertimbangan dan membuat keputusan yang tepat bagi pengguna informasi tersebut.

9. Mahmud Hanafi dan Abdul Halim

Menurut Mahmud Hanafi dan Abdul Halim, laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bersama dengan informasi industri, kondisi keuangan, pangsa pasar suatu perusahaan, kualitas manajemen, dan lain sebagainya.

10. Mas'ud Machfoedz dan Mahmudi

Menurut Mas'ud Machfoedz dan Mahmudi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dengan pembuktian transaksi, kemudian pembuatan jurnal yang dicatat secara harian, kemudian jurnal tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar secara periodik sesuai dengan transaksinya, dan langkah terakhir dari proses proses akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan.

11. S Munawir

Menurut S.Munawir, laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengkomunikasikan data keuangan

12. Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian

Menurut Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai instrumen komunikasi bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan data keuangan atau kegiatan perusahaan.

13. Sutrisno

Menurut Sutrisno, laporan keyangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terdiri dari dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi yang disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan

14. Soemarsono S. R.

Menurut Soemarsono S.R, laporan keuangan merupakan laporan yang ditujukan bagi para pengambil keputusan, khususnya pihak dari luar perusahaan yang berkaitan posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan.

15. Sofyan Harahap

Menurut Sofyan Harahap, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu.

16. Tatang Gumanti

Menurut Tatang Gumanti, laporan keuangan merupakan ringkasan dari aktiva, kewajiban, dan hasil usaha suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu.

17. Zaki Baridwan

Menurut Zaki Baridwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode akuntansi yang bersangkutan.

## B. Tujuan Laporan Keuangan

Berikut ini beberapa tujuan laporan keuangan dari beberapa sumber.

### 1. *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 4

Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 4, tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan dalam melakukan penilaian mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan harus memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, sehingga para pengguna dapat memberikan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Selain itu, laporan keuangan juga diperlukan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, sehingga para pengguna dapat memberikan penilaian mengenai bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya ekonominya dan bagaimana menghasilkan laba atau rugi.

SFAC No. 4 menekankan bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan tersebut untuk membuat suatu keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan tersebut.

### 2. Prinsip Akuntansi Indonesia

Berikut ini pernyataan dari Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) mengenai tujuan laporan keuangan.

- a. Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aset, kewajiban serta modal perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi dengan kewajiban) dari suatu perusahaan yang terjadi karena adanya kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba perusahaan.
- c. Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan dalam menilai potensi perusahaan dalam memperoleh laba.

Commented [NM30]: <http://522/1/BAB%205%20ok.pdf>

- d. Memberikan informasi penting lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban suatu perusahaan, misalnya informasi tentang kegiatan pembiayaan dan investasi.
- e. Untuk menerangkan sejauh mana informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang diyakini oleh perusahaan.

### 3. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Berikut ini penjelasan mengenai tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK.

#### a. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK

Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah sebagai berikut.

- 1) Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil serta perubahan posisi keuangan yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan keuangan.
- 2) Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dari berbagai pengguna. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan oleh para pengguna dalam mengambil keputusan keuangan karena umumnya laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
- 3) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau suatu bentuk pertanggungjawaban dari manajemen terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Pengguna uang ingin mengevaluasi apa yang telah dilakukan atau bentuk pertanggungjawaban dari manajemen setelah berbuat demikian agar para pengguna dapat mengambil keputusan keuangan, keputusan tersebut dapat berupa keputusan dalam menahan atau menjual investasi para pengguna dalam perusahaan atau keputusan dalam mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Tujuan laporan keuangan tersebut diambil dari *International Association of Classification Societies (IASC)*.

#### b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut PSAK

1

Berikut ini karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK (2004). Karakteristik kualitatif adalah ciri khas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para penggunanya. Terdapat empat karakteristik kualitatif utama, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Berikut ini penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif tersebut.

1) Dapat dipahami

Bagian penting dari kualitatif informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yaitu kemudahan bagi para pengguna dalam memahami dan memakai laporan keuangan tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan memadai mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis, akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, informasi kompleks yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikesampingkan hanya karena informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh beberapa pengguna.

2) Relevan

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat, maka informasi dalam laporan keuangan tersebut harus relevan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses membuat keputusan keuangan. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai kualitas yang relevan apabila dapat memengaruhi keputusan keuangan para pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi para pengguna di masa lalu.

Peran informasi dalam prediktif (meramalkan) dan konfirmasi saling berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi tentang struktur dan besarnya aset yang dimiliki akan berguna bagi para pengguna pada saat mereka berusaha memprediksi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan merespon situasi yang dapat merugikan. Informasi yang sama juga memberikan peran dalam memberikan konfirmasi atau pengasan terhadap prediksi di masa lalu. Misalnya mengenai bagaimana struktur keuangan perusahaan

diharapkan dapat tersusun atau mengenai hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering digunakan sebagai dasar dalam memprediksikan posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang dan hal lain yang menarik perhatian para pengguna, contohnya pembayaran dividen dan gaji, perkembangan harga saham dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk mempunyai nilai prediktif, informasi tidak perlu dalam bentuk prediksi eksplisit. Akan tetapi, kemampuan laporan keuangan dalam membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi mengenai transaksi dan kejadian di masa lalu. Sebagai contoh, nilai prediktif dari laporan laba rugi dapat ditingkatkan apabila pos-pos pendapatan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi dilaporkan secara terpisah.

### 3) Keandalan

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat, maka informasi dari laporan keuangan tersebut harus dapat diandalkan. Informasi dapat memiliki kualitas yang andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya oleh para pengguna untuk menyajikan representasi yang benar dan adil dari apa yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

Informasi tersebut mungkin dapat relevan, namun apabila hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna dari informasi tersebut dapat disesatkan. Sebagai contoh, apabila legalitas dan jumlah tuntutan terus diperdebatkan dalam proses pengadilan, maka mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui sepenuhnya tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah dan keadaan dari tuntutan tersebut.

### 4) Dapat Dibandingkan

Para pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode dalam mengidentifikasi tren (kecenderungan) pada posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga

harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Dengan demikian, dalam mengukur dan menyajikan dampak keuangan dari transaksi dan kejadian serupa lainnya harus dilakukan secara konsisten pada perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan lainnya.

Makna penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan yaitu bahwa para pengguna harus memperoleh informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta dampak dari perubahan tersebut. Para pengguna harus dapat mengenali perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan pada transaksi yang sama dan kejadian lain dalam perusahaan dari satu periode ke periode lain di perusahaan yang berbeda. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dapat berkontribusi terhadap daya banding.

Kebutuhan akan daya banding tidak boleh disamakan dengan konsistensi belaka dan tidak boleh menjadi hambatan untuk penerapan standar akuntansi yang lebih baik. Perusahaan tidak lagi harus mengembangkan prinsip-prinsip yang tidak lagi sesuai dengan karakteristik kualitatif keandalan dan relevansi. Perusahaan juga tidak perlu mengikuti prinsip penyusunan laporan keuangan ketika ada alternatif lain yang lebih andal dan relevan. Karena pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan harus menyajikan informasi dari periode sebelumnya dalam laporan keuangannya.

### C. Teori Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam organisasi pada sektor pemerintahan, terdapat dua jenis pelaporan yang dikenal dengan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja mencerminkan komitmen untuk menyajikan dan melaporkan kinerja dari seluruh kegiatan dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan tersebut adalah salah satu bentuk dari proses akuntabilitas. Entitas yang wajib untuk

membuat laporan kinerja organisasi sektor publik, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintah, unit pelaksana teknis, LSM, partai politik, SM, yayasan serta organisasi sosial lainnya. Laporan tersebut diserahkan kepada masyarakat secara umum atau DPR, sehingga masyarakat, anggota DPR (pengguna), konstituen atau masyarakat pendukungnya dapat mengetahui secara lengkap dan akurat mengenai kegiatan progra, organisasi dan entitasnya. Disisi lain, laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan transaksi organisasi sektor publik selama periode waktu tertentu.

Laporan keuangan sektor publik adalah penyajian posisi keuangan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan umum dari pelaporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya yang digunakan oleh suatu entitas dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan. Tujuan khusus pelaporan keuangan di sektor publik yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan dalam mengambil keputusan dan menunjukkan tanggungjawab entitas terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dengan cara sebagai berikut.

1. Memberikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan dana.
2. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas membiayai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Memberikan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan dan memenuhi komitmen dan kewajibannya.
4. Memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan yang terjadi pada suatu entitas.
5. Memberikan informasi umum yang berguna untuk mengevaluasi kinerja yang berkaitan dengan biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan entitas.

#### **D. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah**

Berikut ini jenis laporan keuangan pemerintah.

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan (neraca) merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah sebagai berikut.

- a. Real estat, peralatan, dan pabrik



- b. Aset tidak berwujud
  - c. Aset keuangan
  - d. Investasi yang diproses dengan menggunakan metode ekuitas
  - e. Persediaan
  - f. Pemulihan transaksi nonpertukaran, termasuk pajak dan transfer
  - g. Piutang dari transaksi pertukaran
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
- Laporan kinerja keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran pada periode waktu tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus berisi pos-pos sebagai berikut.
- a. Pendapatan dari aktiva operasi
  - b. Surplus atau defisit dari aktiva operasi
  - c. Biaya keuangan
  - d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
  - e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
  - f. Pos-pos luar biasa
3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
- Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto menunjukkan kenaikan atau penurunan aktiva berdasarkan prinsip penilaian tertentu yang diterapkan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pendapatan dan beban lainnya diakui langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto untuk setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto tersebut meliputi:
- a. Pembayaran oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
  - b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode tersebut.
  - c. Penyajian terpisah dari komponen asset/ekuitas bersih dan rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing komponen asset/ekuitas bersih pada awal dan akhir periode yang menjelaskan setiap perubahannya.
4. Laporan Arus Kas
- Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan sumber-sumber dan penggunaan dana yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang keuangan perusahaan, termasuk modal

yang diinvestasikan, pinjaman yang diterima, dan pembayaran dividen. Laporan arus kas juga menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Biasanya, laporan arus kas dibagi menjadi dua bagian: arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow). Arus kas masuk menunjukkan sumber dana yang masuk ke perusahaan, sedangkan arus kas keluar menunjukkan penggunaan dana yang dilakukan oleh perusahaan.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan arus kas, di antaranya adalah metode arus kas dari aktivitas operasi, metode arus kas dari aktivitas investasi, dan metode arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, seperti pemilik, kreditur, dan pemegang saham, karena memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kasnya.

#### 5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah cara yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terdiri dari prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan, serta standar-standar yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam praktik akuntansi.

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan biasanya terdiri dari informasi tentang basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, serta rincian tentang asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan berguna bagi para pemakai laporan keuangan, seperti pemilik, kreditur, dan pemegang saham, karena memberikan informasi tentang bagaimana laporan keuangan disusun dan apa yang harus diperhatikan saat memahami laporan keuangan tersebut. Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Juncto Permendagri No. 59 Tahun 2007, catatan atas laporan keuangan entitas publik harus mencakup beberapa sebagai berikut

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/ PERDA APBD

Kebijakan fiskal sebagaimana tercermin dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi konsumsi dan menentukan sumber atau penggunaan dana. Kondisi ekonomi makro yang wajib disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah asumsi tentang indikator ekonomi makro dan tingkat aktivitas yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

36

Dalam ikhtisar pembahasan mengenai kinerja keuangan pada catatan atas laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan strategi dan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan.
- 3) Menjabarkan tata cara yang telah disusun dan dilaksanakan oleh manajemen agar dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan tersebut relevan dan andal.

c. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Entitas pelaporan
- 2) Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi
- 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

27

d. Penjelasan tentang perkiraan laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas:

1) Laporan realisasi anggaran

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Pembiayaan

2) Neraca Pengungkapan akun-akun neraca:

- a) Aset lancar

- b) Investasi jangka Panjang
  - c) Aset tetap
  - d) Aset lainnya
  - e) Kewajiban jangka pendek
  - f) Kewajiban jangka Panjang
  - g) Ekuitas dana lancar
  - h) Ekuitas dana investasi
- 3) Laporan Arus Kas
- a) Arus kas dari aktivitas operasi
  - b) Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
  - c) Arus kas dari aset pembiayaan
  - d) Arus kas dari aktivitas nonanggaran
- 4) Pengungkapan lainnya
- Pengungkapan lainnya berisi tentang beberapa hal yang dapat memengaruhi laporan keuangan, seperti:
- a) Penggantian manajemen pemerintahan selama satu periode.
  - b) Kesalahan yang dilakukan oleh manajemen di masa lalu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, antara lain komitmen, kontijensi, penggabungan atau perluasan entitas tahun berjalan, peristiwa yang berdampak sosial, dan peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap akun yang ditampilkan pada neraca.

#### **E. Sistem Laporan Akuntansi pemerintah**

Sistem Laporan Akuntansi Pemerintah (SLAP) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SLAP mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (BSAP) dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP).

SLAP mencakup seluruh kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan pemerintah pusat, kegiatan pemerintah daerah, dan kegiatan pemerintah daerah otonom. SLAP menyajikan laporan-laporan keuangan yang diperlukan untuk menilai kinerja pemerintah dan mengelola keuangan negara, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

SLAP juga mencakup proses pengelolaan dan pengendalian anggaran, yaitu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan

anggaran. SLAP memungkinkan pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1. Bagian laporan keuangan pemerintah pusat**

Laporan keuangan pemerintah pusat biasanya terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan jumlah yang sebenarnya telah dikeluarkan atau dianggarkan selama periode tertentu. Laporan ini biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan telah digunakan dan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran.

b. Neraca

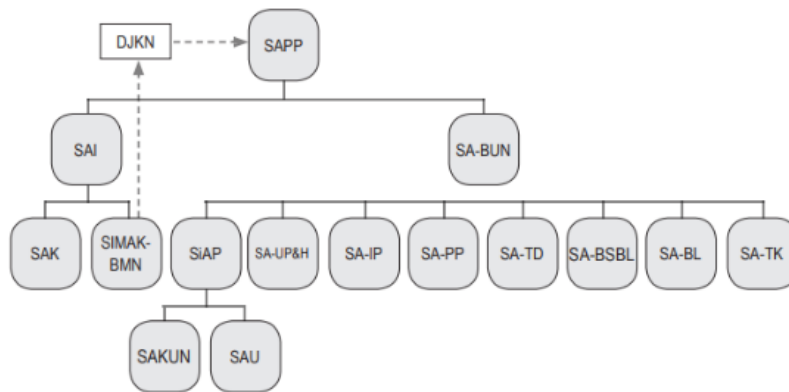
Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat pada suatu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat pada saat itu dan memberikan informasi tentang sumber-sumber dana yang tersedia bagi pemerintah.

c. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran masuk dan keluar uang yang terjadi dalam pemerintah pusat selama periode tertentu. Laporan ini sangat penting karena memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam mengelola arus kasnya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi pemerintah.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan, detail, atau analisis dari nilai suatu pos yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas.



Gambar 3.1 Kerangka SAPP

Sumber: Hasanah & Fauzi, 2017

## 2. Bagian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari:

### a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dijalankan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem sebagai berikut.

1) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

- Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);
- Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
- Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
- Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);
- Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SABAPP);
- Sistem Akuntansi transaksi khusus;
- Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

2) Pengolahan data

Dalam penyusunan laporan keuangan Bendaharan Umum Negara, pengolahan data dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang terdiri dari:

- a) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D KPPN);
- b) Kantor Wilayah DJPBN selaku Unit Akuntansi Kuasa Koordinator Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUN-KANWIL);
- c) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P);
- d) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dan Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN);
- e) Direktorat Pengelolaan Penerusan Pnjamin selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
- f) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
- h) Direktorat Jenderal Anggaran selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
- i) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
- j) Badan Lainnya selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN).

b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dijalankan oleh Kementerian Negara/Lembagadimana Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Dalam menjalankan sistem akuntansi instansi, Kementerian Negara/Lembaga menciptakan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Berikut ini penjelasan dari kedua unit akuntansi tersebut.

1) Unit akuntansi keuangan

Unit akuntansi keuangan terdiri dari:

- a) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
- b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1);
- c) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W);

- d) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- 2) Unit akuntansi barang  
Unit akuntansi barang terdiri dari:
- a) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
- b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-5);
- c) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
- d) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

**Tabel 3.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan laporan yang disusun serta para penggunanya**

No	Sistem Akuntansi	Jenis Laporan	Pengguna Laporan:
1.	SIAP-SAKUN	Laporan Arus Kas	1. Kepala KPPN 2. Kepala Kanwil DJPBN 3. Direktur APK 4. Direktur PKN 5. Dirjen PBN 6. Menteri Keuangan
		Neraca KUN	
		Catatan atas Laporan Keuangan	
	SIAP-SAU	Laporan Realisasi Anggaran	
		Neraca SAU	
		Catatan atas Laporan Keuangan	
2.	SA-UP	Laporan Realisasi Penerimaan Hibah	1. Dirjen PU 2. Dirjen PBN 3. Menteri Keuangan
		Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang	
		Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	
		Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	
		Neraca	
		Catatan atas Laporan Keuangan	
		Laporan Posisi Utang (managerial report)	
3.	SA-IP	Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	1. Dirjen KN 2. Dirjen PBN 3. Menteri Keuangan
		Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	
		Neraca	
		Catatan atas Laporan Keuangan	
		Laporan Investasi Pemerintah (managerial report)	
4.	SA-PP	Laporan Realisasi Penerimaan Pinjaman	1. Direktur PPP 2. Dirjen PBN 3. Menteri Keuangan
		Neraca	
		Catatan atas Laporan Keuangan	



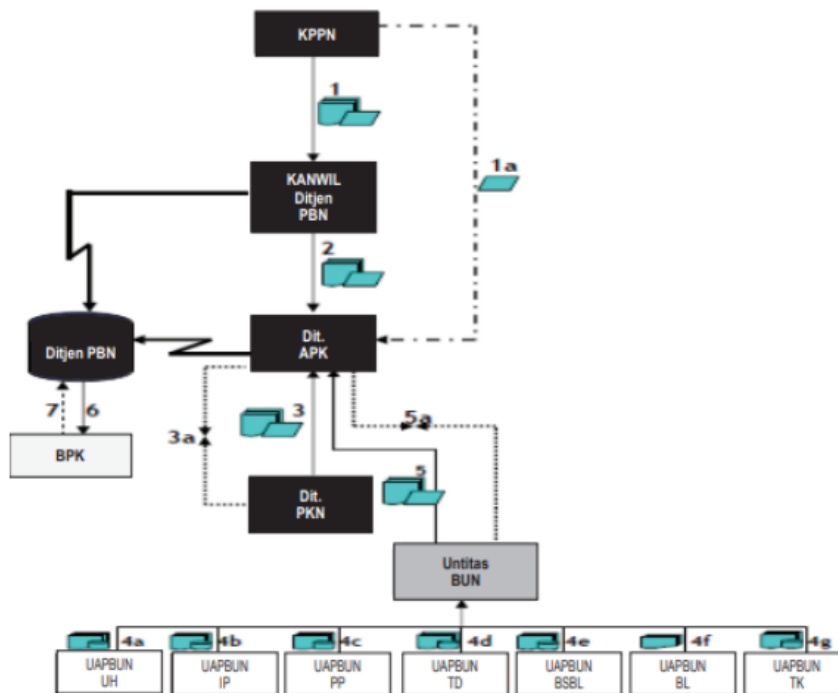
5.	SA-TD	Laporan Realisasi Transfer ke Daerah	1. Dirjen PK 2. Dirjen PBN 3. Menteri Keuangan
		Catatan atas Laporan Keuangan	
6.	SA-BAPP	Laporan Realisasi Anggaran	1. Kepala Kantor 2. Kepala Kanwil 3. Kepala Daerah 4. Pimpinan Eselon-I 5. Menteri/Pimpinan Lembaga
		Catatan atas Laporan Keuangan	
7.	SA-BL	Laporan Realisasi Anggaran	1. Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan 2. Menteri Keuangan
		Catatan atas Laporan Keuangan	
8.	SAI	Laporan Realisasi Anggaran	1. Kepala Kantor 2. Kepala Kanwil 3. Kepala Daerah 4. Pimpinan Eselon-I 5. Menteri/Pimpinan Lembaga
		Catatan atas Laporan Keuangan	

Sumber: Hasanah & Fauzi, 2017

#### F. Siklus Akuntansi Pemerintah

Siklus akuntansi pemerintah terbagi dalam dua sistem, yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara (SA-BUN) dan sistem akuntansi instansi (SAI). Berikut ini penjelasan dari kedua siklus sistem akuntansi pemerintah tersebut.

##### 1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)



Gambar 3.2 Siklus sistem akuntansi bendahara umum negara (SA-BUN)

Sumber: Hasanah & Fauzi, 2017

Siklus akuntansi pada sistem akuntansi bendahara umum negara adalah sebagai berikut:

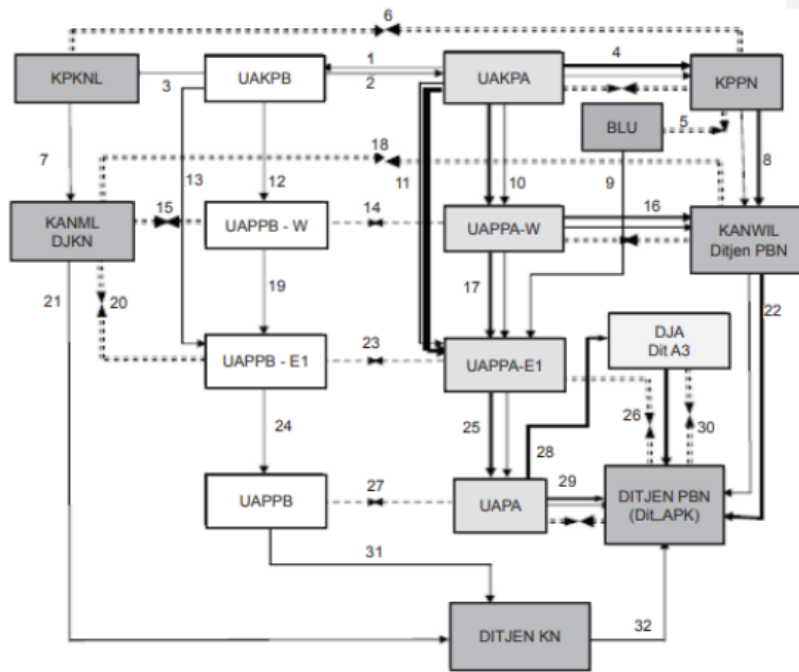
1. KPPN mengirim seluruh file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP sedangkan KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim seluruh file data setiap hari ke DAPK; a. KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke Dit. APK;
2. Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menyampaikan file data dan laporan keuangan BUN setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat; a. Dit.PKN melakukan Rekonsiliasi data dengan Dit. APK;
4. Seluruh Unit Akuntansi dibawah Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara menyampaikan:
  - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-UH menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
  - b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
  - c. Direktorat Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN-PP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
  - d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN-TD menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
  - e. Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSBL menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN

**Commented [NM31]:** Penjel  
bendahara umum negara. Jadin  
keterangan dari gambar siklus

dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

- f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN-BL menyampaikan laporan gabungan Badan Lainnya ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN; Unit Akuntansi yang mengelola Transaksi Khusus selaku UAPBUN-TK menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;
5. Entitas BUN menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK seluruh entitas di bawah BUN ke Dit. APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;
6. Presiden c.q. Menteri Keuangan c. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan;
7. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaikan Presiden.

## **2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**



Keterangan :

→ : Arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan TugasPembantuan)

↔ : Rekonsiliasi data

---> : Pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan

→ : Arus data laporan APP (BA 062 dan BA 069)

Gambar 3.3 Siklus sistem akuntansi instansi (SAI)

Sumber: Hasanah & Fauzi, 2017

Siklus akuntansi pada sistem akuntansi instansi adalah sebagai berikut:

1. UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset.
2. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca.
3. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN.
4. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

**Commented [NM32]:** Penjel  
bendahara umum negara. Jadin  
keterangan dari gambar siklus

5. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
6. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.
7. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah.
8. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP.
9. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada UAPPAE1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan.
10. UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.
11. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan apabila. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.
12. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester.
13. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPBE1 untuk digabungkan setiap semester
14. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W.
15. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester.
16. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam

rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

17. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
18. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.
19. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPBE1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester.
20. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat dengan Kanwil DJKN setiap semester.
21. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat.
22. Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga di tingkat pusat.
23. UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1.
24. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester.
25. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
26. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
27. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA.

28. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran III yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
29. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBN cq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester.
30. DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit.APK setiap semester.
31. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga ke Ditjen KN.
32. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen PBN c.q Dit.APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat

#### **G. Tahapan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa tahapan dalam pelaporan keuangan pemerintah.

##### **1. Tahap pencatatan dan penggolongan**

Tahap pencatatan dan penggolongan merupakan tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan mengelompokkannya sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Pada tahap ini, transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi pada tahap penerimaan dan pengeluaran diidentifikasi dan dicatat dalam buku-buku akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Setelah itu, transaksi-transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya.

Tahap pencatatan dan penggolongan merupakan tahap yang penting dalam siklus akuntansi karena hasil dari tahap ini akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan benar dan tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memenuhi tujuan akuntansi yang telah ditentukan.

##### **2. Tahap Pengikhtisaran**

Tahap pengikhtisaran merupakan tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk menghitung nilai aktiva dan kewajiban yang telah dicatat pada tahap

pencatatan dan penggolongan. Pada tahap ini, nilai aktiva dan kewajiban dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip konsistensi dan prinsip materialitas.

Setelah nilai aktiva dan kewajiban dihitung, maka akan diperoleh jumlah ekuitas yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Jumlah ekuitas ini kemudian akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap penyajian laporan keuangan.

Tahap pengikhtisaran merupakan tahap yang penting dalam siklus akuntansi karena hasil dari tahap ini akan digunakan dalam tahap selanjutnya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan benar dan tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan akuntansi yang telah ditentukan.

### 3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diolah dari hasil tahap pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Pada tahap ini, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip materialitas, prinsip konsistensi, dan prinsip going concern.

Laporan keuangan yang dihasilkan pada tahap ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Masing-masing laporan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dan digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan.

Tahap pelaporan merupakan tahap yang penting dalam siklus akuntansi karena laporan keuangan yang dihasilkan pada tahap ini akan digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, creditor, dan masyarakat, untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu instansi. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan benar dan tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memenuhi tujuan akuntansi yang telah ditentukan.

#### h. Contoh Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah adalah bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Anggaran Negara pada pasal 32 ayat 2 yang menerangkan bahwa standar akuntansi disusun oleh suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah



No.24 Tahun 2005 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara memberikan syarat bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sebagai berikut: laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan ditambahkan dengan catatan atas laporan keuangan (CALK). Menteri Keuangan selaku pengelola bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu tahun periode pelaporan. Pada laporan realisasi anggaran menjelaskan mengenai kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang mengungkapkan ketaatan pada APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menerangkan mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah selama periode pelaporan. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran menerangkan berapa unsur keuangan sebagai berikut.

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/deficit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DONGKO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>79.300.000,00</b>	<b>61.300.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	64.800.000,00	49.300.000,00	15.500.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	14.500.000,00	12.000.000,00	2.500.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.424.656.227,56</b>	<b>2.424.656.227,56</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.460.579.000,00	1.460.579.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.712.227,56	39.712.227,56	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	916.330.000,00	916.330.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.837.716,29</b>	<b>(3.837.716,29)</b>
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	6.837.716,29	(3.837.716,29)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.506.956.227,56</b>	<b>2.492.793.943,85</b>	<b>14.162.283,71</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>719.324.160,00</b>	<b>714.596.400,00</b>	<b>4.727.760,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.800.000,00	525.800.000,00	4.000.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.924.160,00	23.196.400,00	727.760,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>621.954.553,78</b>	<b>489.205.004,24</b>	<b>132.749.549,54</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	206.167.356,00	175.898.206,00	30.269.150,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.452.000,00	188.202.000,00	12.250.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	105.941.000,00	100.918.343,24	5.022.656,76
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	79.139.197,78	3.100.000,00	76.039.197,78
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	18.255.000,00	15.086.455,00	3.168.545,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>827.101.970,00</b>	<b>811.432.164,00</b>	<b>15.669.806,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	80.415.770,00	64.745.964,00	15.669.806,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	199.304.150,00	199.304.150,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	544.774.050,00	544.774.050,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>394.773.250,00</b>	<b>381.889.000,00</b>	<b>12.884.250,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	394.773.250,00	381.889.000,00	12.884.250,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.563.153.933,78</b>	<b>2.397.122.568,24</b>	<b>166.031.365,54</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(56.197.706,22)</b>	<b>95.671.375,61</b>	<b>(151.869.081,83)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			

Printed by Siskeudes 31/12/2021 12:36:09

Halaman 1

Gambar 3.4 Contoh Laporan realisasi anggaran Desa Dongko

Sumber: dongko, 2022

## 2. Laporan Posisi Keuangan

15

Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode waktu

Commented [NM33]: <https://dongko.trenggalekkab.go.id/fir/Realisasi-Anggaran-Desa-Tahun>

tertentu. Neraca pada tingkat pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya. Berikut ini pos-pos yang tercantum dalam neraca.

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas dana

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NERACA  
PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1**

Uraian	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di kas daerah	18.657.500.000
Kas di bendahara pengeluaran	1.500.000
Piutang retribusi	60.000.000
Piutang DAU	500.000.000
Persediaan obat-obatan	30.000.000
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
Investasi permanen	2.000.000.000
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah kantor	100.000.000
Mesin fotocopy	20.000.000
Papan tulis elektronik	7.000.000
Gedung kantor	750.000.000
Gedung rumah jabatan	650.000.000
Akumulasi penyusutan aset tetap	(75.000.000)
<b>DANA CADANGAN</b>	
Dana cadangan	500.000.000
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.201.000.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang dalam negeri-Sektor perbankan	2.000.000.000
Utang kepada pemerintah pusat	3.000.000.000
<b>EKUITAS DANA</b>	
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
SILPA	18.659.000.000
Cadangan piutang	560.000.000
Cadangan persediaan	30.000.000
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	2.000.000.000
Diinvestasikan dalam aset tetap	1.452.000.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	(5.000.000.000)
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	
Diinvestasikan dalam dana cadangan	500.000.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>23.201.000.000</b>

Gambar 3.5 Contoh Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Pergub, [tit](#)

Commented [NM34]: <https://Download/80329/Lamp3.Pe>

### 3. **Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo setara kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berkaitan dengan arus kas di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3 mengenai Laporan arus kas.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

U R A I A N	Tahun n (Rp)	Tahun n-1 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Kas Masuk :		
Retribusi daerah	50.000.000,00	
Dana Alokasi Umum	5.000.000.000,00	
Dana Alokasi Khusus	3.000.000.000,00	
Jumlah	8.050.000.000,00	-
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai	1.225.000.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	191.000.000,00	
Belanja Bunga	200.000.000,00	
Belanja Subsidi	200.000.000,00	
Belanja Hibah	100.000.000,00	
Jumlah	1.916.000.000,00	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.134.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
Arus Kas Masuk :		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	2.000.000.000,00	
Jumlah	5.000.000.000,00	-
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	
Jumlah	2.500.000.000,00	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
Jumlah	-	-
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	
Pengeluaran BG yang belum dicairkan di bank	-	
Jumlah	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenalkan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>8.634.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>10.023.500.000,00</b>	
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>18.657.500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>18.659.000.000,00</b>	<b>-</b>

asumsi saldo awal kas di BUD berdasarkan neraca tahun lalu sebesar Rp.10.023.500.000,00

Gambar 3.6 Contoh Laporan arus kas Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Pergub, tt

35

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dan setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus memiliki referensi silang dengan informasi yang berkaitan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis mengenai nilai suatu pos yang diungkapkan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan

Commented [NM35]: <https://Download/80329/Lamp3.Pe>

merupakan penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah dan informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontijensi dan kewajiban lainnya. Dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah urutan dari pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan, misalnya informasi mengenai tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar yang dapat digabungkan dengan informasi mengenai tanggal jatuh tempo dari surat berharga.

Selain kewajiban penyusunan laporan keuangan di atas, P<sup>23</sup>SAP juga memuat tata cara yang dapat dijadikan sebagai pedoman pada penyusunan dan sertifikasi laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah menjadi lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan). BPK akan menyaring laporan terlebih dahulu untuk memberikan pernyataan yang berguna untuk meningkatkan kredibilitas laporan sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan, antara lain pemerintah (Lembaga eksekutif), DPR/DPRD (Lembaga legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat umum dalam rangka transparansi dan akuntabilitas perekonomian negara.

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda
<b>BAB II</b>	<b>EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD</b>
	2.1 Ekonomi makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
<b>BAB III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMDA</b>
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemda
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Pemda
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemda
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMDA</b>
	5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
	5.1.1 Pendapatan
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Aset
	5.1.4 Kewajiban
	5.1.5 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMDA</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>

Gambar 3.7 Contoh Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Pergub, [iti](#)

Commented [NM36]: <https://Download/80329/Lamp3.Pe>

### Tugas Mandiri

#### Refleksi

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25%	50%	75%	100%
1	Memahami laporan keuangan.				
2	Memahami tujuan laporan keuangan.				
3	Memahami teori laporan keuangan pemerintah.				
4	Memahami jenis laporan keuangan pemerintah.				
5	Memahami sistem laporan akuntansi bagian laporan keuangan pemerintah pusat.				
6	Memahami sistem laporan akuntansi bagian sistem akuntansi pusat.				
7	Memahami siklus akuntansi pada sistem akuntansi bendahara umum negara.				
8	Memahami siklus akuntansi pada sistem akuntansi instansi.				
9	Memahami tahap pencatatan dan penggolongan laporan keuangan.				
10	Memahami tahap pengikhtisarian laporan keuangan.				
11	Memahami tahap pelaporan laporan keuangan.				
12	Menganalisis contoh laporan realisasi anggaran.				
13	Menganalisis contoh laporan posisi keuangan.				
14	Menganalisis contoh laporan arus kas.				
15	Menganalisis contoh catatan atas laporan keuangan.				

#### Uji Kompetensi

##### A. Soal Pilihan Ganda



**Pilihlah jawaban yang paling tepat.**

1. laporan keuangan adalah pemberian gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu periode tertentu, dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, yang biasanya berlangsung selama satu tahun merupakan definisi laporan keuangan menurut ....
  - A. Kasmir
  - B. Jumingan
  - C. Bambang Riyanto
  - D. Bambang Wahyudiono
  - E. Harnato
2. Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat tujuan yang melatar belakangi penyusunan laporan keuangan tersebut. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai tujuan laporan keuangan menurut SFAC No. 7 adalah ....
  - A. Memberikan informasi yang terpercaya tentang perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi dengan kewajiban) dari suatu perusahaan yang terjadi karena adanya kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba perusahaan.
  - B. Memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan dalam melakukan penilaian mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.
  - C. Memberikan informasi penting lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban suatu perusahaan, misalnya informasi tentang kegiatan pembiayaan dan investasi.
  - D. Memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil serta perubahan posisi keuangan yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan keuangan.
  - E. Memenuhi kebutuhan bersama dari berbagai pengguna, Namun, laporan keuangan tidak menyediakan seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan oleh para pengguna dalam mengambil keputusan keuangan karena umumnya laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Untuk menerangkan sejauh mana informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi

tentang kebijakan akuntansi yang diyakini oleh perusahaan merupakan tujuan dari laporan keuangan menurut ....

- A. Standar Akuntansi Keuangan
  - B. SFAC No. 4
  - C. Prinsip Akuntansi Indonesia
  - D. ASOBAT
  - E. APB Statement No. 4
4. Laporan keuangan pemerintah berfokus pada ....
- A. Penghasilan dan belanja pemerintah
  - B. Belanja dan pengeluaran pemerintah
  - C. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah
  - D. Belanja dan investasi pemerintah
  - E. Pengeluaran pemerintah dan belanja daerah
5. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai laporan keuangan pemerintah adalah ....
- A. Laporan yang menggambarkan kebijakan keuangan pemerintah
  - B. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah
  - C. Laporan yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah
  - D. Laporan yang menggambarkan tindakan keuangan pemerintah
  - E. Laporan yang menggambarkan kegiatan keuangan pemerintah
6. Dapat memengaruhi keputusan keuangan para pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi para pengguna di masa lalu merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif yaitu ....
- A. Keandalan
  - B. Dapat dipahami
  - C. Kejujuran
  - D. Relevan
  - E. Dapat dibandingkan
7. Laporan keuangan yang dapat menunjukkan posisi aset, ekuitas, serta kewajiban perusahaan selama periode waktu tertentu merupakan bentuk laporan keuangan pemerintah...
- A. laporan posisi keuangan
  - B. laporan kinerja keuangan

- C. laporan perubahan aktiva/ekuitas neto
  - D. laporan arus kas
  - E. laporan aset keuangan
8. Laporan keuangan pemerintah berbeda dengan laporan keuangan swasta. Berikutini pernyataan yang benar tentang perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan swasta, yaitu ....
- A. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk umum, sedangkan laporan keuangan swasta hanya digunakan oleh pemegang saham
  - B. Laporan keuangan pemerintah mencakup transaksi pemerintah, sedangkan laporan keuangan swasta tidak
  - C. Laporan keuangan pemerintah dibuat untuk tujuan audit, sedangkan laporan keuangan swasta dibuat untuk tujuan perencanaan
  - D. Laporan keuangan pemerintah berfokus pada pengelolaan dana, sedangkan laporan keuangan swasta berfokus pada pemasaran
  - E. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk perusahaan, sedangkan laporan keuangan swasta ditujukan untuk masyarakat umum
9. Perhatikan pernyataan berikut ini.
- a. real estat, peralatan, dan pabrik
  - b. biaya keuangan
  - c. aset keuangan
  - d. pendapatan dari aktiva operasi
  - e. pemulihan transaksi nonpertukaran, termasuk pajak dan transfer
  - f. piutang dari transaksi pertukaran
- Dari pernyataan di atas manakah yang termasuk dalam pos-pos dalam laporan posisi keuangan..
- A. a, b, c, e
  - B. b, c, d, f
  - C. a, c, d, e
  - D. c, d, e, f
  - E. a, c, e, f
10. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai laporan arus kas adalah...
- A. laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan jumlah yang sebenarnya telah dikeluarkan atau dianggarkan selama periode tertentu.

- B. laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat pada suatu tanggal tertentu.
  - C. laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran masuk dan keluar uang yang terjadi dalam pemerintah pusat selama periode tertentu.
  - D. laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran laba dan rugi keuangan yang terjadi dalam pemerintah pusat selama periode tertentu
  - E. **8** Catatan aliran laporan keuangan yang menjelaskan secara detail mengenai nilai suatu pos yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
11. Tahapan **laporan** keuangan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menghitung nilai aktiva dan kewajiban yang telah dicatat pada tahap pencatatan dan penggolongan adalah...
- A. Tahap pencatatan
  - B. Tahap pelaporan
  - C. Tahap penggolongan
  - D. Tahap perhitungan
  - 28** Tahap pengikhtisaran
12. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan setiap instansi pemerintah harus menyusun laporan keuangan...
- A. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
  - B. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari **15** laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan laba rugi, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). **17**
  - C. Neraca, Laporan Arus Kas, laporan pendapatan dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
  - D. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), **20** Neraca, Laporan Arus Kas, dan laporan pengikhtisaran.
  - E. Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perhitungan, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
13. Perhatikan infografis realisasi APBD di bawah ini.



Pernyataan yang sesuai dengan infografis realisasi APBD di atas, yaitu ....

- Jumlah pendapatan Desa Klesem lebih kecil daripada jumlah belanja desa
  - Dana desa banyak dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Persentase belanja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 37,5%
  - Desa Klesem mengalami defisit sebesar Rp 14.733.109,86
  - Jumlah belanja Desa Klesem lebih besar daripada jumlah pendapatan desa
14. Laporan keuangan pemerintah dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan keuangan dalam hal ....
- Membuat keputusan fiskal
  - Membuat keputusan moneter
  - Membuat keputusan hutang
  - Membuat keputusan investasi
  - Membuat keputusan pendapatan
15. Laporan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu tahun periode pelaporan dan menjelaskan mengenai kegiatan

keuangan pemerintah pusat/daerah yang mengungkapkan ketaatan pada APBN/APBD adalah ....

- A. Laporan laba rugi
- B. Laporan arus kas
- C. Catatan atas laporan keuangan
- D. Laporan posisi keuangan
- E. Laporan realisasi anggaran

**B. Soal Uraian**

*Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.*

1. Jelaskan menurut pendapatmu, mengapa pelaporan keuangan pemerintah sangat penting untuk dilakukan.
2. Jelaskan bagaimana tahapan dari pelaporan keuangan pemerintah.
3. Jelaskan menurut pendapatmu, mengapa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Jelaskan bagaimana sistem akuntansi pemerintah pusat.
5. Buatlah siklus akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi bendahara umum (SA-BUN) dan sistem akuntansi instansi (SAI).

**C. Tugas Praktik**

**Bab 4**  
**Akuntansi Pendapatan dan Belanja Pemerintah**

**Tujuan Pembelajaran**

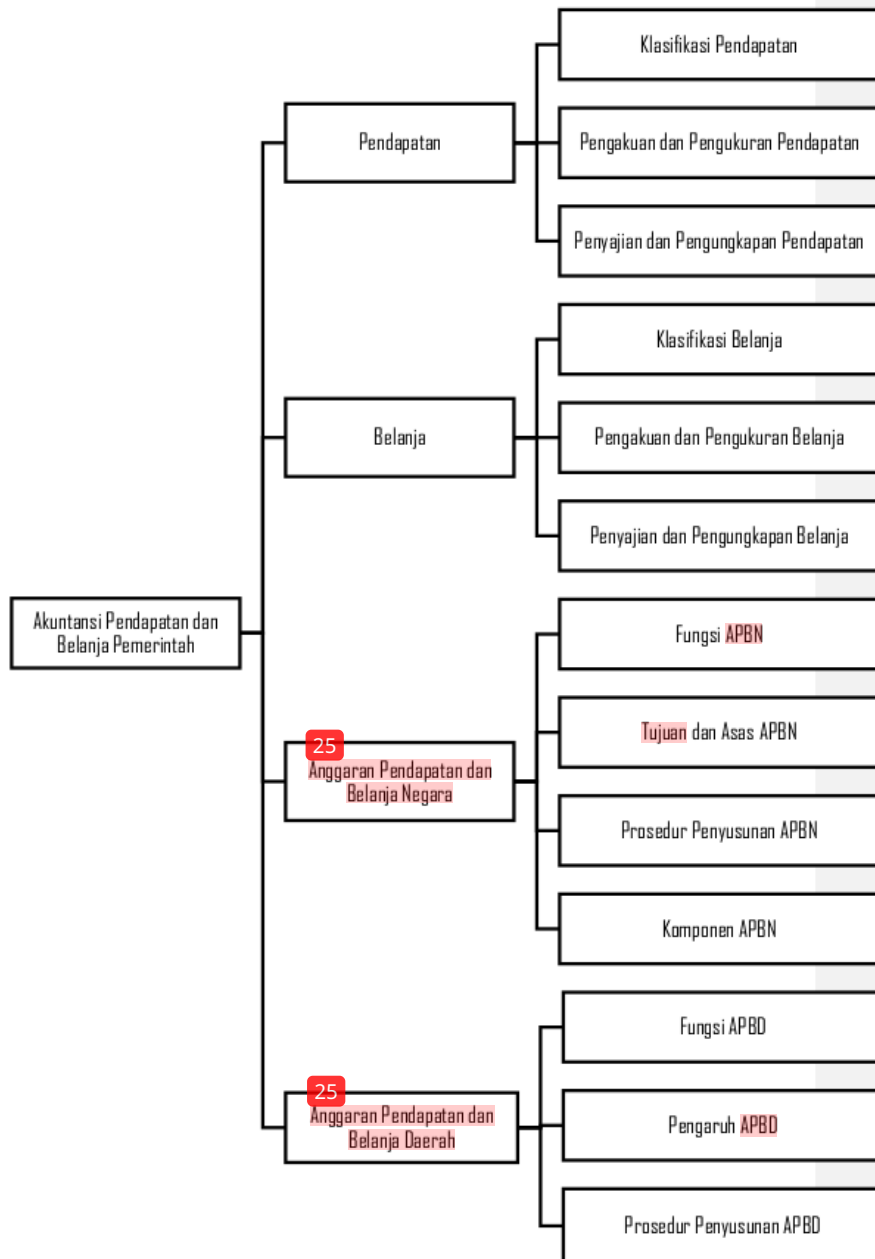
Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu

1. Memahami klasifikasi pendapatan dan belanja
2. Memahami pengakuan serta pengukuran pada pendapatan dan belanja
3. Memahami penyajian serta pengungkapan pada pendapatan dan belanja
4. Memahami tujuan pada APBN dan APBD
5. Memahami Fungsi pada APBN dan APBD
6. Memahami penyusunan pada APBN dan APBD

**Profil Pelajar Pancasila**

- 1.

## Peta Konsep





Dalam melakukan segala bentuk kegiatan dan kewajibannya, tentunya pemerintah memerlukan biaya atau dana dalam mewujudkannya. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah pusat saja yang membutuhkan, namun juga pada pemerintah daerah. Nah, menurut kalian biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kewajiban pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berasal darimana? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, perhatikan materi yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD secara saksama.

#### A. Pendapatan

Salah satu istilah yang sering kita temui dalam segala proses yang berhubungan dengan akuntansi, baik akuntansi komersil maupun akuntansi pemerintahan adalah pendapatan. Dalam hal ini, pendapatan merupakan salah satu penerimaan kas yang berguna untuk menambah kekayaan pada sebuah entitas. Tidak hanya itu, definisi dari pendapatan juga dapat diartikan sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh sebuah entitas yang timbul akibat adanya penyerahan sebuah barang maupun jasa.

Selain itu, Accounting Terminology Bulletin nomor 2 menyatakan bahwa pendapatan merupakan sebuah penjualan barang serta penyerahan sebuah jasa yang dapat diukur dengan adanya pembebanan yang dikenakan kepada klien atau pelanggan serta penyewaan untuk beberapa barang dan jasa yang mereka telah sediakan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sementara itu, pada lingkungan akuntansi pemerintahan yang terdapat di Indonesia, memaknai pendapatan sebagai bentuk penerimaan yang dilakukan oleh bendahara umum negara maupun daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang dapat menambah ekuitas dana lancar berdasarkan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan sehingga menjadi hak milik pemerintah dan tidak perlu untuk melakukan pembayaran kembali oleh pemerintah tersebut.

##### 1. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan tentunya memiliki klasifikasi tersendiri agar mudah dipahami oleh pembaca laporan dalam melakukan analisis isi laporan keuangan

yang diberikan. Tidak hanya itu, adanya klasifikasi pendapatan juga dapat melihat seberapa besar jumlah pendapatan yang terdapat pada tiap-tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, akuntansi pemerintah<sup>7</sup>nya menggunakan basis cash toward accrual. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam hal ini, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pada tempat terjadinya dan jenis pendapatan tersebut yaitu pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Berikut penjelasan terkait dengan pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah.

a. Pendapatan pemerintah pusat

Pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah pusat pada pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Pendapatan perpajakan merupakan sebuah pendapatan yang didapatkan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Sementara itu, pendapatan negara yang bukan pajak merupakan pendapatan pemerintah pusat yang sumber dananya bukan berasal dari pajak atau dapat dikatakan dengan pendapatan yang bersumber dari luar perpajakan.

b. Pendapatan pemerintah daerah

Klasifikasi pendapatan berdasarkan tempat terjadinya dan jenis pendapatan<sup>18</sup> kedua adalah pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah daerah<sup>25</sup> merupakan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pend<sup>18</sup>tan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang sumbernya dari da<sup>8</sup>erah itu sendiri. Sementara itu, pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah tidak dapat diklasifikasikan pada pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pendapatan juga dapat diakui dan dapat diukur. Berikut penjelasan dari pengakuan pendapatan dan pengukuran pendapatan.

a. Pengakuan pendapatan

Pendapatan secara umum dapat diakui apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Diperoleh (earned), yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaian kewajibannya inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.
- 2) Sudah direalisasikan/dapat direalisasikan (realized/realizable), yaitu ketika kas/ hak tagih (piutang) sudah diterima atas penyerahan barang/jasa (realized) atau ketika jumlah kas/ hak tagih (piutang) sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang/jasa tersebut (realizable).

Kedua prinsip akuntansi tersebut dapat diterapkan dalam akuntansi akrual. Dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, basis kas digunakan sebagai prinsip pengakuan pendapatan. Dengan penggunaan berbasis penggajian, pendapatan diakui saat pendapatan diterima di akun umum negara bagian/wilayah. Dengan kata lain, pendapatan diperoleh ketika pemerintah menerima dana untuk pendapatan. Namun perlu diingat bahwa kuitansi merupakan hak pemerintah yang tidak dapat dikembalikan.

Terkadang negara menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dana ini harus dikembalikan ke pihak ketiga setelah tindakan yang diperlukan selesai. Pendapatan ini belum tentu dihitung sebagai pendapatan pemerintah. Dengan menggunakan basis accrual, maka pengembalian atau perbaikan tahun buku sebelumnya adalah penurunan atau peningkatan modal dana saat ini, sedangkan pengembalian atau koreksi tahun berjalan menjadi penurunan atau peningkatan pendapatan.

b. Pengukuran pendapatan

Pendapatan didasarkan pada nilai produk atau jasa yang diperdagangkan dalam transaksi yang wajar. Nilai ini adalah nilai sekarang bersih atau nilai sekarang yang didiskontokan, atau jumlah uang yang diterima atau akan diterima sebagai imbalan atas produk atau layanan yang ditransfer perusahaan kepada pelanggannya. Menurut konsep ini, semua potongan yang dibuat dari harga tetap, baik diskon atau piutang tak tertagih, harus dikurangkan saat menghitung penghasilan. Selain itu, dalam kasus transaksi tanpa uang tunai, nilai tukar ditentukan sama dengan nilai pasar saat ini. Nilai barang yang dikirim atau diterima, mana yang lebih mudah dihitung.

Dalam rekening pemerintah Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, pendapatan dicatat dalam jumlah bruto dengan mencatat jumlah bruto dan bukan jumlah neto (setelah penggantian biaya). Oleh karena itu, semua biaya yang secara langsung mengurangi jumlah yang diterima bukanlah pengurang cadangan. Biaya ini dikeluarkan pada tahun keuangan yang sama.

Contoh:

Pada tanggal 15 Juni 2021 Pemerintah Kota Banyuwangi menetapkan bahwa hotel Harapan harus melakukan pembayaran pajak reklame untuk tahun 2021 sebesar Rp250.000.000,00. Seemntara itu, pemerintah kota Banyuwangi telah menerima pembayaran pada tanggal 16 Juli 2021. Apabila pengakuan menggunakan basis akrual, maka pengakuan pendapatan diakui pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 pada saat pemerintah menetapkan nilai yang harus dibayar. Jurnal untuk transaksi ini sebagai berikut.

Dr. Piutang pajak reklame	Rp250.000.000,00
Cr. Pendapatan pajak reklame	Rp250.000.000,00
<i>(pengakuan piutang pada tanggal 15 Juni 2021)</i>	
Dr. Kas	Rp250.000.000,00
Cr. Piutang pajak reklame	Rp250.000.000,00
<i>(penerimaan pajak reklame)</i>	

Namun, apabila menggunakan pengakuan pendapatan berbasis kas maka pengakuan pendapatan tersebut akan diakui pada tanggal 16 Juli 2021 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 pada saat penerimaan kas di rekening kas daerah. Berikut jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas.

Dr. Kas	Rp250.000.000,00
Cr. Pendapatan pajak reklame	Rp250.000.000,00

### 3. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Kelompok pertama yang akan dilaporkan dalam LRA atau Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan. Pendapatan yang dilaporkan akan disesuaikan dengan kelompok klasifikasinya. Perhatikan contoh ilustratif LRA pada pemerintah pusat.

37

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**

<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>				
<b>PEMERINTAH PUSAT</b>				
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0</b>				
(dalam jutaan rupiah)				
URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan pajak penghasilan	30.400.000	30.300.000	100%	31.250.000
Pendapatan pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah	135.000.000	128.000.000	95%	106.240.000
Pendapatan pajak bumi dan bangunan	3.500.000	3.250.000	93%	2.925.000
Pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1.400.000	1.000.000	71%	900.360
Pendapatan cukai	12.300.000	12.500.000	102%	11.250.000
Pendapatan bea masuk	10.500.000	11.300.000	108%	13.000.000
Pendapatan pajak ekspor	5.000.000	4.365.000	97%	4.365.000
Pendapatan pajak lainnya	2.000.000	1.350.270	75%	1.350.270

Jumlah pendapatan perpajakan	200.100.000	171.280.630	96%	171.280.630
URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
Pendapatan sumber daya alam	30.500.000	31.000.000	102%	30.500.000
Pendapatan bagian pemerintah atas laba	12.000.000	9.500.000	79%	8.500.000
Pendapatan negara bukan pajak lainnya	2.000.000	1.300.000	65%	1.500.000
Jumlah pendapatan negara bukan pajak	44.500.000	41.800.000	94%	40.500.000
			96%	
JUMLAH PENDAPATAN	244.600.000	234.500.700	96%	211.780.630

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

37

**Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten**

<b>PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0</b>				
(dalam rupiah)				
URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan pajak daerah	10.125.000.000	10.530.000.000	104%	9.477.000.000

Pendapatan retribusi daerah	10.800.000.000	10.800.000.000	93%	9.072.000.000
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.500.000.000	5.535.000.000	123%	4.981.500.000
Lain-lain PAD yang sah	1.575.000.000	1.642.500.000	104%	1.478.250.000
Jumlah pendapatan asli daerah	27.000.000.000	27.787.500.000	103%	25.008.750.000
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana bagi hasil pajak	10.350.000.000	10.125.000.000	98%	9.112.500.000
Dana bagi hasil sumber daya alam	65.250.000.000	65.700.225.000	101%	59.130.202.500
Dana alokasi umum	105.750.000.000	106.200.000.000	100%	95.580.000.000
Dana alokasi khusus	9.000.000.000	9.675.000.000	108%	8.707.500.000
Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	190.350.000.000	191.700.225.000	101%	172.530.202.500
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan bagi hasil pajak	25.000.000.000	26.500.000.000	106%	24.500.000.000
Pendapatan bagi hasil lainnya	12.000.000.000	12.250.000.000	102%	13.000.000.000

URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	(%)	Realisasi 20x0
Total pendapatan transfer	227.350.000.000	230.450.225.000	101%	210.030.202.500
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan lainnya	900.000.000	675.000.000	75%	700.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	900.000.000	675.000.000	75%	700.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	255.250.000.000	258.912.725.000		235.738.952.500

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

Dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

- Dibuatnya kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyatakan pendapatan.
- Terdapat klasifikasi pendapatan yang terbagi menjadi jenis pendapatan dan rincian lebih lanjut terkait dengan jenis pendapatan.
- Adanya perbandingan yang terjadi antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan yang disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan yang ada.

## B. Belanja

Pengeluaran yang digunakan untuk belanja dalam lingkungan akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai arus keluar dana selama periode waktu tertentu atau penggunaan segala bentuk aset yang timbul dari produksi barang, penyediaan jasa, atau kegiatan lainnya. Menurut Pernyataan Dewan Eksekutif Akuntansi (APB) Nomor 4, belanja didefinisikan dalam istilah moneter sebagai jumlah uang tunai atau aset lain yang dibelanjakan, pengeluaran modal, layanan yang



diberikan, atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan barang atau layanan tersebut yang telah atau akan diterima.

Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa beban timbul atau belanja yang terjadi dari penggunaan dana (dalam segala bentuk) untuk operasi entitas, sehingga belanja dapat diakui meskipun tidak terdapat arus kas didalamnya. Definisi ini berlaku untuk lingkungan akuntansi sektor swasta di mana akuntansi akrual digunakan. Sementara itu, akuntansi publik memerlukan definisi yang disesuaikan dengan lingkungan sektor publik di mana menggunakan basis cash menuju basis accrual. Pengeluaran untuk belanja pada akuntansi pemerintah di Indonesia didefinisikan sebagai setiap pengeluaran keuangan pemerintah/wilayah yang dapat mengurangi ekuitas dana berjalan selama masa pajak tersebut dan untuk itu pemerintah tidak memperoleh kembali pembayarannya.

#### 1. Klasifikasi Belanja

Dalam akuntansi bisnis, biaya (pengeluaran) sering dibagi menjadi dua kategori, **biaya langsung dan biaya tidak langsung**. **Biaya langsung** adalah biaya yang terkait dengan penjualan barang dan jasa. Beban ini sering disebut sebagai harga pokok penjualan (cost of goods sold) bagi perusahaan yang menjual barang, atau biaya jasa (cost of service) bagi perusahaan yang menyediakan jasa. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses penjualan. Upaya ini disebut sebagai upaya umum dan administratif atau *general and administrative expense*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis pengeluaran), organisasi dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan biaya berdasarkan jenis biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Penggolongan dana pemerintah meliputi pengeluaran pribadi, barang, modal, bunga, hibah, subsidi, penunjang pendapatan dan lain-lain. Pada saat yang sama, pengeluaran pemerintah kota adalah pegawai, material, modal, bunga, pemeliharaan, subsidi, per hari dan pengeluaran tak terduga.

Klasifikasi organisasi merupakan klasifikasi yang berdasarkan pada unit organisasi yang menggunakan anggaran, dimana belanja pemerintah dikhususkan untuk kementerian atau departemen pemerintah dan unit organisasi di bawahnya. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi merupakan klasifikasi yang mengacu pada tugas pokok pemerintah negara atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh alokasi terkait tugas

ialah belanja untuk pelayanan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Berdasarkan pada terminologi akuntansi bisnis, belanja dapat disebut sebagai beban yang memiliki arti berbeda dengan biaya. Biaya merupakan uang tunai atau dana lain yang dibayarkan untuk memperoleh aset, sedangkan beban merupakan biaya yang sudah terjadi (*expired*). Tidak semua pengeluaran dapat langsung ditagih apabila jangka waktu pengeluaran lebih dari satu tahun.

Selain itu, beban juga harus diakui pada saat entitas telah menerima manfaat finansial meskipun entitas belum melakukan pembayaran apapun. Pembahasan ini diterapkan dalam lingkungan akuntansi yang menggunakan basis accrual yang penerapannya dalam lingkungan akuntansi pemerintahan Indonesia saat ini berbeda dengan yang dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan penggunaan kode akuntansi di pemerintahan masih menggunakan *cash toward accrual*. Pengakuan belanja tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan sumber keuangan asli yang digunakan untuk melakukan pengeluaran.

- a. Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.
- b. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dengan kata lain ketika SPJ Pengeluaran dinyatakan nihil.

Koreksi belanja dapat disebabkan atas beberapa kemungkinan yaitu, kesalahan klasifikasi belanja, kesalahan pencatatan nilai belanja, pengembalian belanja. Apabila menggunakan basis akrual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Jenis	tahun sebelumnya	tahun yang sama
Kesalahan klasifikasi	tidak dilakukan jurnal koreksi	koreksi ke kode beban yg sesuai
Kesalahan pencatatan nilai beban	dilakukan koreksi ke ekuitas dana lancer	koreksi atas kekurangan / kelebihan jumlah kog
Pengembalian bahan	dilakukan koreksi ke Ekuitas dana lancer	dicatat sebagai pengurang beban

Gambar 4.1 Koreksi Belanja

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

Pengukuran belanja yang menggunakan basis akrual akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai nilai wajar yang akan dibayarkan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya atau akan dibayarkan.

Menurut akuntansi pemerintah Indonesia yang menggunakan basis kas menuju basis accrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pengeluaran dicatat sebesar jumlah perhitungan kas yang dapat diperhitungkan oleh Rekening Keuangan Kas Negara atau Wilayah. Nilai yang diakui mencakup jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

#### CONTOH 1

Pada tanggal 4 Agustus 2019, diterima tagihan pembelian ATK sebesar Rp25.000.000. pembelian ini dilakukan pada tanggal 7 Juli 2019, sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019 dari rekening kas daerah. Berdasarkan basis akrual, maka belanja yang diakui pada tanggal 4 Agustus 2019, ketika diterima tagihan sebesar Rp20.000.000. Kemudian, pembayaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019 merupakan pembayaran atas pengakuan utang pihak ketiga yang diakui pada tanggal 4 Agustus 2019. Untuk pencatatan jurnal transaksi dapat dilakukan sebagai berikut.

Dr. ATK	20.000.000
Cr. Utang Pemasok	20.000.000
(jurnal pada saat tagihan diterima)	
Dr. Utang Pemasok	20.000.000
Cr. Kas	20.000.000
(jurnal pada saat pembayaran)	

Apabila pencatatan yang dilakukan berbasis kas maka belanja yang diakui pada tanggal 14 Agustus 2019 pada saat terjadinya pengeluaran dana melalui rekening kas daerah sebesar Rp20.000.000. untuk penulisan jurnal transaksi dapat dilakukan sebagai berikut.

Dr. Belanja ATK	20.000.000
Cr. kas	20.000.000

#### Contoh 2

Pada tanggal 19 Februari 2019, bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan Kota Malang melakukan pembayaran atas adanya belanja pembelian makanan dan minuman yang ditujukan untuk tamu kantor. Belanja tersebut senilai Rp800.000. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana pada bendahara pengeluaran disampaikan kepada pengguna anggaran pada tanggal 3 Maret 2019. Pada tanggal 7 Maret 2019, pengguna anggaran memberikan persetujuan pertanggungjawaban atas penggunaan dana di bendahara pengeluaran. Berdasarkan basis akrual, belanja diakui pada tanggal 19 Februari ketika belanja dilakukan sebesar Rp800.000. Penulisan jurnal transaksi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

Dr. Beban makanan dan minuman	800.000
Cr. Kas	800.000

Apabila penulisan dilakukan dengan basis kas, belanja yang diakui pada tanggal 19 Februari 2019 pada saat adanya pengeluaran dana. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui ketika SPJ definitive, sehingga belanja diakui pada tanggal 7 Maret 2019 sebesar Rp800.000. Penulisan jurnal transaksi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

Dr. Beban makanan dan minuman	800.000
Cr. Kas	800.000

#### Contoh 3

Pada tanggal 5 April 2019, Departemen Kesehatan membeli mobil ambulans senilai Rp300.000.000. Mobil ini akan dipergunakan selama 10 Tahun. Berdasarkan basis akrual, tidak ada pengakuan belanja. Pengeluaran dana tersebut adalah pengeluaran investasi yang memiliki masa manfaat 10 Tahun. Belanja yang diakui adalah sebesar Rp30.000.000/tahun yang merupakan biaya

depresiasi dari ambulans tersebut. Penulisan jurnal transaksi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

Dr. Aset tetap ambulans	300.000.000
Cr. Kas	300.000.000

Berdasarkan basis kas, maka belanja diakui pada tanggal 5 April 2019 sebesar Rp300.000.000, ketika terjadi pengeluaran kas untuk pembelian ambulans. Penulisan jurnal transaksi yang dapat dilakukan sebagai berikut

Dr. Belanja moda ambulans	300.000.000
Cr. Kas	300.000.000
Dr. Aset tetap ambulans	300.000.000
Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap	300.000.000

### 3. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Pelaporan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran dilakukan setelah melakukan pelaporan pendapatan. Belanja dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pada pendapatannya yaitu belanja operasi, modal, serta tak terduga. Dalam mengungkapkan catatan atas laporan keuangan termasuk beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi untuk belanja.
- b. Adanya rincian belanja dan perbandingan yang terdapat pada beberapa anggaran tahun yang bersangkutan. Penyebab dalam adanya perbedaan antara realisasi serta anggaran harus dijelaskan secara jelas.

### C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Negara membutuhkan pendapatan untuk ini. Penerimaan pemerintah berasal dari migas, selain migas, dan pinjaman luar negeri. Pengeluaran dan penerimaan

Commented [FE37]: <https://179802/Apbn-Dan-Appd>

pemerintah sepenuhnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti di tingkat negara bagian, di tingkat daerah kita mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBN merupakan alat utama pemerintah yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. APBN juga merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Sebagai instrumen pemerintahan, APBN tidak hanya menyangkut keputusan finansial saja, namun juga mencakup keputusan politik, pendidikan, dan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014 dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pengertian umum, APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

### 1. Fungsi APBN

APBN memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Fungsi alokasi, yaitu pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan negara oleh pemerintah didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Sebagai contoh pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, pemberian premi asuransi kepada petani, dan pemberian dana pensiun kepada pegawai negeri sipil (PNS).
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu pengalokasian dan penyaluran dana APBN harus menciptakan aliran uang dan barang yang stabil. Fungsi ini berkaitan dengan kebijakan fiskal yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berupa pengendalian inflasi. Inflasi merupakan sebuah kondisi dimana harga barang-barang akan mengalami kenaikan secara terus menerus dan berlangsung dalam waktu yang lama. Kebijakan fiskal dalam Pengelolaan Anggaran (APBN) dengan instrumen pajak dan belanja akan menciptakan stabilitas perekonomian negara.

### 2. Tujuan dan Asas APBN

Tujuan dalam melakukan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkembangan bisnis dapat mempengaruhi produktivitas dengan mendorong sektor lain juga. Produktivitas yang lebih besar maknanya adalah adanya penghematan yang lebih besar. Peningkatan tabungan membuka peluang investasi. Investasi yang tumbuh diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan APBN juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

a. Kemandirian

Dalam hal ini, kemandirian berarti pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sementara itu, pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.

b. Hemat

Prinsip kedua dalam pembentukan APBD adalah hemat. Pada prinsip ini akan ada peningkatan efisiensi dan produktivitas yang harus dikedepankan serta untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran untuk kepentingan yang tidak perlu.

c. Penajaman prioritas anggaran

Prinsip ketiga dalam melakukan pembentukan APBN adalah penajaman prioritas anggaran. Pada prinsip ini, APBN perlu untuk mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat serta berpedoman terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan

### 3. Prosedur Penyusunan APBN

Dalam melakukan penyusunan APBN, pemerintah dalam hal ini presiden dan menteri, perlu untuk melakukan perencanaan serta melewati tahapan-tahapan. Agar lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut ini



Gambar 4.1 Bagan Tahapan Penyusunan APBN

Sumber: Nurfaizi, t.t

Keterangan:

Commented [FE38]: <https://179802/Apbn-Dan-Appd>

- a. Presiden mengajukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) atau nota keuangan kepada DPR.
- b. DPR akan membahas RAPBN dalam rapat bersama pemerintah (presiden dan menteri-menteri terkait).
- c. Apabila RAPBN ditolak, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun berjalan.
- d. Apabila RAPBN disetujui DPR, RAPBN akan disahkan dalam bentuk Undang-Undang APBN

#### **4. Komponen APBN**

Berikut penjelasan terkait dengan komponen APBN yang terbagi dalam beberapa hal.

##### **a. Penerimaan negara**

Pada komponen penerimaan negara, semua penghasilan dari penerimaan pajak, penerimaan bebas pajak dan penerimaan hadiah di dalam dan di luar negeri selama tahun pajak yang bersangkutan. Penerimaan pajak dapat berupa pajak dalam negeri seperti PPh, PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), sedangkan pajak internasional meliputi bea masuk dan bea masuk.

Sementara itu, penerimaan yang bukan pajak dapat berupa sumber daya alam yang meliputi penghasilan dari sektor sumber daya alam, dan laba BUMN yang termasuk bagian laba perusahaan negara yang menambah pendapatan pemerintah. Hibah adalah bantuan eksternal yang tidak memerlukan remunerasi atau pemberian balas jasa.

##### **b. Belanja negara**

Dalam hal ini, belanja negara yang dimaksud adalah seluruh belanja yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja negara digolongkan atas beberapa golongan yaitu belanja menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

- 1) Berdasarkan organisasi adalah jenis belanja yang dialokasikan kepada kementerian yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan fungsi adalah belanja yang dikelompokkan pada fungsi tertentu misalnya fungsi pekerjaan umum, fungsi pertahanan, dan fungsi lainnya.



- 3) Berdasarkan jenis belanja adalah belanja yang digolongkan pada jenis tertentu misalnya belanja pegawai, pembayaran utang, dan pembayaran bunga utang.
- c. Pembiayaan, yaitu komponen yang digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit anggaran.
  - 1) Surplus anggaran, artinya pendapatan > belanja.
  - 2) Anggaran berimbang, artinya pendapatan = belanja.
  - 3) Defisit anggaran, artinya pendapatan < belanja

#### D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Selain itu, penyusunan APBD merupakan bukti dari terlaksananya kegiatan desentralisasi keuangan daerah, yaitu kemandirian pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. APBD disusun untuk jangka waktu satu tahun. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 20 dikatakan bahwa APBD ditetapkan berdasarkan peraturan daerah paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan, perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, serta perhitungan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Tujuan penyusunan APBD adalah pedoman penerimaan dan pembelanjaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana yang telah diberikan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai UUD 1945, untuk

2  
melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, serta keadilan demi memperbaiki potensi dan keanekaragaman daerah

### 1. Fungsi APBD

Seperti pada APBN, fungsi dari APBD ada tiga yaitu fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Meskipun demikian, fungsi stabilitas dan distribusi lebih efektif dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN sedangkan pemerintah daerah umumnya lebih efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi karena daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Pembagian ketiga fungsi ini menjadi landasan dalam penentu dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah apakah atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

### 2. Pengaruh APBD

APBD akan memengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan dan perekonomian daerah. Hal ini menurut Richard Manusgrave dapat dilihat dari tiga (3) segi yaitu sebagai berikut.

#### a. Retribusi pendapatan (*retribution of income*)

Retribusi pendapatan melalui penarikan pajak dan penerimaan lain digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh penyediaan infrastruktur bagi masyarakat luas.

#### b. Pengalihan sumber-sumber (*reallocation of resources*)

Realokasi sumber daya masyarakat dengan jalan pemberian keringanan-keringanan atau prioritas kepada sektor-sektor yang digalakkan seperti pembebasan pajak sementara.

#### c. Kestabilan perekonomian

Dalam kondisi inflasi, pemerintah perlu mengambil langkah seperti pengetahuan pengeluaran, peningkatan pajak, serta pembuatan anggaran surplus.

2  
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagaimana manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 3. **Prosedur Penyusunan dan Komponen APBD**

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah akan dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sejak rancangan diterima. APBD sebelum ditetapkan gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak rancangan diterima. Apabila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari sejak rancangan diterima, gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Bila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti, Mendagri membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu atau acuan APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan.

#### a. **Pendapatan daerah**

PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah.

- 1) Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut penjelasan terkait dengan pembagian pajak daerah.

- a) Pajak provinsi, dipungut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, dipungut untuk membiayai APBD Kabupaten/Kota. Contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 2) Retribusi daerah, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, dan lain sebagainya.
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah tersebut. Misalnya dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
  - 4) Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau oleh daerah.
  - 5) Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
    - a) Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
- 6) Lain-lain pendapatan antara lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dana darurat berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya juga termasuk lain-lain pendapatan.
- b. Pembiayaan<sup>18</sup>

Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Belanja Daerah<sup>6</sup>

Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

**Tugas Mandiri/Kelompok**

**Refleksi**

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25 %	50 %	75 %	100 %
1	Memahami klasifikasi pendapatan dan belanja				
2	Memahami pengakuan serta pengukuran pada pendapatan dan belanja				
3	Memahami penyajian serta pengungkapan pada pendapatan dan belanja				
4	Memahami tujuan pada APBN dan APBD				
5	Memahami Fungsi pada APBN dan APBD				

6	Memahami penyusunan pada APBN dan APBD				
---	--	--	--	--	--

**Uji Kompetensi**

**A. Soal Pilihan Ganda**

*Pilihlah jawaban yang paling tepat.*

**B. Soal Essai Uraian**

*Jawablah dengan tepat dan benar.*

**C. Tugas Praktik**

## **Bab 5**

### **Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah**

#### **Tujuan Pembelajaran Bab**

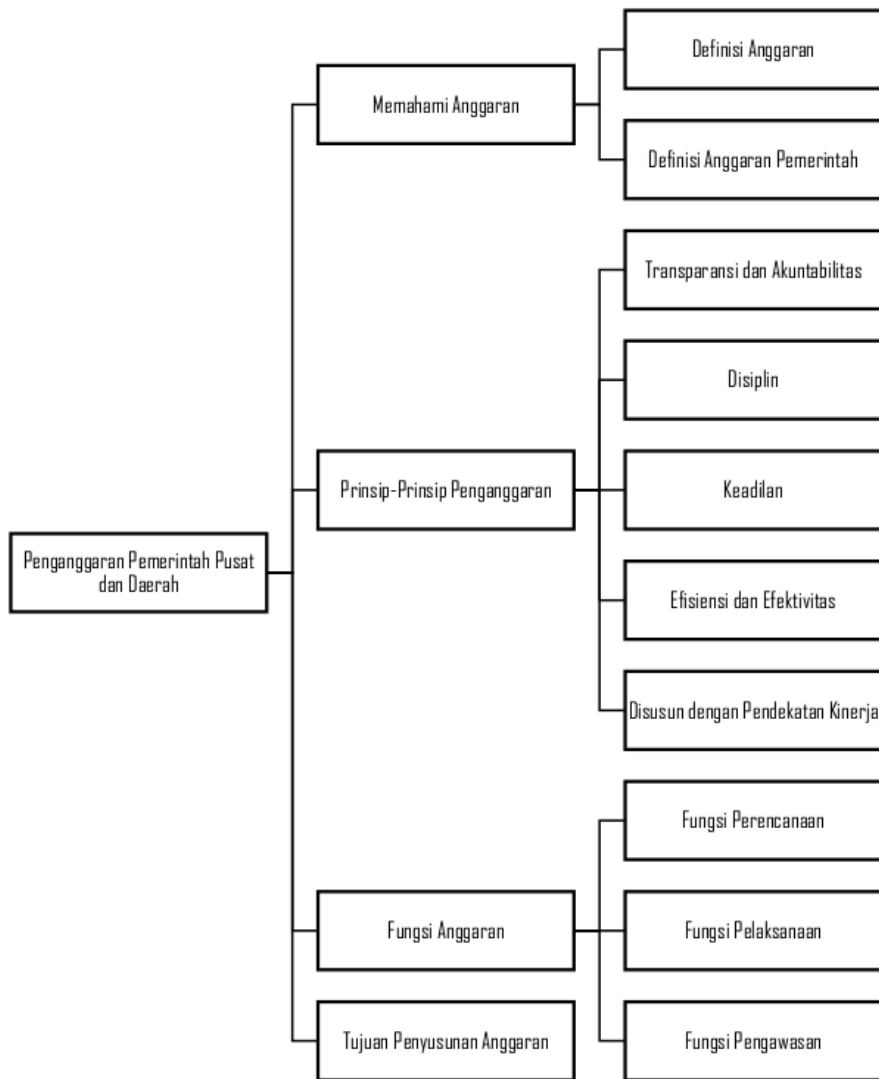
Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu :

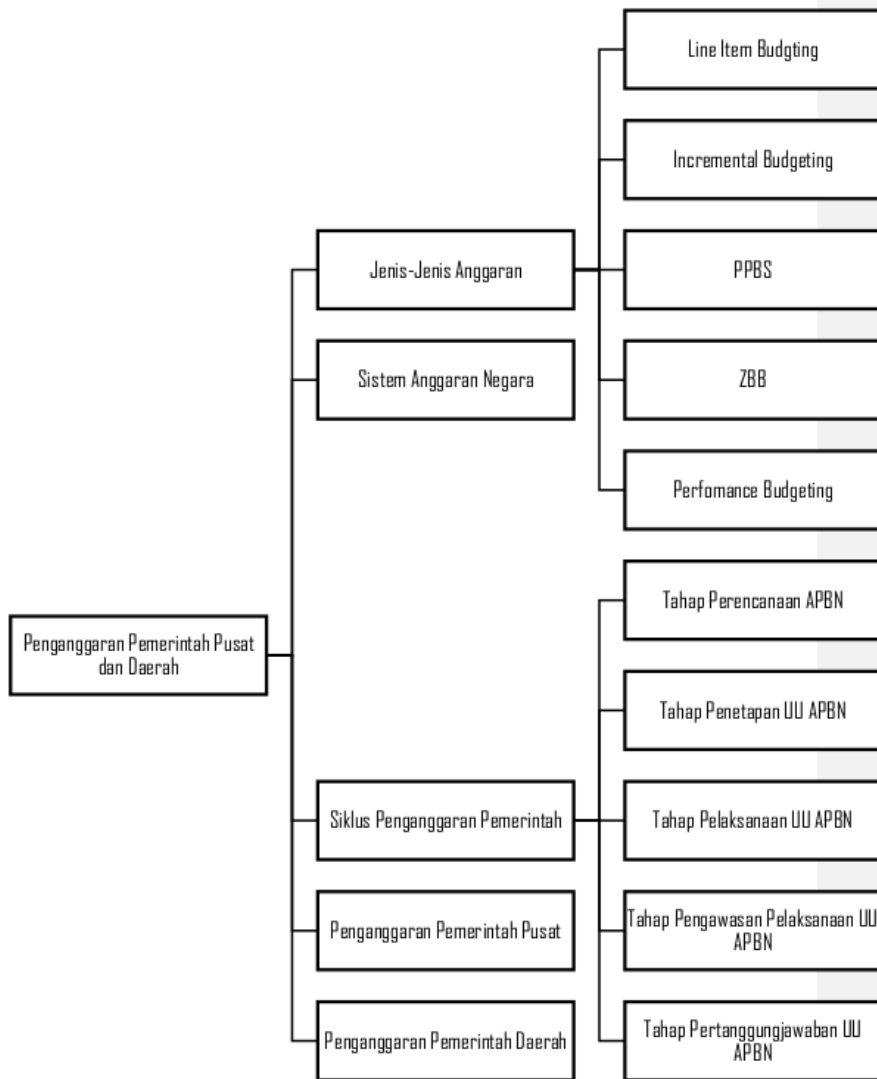
1. Memahami definisi anggaran.
2. Memahami definisi anggaran pemerintah.
3. Memahami prinsip-prinsip penganggaran.
4. Memahami fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.
5. Memahami tujuan penyusunan anggaran.
6. Memahami Jenis-jenis anggaran.
7. Memahami sistem anggaran negara.
8. Memahami siklus penganggaran pemerintah.
9. Memahami penganggaran pemerintah pusat.
10. Memahami penganggaran pemerintah daerah.

#### **Profil Pelajar Pancasila**



**Peta Konsep**





Apa yang kalian ketahui tentang anggaran pemerintah? Apa saja prinsip dan fungsi dari anggaran pemerintah? Dan bagaimana siklus penganggaran dalam pemerintahan? Penyusunan anggaran dalam kegiatan di suatu pemerintahan adalah salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan pemerintahan tersebut dalam upaya mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam pemerintahan tersebut. Dengan demikian, suatu pemerintahan harus menyusun anggaran dengan sebaik mungkin agar kegiatan dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien. Pada bab ini kita akan mempelajari secara menyeluruh mengenai penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

#### A. Memahami Anggaran

Anggaran berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "budget" yang sebenarnya kata tersebut berasal dari Bahasa Perancis "baougette" yang berarti sebuah tas kecil atau *a small bag*. Dalam Bahasa Inggris, kata tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1733 dalam sejarah Inggris pada saat Menteri Keuangan membawa tas kulit kecil berisi proposal keuangan pemerintah untuk dipresentasikan kepada parlemen. Pada saat itu, Menteri Keuangan mengatakan "open the budget".



Gambar 5.1 Ilustrasi Anggaran

Sumber : Aditya, 2021

#### 1. Definisi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara atau daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh DPR/DPRD. Anggaran tersebut diajukan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Rancangan

Commented [NM39]: <https://146633504/MAKALAH-PENG/>

Commented [NM40R39]: <https://146633504/MAKALAH-PENG/>

Commented [NM41]: <https://1/12/07/141615/fungsi-apbn-be/>  
penyusunannya

Undang-Undang (RUU) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. Pada anggaran daerah, pemerintah daerah mengajukan peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1, anggaran didefinisikan sebagai "pedoman tindakan yang akan dijalankan oleh pemerintah, antara lain rencana pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun berdasarkan kategori tertentu secara sistematis untuk satu periode" (PP No.24 Tahun 2005). Definisi tersebut sejalan dengan definisi sebelumnya yang lebih menekankan pada rincian struktur anggaran, yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Berikut ini beberapa definisi anggaran menurut para ahli

a. Harahap

Harahap berpendapat bahwa anggaran merupakan istilah yang membantu manajemen yang larut dalam kegiatan manajemen, membantu dan memfasilitasi manajer untuk mencapai tujuan. Anggaran adalah seperangkat perkiraan yang dapat digunakan sebagai program untuk menjalankan operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk masa depan.

b. Ikhsan

Ikhsan berpendapat bahwa anggaran merupakan perencanaan manajemen dalam melaksanakan kegiatan keuangan. Anggaran adalah istilah singkat dari perencanaan kegiatan yang terpadu yang mencakup pilihan-pilihan manajemen serta tujuan manajemen dalam mengatur dan menyediakan dana sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

c. Suharsimi

Suharsimi berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana yang disiapkan secara sistematis yang mencakup semua aktivitas perusahaan dalam satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu atau di masa yang akan datang.

d. Nafarin

Nafarin berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodic yang disusun berdasarkan program yang disetujui. Anggaran adalah rencana tertulis dari kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu dan biasanya dalam satuan moneter, namun juga dapat dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

e. Suharman

Suharman berpendapat bahwa anggaran merupakan instrumen yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan dalam mengungkapkan rencana tindakan koordinasi, kuantitatif serta pelaksanaan dan juga pengendalian kegiatan operasional ataupun mengevaluasi kinerja manajemen dalam organisasi bisnis atau perusahaan.

f. Munandar

Munandar berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana yang disiapkan secara sistematis yang mencakup semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan diterapkan dalam periode tertentu. Anggaran adalah instrumen perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan yang disusun secara berkala.

g. Garrison dan Noreen

Garrison dan Noreen berpendapat bahwa anggaran adalah rencana terperinci mengenai mengumpulkan dan menggunakan sumber dana dan sumber daya lainnya dalam jangka waktu tertentu.

2. **Definisi Anggaran Pemerintah**

Anggaran pemerintah merupakan proses dalam menyusun dan membuat anggaran belanja dan pendapatan pemerintah selama periode waktu tertentu yang biasanya satu tahun anggaran. Anggaran pemerintah adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola keuangan dengan menentukan alokasi dana untuk berbagai kegiatan negara, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tujuan adanya anggaran pemerintah tersebut, yaitu untuk memastikan dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dan untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Berikut ini beberapa definisi anggaran pemerintah menurut para ahli.

a. Indra Bastian

Commented [NM42]: <http://0/3/BAB%2011%20revisi.pdf>

Indra Bastian berpendapat bahwa anggaran pemerintah adalah rencana aktivitas pemerintah yang disajikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter.

b. Mahmudi

Mahmudi berpendapat bahwa anggaran pemerintah adalah blue print organisasi mengenai rencana program dan aktivitas perusahaan yang akan dilakukan dan diwujudkan di masa yang akan datang.

c. Nordiawan dan Hertianti

Nordiawan dan Hertianti berpendapat bahwa anggaran pemerintah dapat dikatakan sebagai sebuah rencana keuangan yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Rencana organisasi di sector pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan kemampuan organisasi dalam pelayanan.
- 2) Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana tersebut.
- 3) Perkiraan sumber pendapatan dan tingkat pendapatan.

d. Mardiasmo

Mardiasmo berpendapat bahwa anggaran pemerintah adalah alat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola keuangan pemerintah dan melaksanakan program yang dibiayai dari dana pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pemerintah adalah rencana keuangan yang berisi rincian semua aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang disajikan dalam wujud rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan dibiayai dengan dana pemerintah.

**B. Prinsip-Prinsip Penganggaran**

Penyusunan anggaran dalam prinsip-prinsip anggaran adalah salah satu kegiatan utama yang terdapat pada perencanaan yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan. Pada sebuah anggaran akan ditetapkan biaya-biaya yang ada pada kegiatan maupun program-program yang akan dilaksanakan nantinya dengan keuangan yang telah ditetapkan, biaya-biaya yang telah ditetapkan tersebut bertujuan agar dapat mencapai target yang diharapkan. Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu

Commented [NM43]: <http://d/files/2013/02/Sistem-Pengang>

atau periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan penganggaran merupakan suatu perjanjian atau komitmen resmi yang dilakukan manajemen terkait dengan harapan tentang biaya, pendapatan, dan beragam transaksi keuangan lainnya dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan beberapa pernyataan mengenai prinsip-prinsip anggaran.

**1. Transparansi dan akuntabilitas**

Informasi yang terdapat dalam sebuah anggaran harus Memiliki kejelasan mengenai sasaran, tujuan, hasil, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari suatu proyek maupun kegiatan yang dianggarkan. Setiap anggota mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran tersebut.

**2. Disiplin**

Pendapatan yang telah direncanakan merupakan sebuah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Batas tertinggi pengeluaran belanja dapat diketahui pada perbelanjaan yang telah dianggarkan pada setiap pos atau pasal. Penganggaran pengeluaran dapat dilaksanakan dengan telah tersedianya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak bisa melaksanakan sebuah kegiatan maupun proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan.

**3. Keadilan**

Menentukan penggunaan anggaran dengan adil tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pada hakikatnya pendapatan diperoleh melalui peran serta karyawan keseluruhan.

**4. Efisiensi dan efektivitas**

Dalam penyusunan sebuah anggaran sebaiknya dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas efisiensi, tepat waktu pelaksanaan, tepat guna, serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah ada harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan kesejahteraan dan peningkatan yang maksimal.

**5. Disusun dengan pendekatan kinerja**

Anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja memprioritaskan upaya pencapaian hasil kerja (output atau outcome) dari input yang telah ditetapkan atau perencanaan alokasi biaya. Hasil kerja yang dihasilkan harus

sebanding atau lebih besar <sup>2</sup> dari biaya atau input yang sudah ditetapkan. Selain itu juga harus dapat menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap unit kerja yang terkait.

### C. Fungsi Anggaran

Berikut ini penjelasan mengenai fungsi-fungsi anggaran sebagai salah satu alat manajemen, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Perencanaan

Suatu anggaran sebagai alat perencanaan harus dapat memperhatikan hubungan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Perencanaan dana yang tersedia harus dilaksanakan dengan seefisien mungkin, hal tersebut merupakan salah satu aspek yang penting dari perencanaan dengan menggunakan sebuah anggaran. Anggaran merupakan sebuah alat perencanaan tertulis yang dapat membuat pikiran menjadi sangat teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang.

#### 2. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan salah satu pedoman pelaksanaan pekerjaan yaitu sebelum melaksanakan pekerjaan sebaiknya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari yang berwenang terutama yang berkaitan dengan keuangan. Pekerjaan dapat disetujui untuk dilaksanakan atau dikerjakan apabila tidak adanya penyimpangan dari anggaran yang direncanakan. Anggaran Memiliki tujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan dan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, sebuah anggaran sangatlah penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi, seperti divisi produksi, divisi pemasaran, divisi umum, dan divisi keuangan.

#### 3. Fungsi Pengawasan

Anggaran juga dapat dikatakan sebagai alat pengawasan atau pengendalian (Controlling). Pengawasan Memiliki arti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara melakukan perbandingan realisasi dengan rencana (anggaran) serta dapat melakukan perbaikan jika diperlukan apabila terjadi penyimpangan yang merugikan. Tujuan dari pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah serta memperbaiki kesalahan.

### D. Tujuan Penyusunan Anggaran

Berikut ini tujuan penyusunan anggaran menurut Ellen.

Commented [NM44]: <https://com/2016/01/pengertian-angga>



1. Mengungkapkan harapan mengenai tujuan perusahaan secara jelas dan formal untuk menghindari kebingungan dan memberikan arahan mengenai apa yang ingin dicapai oleh manajemen.
2. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak terkait agar anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
3. Membuat rencana kegiatan yang terperinci untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan arahan yang jelas kepada individu dan kelompok dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
4. Mengkoordinasikan cara atau metode untuk memaksimalkan sumber daya.
5. Menyediakan alat ukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok dengan memberikan informasi yang menentukan perlunya tindakan korektif.

#### E. Jenis-Jenis Anggaran

Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis dari anggaran.

##### 1. Line Item Budgeting

Line item budgeting merupakan penyusunan anggaran menurut asal dana (pos-pos pendapatan) dan penggunaan dana (pos-pos pengeluaran). Line item budgeting dianggap paling tua dan memiliki banyak kelemahan atau sering disebut dengan penganggaran tradisional. Meskipun dapat disangkal, penggunaan line item budgeting sangat populer karena dianggap mudah diterapkan. Line item budgeting memiliki beberapa ciri penting, yaitu tujuan utamanya adalah melaksanakan pengendalian keuangan, sangat berorientasi pada input perusahaan, ditetapkan melalui pendekatan inkremental (kenaikan bertahap) dan dalam praktiknya tidak jarang menggunakan kemampuan membelanjakan atau menggunakan anggaran sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi.

##### 2. Incremental Budgeting

Pada dasarnya pada penganggaran dengan metode incremental budgeting menggunakan penganggaran line item budgeting, namun dilakukan dengan menambah atau mengurangi nilai anggaran dari tahun sebelumnya. Jones dan Pendlebury memberikan tiga alasan mengapa metode tersebut banyak digunakan. Pertama, banyak kegiatan yang dilakukan pada tahun lalu dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya. Kedua, metode tersebut mudah untuk diterapkan untuk menghindari konflik antar unit pemerintah. Ketiga, metode tersebut sangat konservatif dengan perubahan yang relatif kecil atau dalam batas tertentu

Commented [NM45]: <https://8/4/BAB%202.pdf>

Commented [NM46R45]: <http://ent/146633504/MAKALAH-PE>

berdasarkan penilaian yang cukup. Metode tersebut memiliki kelebihan yaitu mudah dan cepat karena hanya berdasarkan tambahan dari anggaran tahun sebelumnya. Namun metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu memungkinkan pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan.

### **3. Planning Programming Budgeting System (PPBS)**

Jenis PPBS dikembangkan dengan tujuan untuk memungkinkan para pembuat keputusan dapat mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model manajemen keuangan yang ada. Model tersebut menggunakan analisis biaya-manfaat atau *cost-benefit analysis*. Program yang manfaatnya lebih besar daripada biayanya akan dimasukkan dalam anggaran, sedangkan jika program lebih banyak memerlukan biaya daripada manfaat yang dihasilkan maka program tersebut akan ditolak.

Dengan demikian, dengan adanya sistem ini yang dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak legislatif akan dapat memudahkan fungsi pengawasannya dan memudahkan pihak aparat pengawasan dan pemeriksa. Selain itu, penganggaran tersebut secara operasional dilakukan sedemikian rupa sehingga program yang sama dapat dipadukan antar unit dan tidak menimbulkan tumpang tindih antar unit pemerintahan. Metode tersebut juga mengukur biaya dan manfaat dalam jangka panjang, sehingga sumber daya yang ada saat ini dapat digunakan dan anggaran selama beberapa tahun dapat disusun berdasarkan analisis tersebut.

Dalam penggunaan metode PPBS terdapat kelemahan, yaitu sangat memakan waktu (*time-consuming*) dan secara teknis sulit untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pengukuran manfaat dengan menggunakan nilai uang tidak mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, metode tersebut secara konseptual cukup memadai. Namun kenyataannya metode tersebut banyak negara yang telah meninggalkan metode tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia.

### **4. Zero Based Budgeting (ZBB)**

Sama seperti namanya, *zero based budgeting* dibuat dari nol meskipun proses penganggarannya telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Anggaran ZBB tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal tersebut merupakan kebalikan dari metode incremental budgeting yang seringkali dijumpai program yang sudah tidak efektif lagi, namun anggarannya justru mengalami

peningkatan. Padahal dalam praktiknya dimungkinkan adanya incremental pada "paket keputusan" atau *decision packages* yang digunakan dalam penyusunan metode tersebut.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan metode ZBB ini dilakukan dengan bantuan paket keputusan (*decision packages*). Paket keputusan merupakan dokumen yang menjelaskan informasi mengenai implikasi dari berbagai tindakan alternatif.

a. Proses penganggaran ZBB

Terdapat tiga kegiatan pokok dalam proses penganggaran dengan menggunakan metode ZBB, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi unit pengambil keputusan, yaitu unit organisasi yang melaksanakan program.
- 2) Pengembangan paket keputusan yang memuat rencana program dan pilihan lain yang dimasukkan secara terpisah dalam program atau sebagai tindak lanjut perbaikan dari program sebelumnya.
- 3) Menentukan urutan prioritas paket keputusan dengan susunan dari program yang memerlukan dana terendah hingga program yang memerlukan dana terbesar.

Menurut Rowan Jones dan Maurice Pandleburry dalam bukunya *Public Sector Accounting* (2000:88) mendefinisikan *Zero Based Budgeting* sebagai "*Zero Based Budgeting in its pure form is precisely what its name implies, i.e. the preparation of operating budgets from a zero base, even though the organization might be operating more or less as in previous years, the budgetary process assumes that is starting anew*". Penjelasanannya yaitu, *zero based budgeting* dalam bentuk aslinya adalah rencana aksi anggaran berdasarkan nol, meskipun kegiatan yang dilakukan kurang lebih sama dengan tahun lalu, akan tetapi proses penganggarnya tetap dimulai dari nol.

b. Langkah dasar penganggaran zero based budgeting

Dalam perencanaannya, zero based budgeting memiliki implikasi yang harus dilakukan agar anggaran yang diproses menjadi penganggaran berbasis nol. Menurut Rowan Jones dan Maurice Pandleburry proses penganggaran berbasis nol melibatkan tiga langkah dasar sebagai berikut.

- 1) Identification of decision units

Pada dasarnya struktur organisasi terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban adalah entitas pembuat keputusan yang tanggung jawabnya termasuk menyiapkan anggaran. *Zero based budgeting* adalah sistem anggaran yang mengandalkan pusat tanggung jawab sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian anggarann. Unit keputusan adalah kumpulan dari unit keputusan tingkat yang lebih kecil.

Setelah unit pengambilan keputusan diidentifikasi dengan benar, langkah selanjutnya adalah membuat dokumen yang mencakup unit pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen-dokumen ini disebut dengan paket keputusan.

2) Development of decision package

Paket keputusan adalah deksripsi menyeluruh mengenai bagian dari kegiatan organisasi atau fungsi organisasi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh kepala pertanggungjawaban dan harus merincikan perkiraan biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan manfaat yang diperoleh. Secara teoritis, paket keputusan dibuat untuk mengidentifikasi tindakan alternatif dalam melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan upaya yang berbeda dari setiap alternatif. Paket keputusan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Paket keputusan mutually-exclusive

Paket keputusan mutually-exclusive merupakan paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Jika salah satu paket kegiatan atau program dipilih, maka konsekuensinya yaitu menolak semua alternatif lain.

b) Paket keputusan incremental

Paket keputusan incremental mencerminkan tingkat usaha yang berbeda (terkait biaya) dalam melakukan kegiatan tertentu. Terdapat paket dasar yang menunjukkan tingkat kegiatan minimum dan paket lain yang memiliki tingkat kegiatan lebih tinggi yang memengaruhi peningkatan tingkat kegiatan dan juga memengaruhi biaya. Setiap paket mempunyai biaya dan manfaat yang ditabulasikan dengan jelas.

3) Review and ranking of decision packages

Apabila paket keputusan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu mengurutkan setiap paket berdasarkan kontribusi manfaatnya terhadap organisasi. Langkah ini adalah jembatan untuk proses alokasi sumber daya antar fungsi yang berbeda, beberapa diantaranya sudah ada dan beberapa di antaranya benar-benar baru. Setelah paket keputusan selesai, maka paket keputusan tersebut dievaluasi apakah dapat digunakan sebagai anggaran atau tidak.

**5. Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja)**

Performance budgeting adalah pendekatan manajemen keuangan yang fokus pada penetapan tujuan untuk kinerja suatu organisasi atau program, dan alokasi sumber daya untuk mendukung tujuan tersebut. Ini melibatkan penetapan target spesifik dan terukur untuk indikator kinerja utama (KPI) dan menggunakan target tersebut untuk memandu alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta lebih baik untuk menyampaikan prioritas dan progres mereka kepada stakeholder. Performance budgeting biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi dan prioritaskan tujuan organisasi.
- b. Kembangkan ukuran kinerja dan target untuk setiap tujuan.
- c. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target.
- d. Alokasikan sumber daya berdasarkan prioritas dan target.
- e. Pantau progres dan sesuaikan sumber daya seperlunya untuk memastikan tujuan tercapai.

Performance budgeting dapat diterapkan pada berbagai organisasi dan program, termasuk lembaga pemerintah, non-profit, dan bisnis. Biasanya digunakan bersama dengan teknik manajemen keuangan lainnya, seperti zero-based budgeting dan activity-based costing.

**F. Sistem Anggaran Negara**

Sistem anggaran negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Anggaran untuk pemerintah

Anggaran untuk pemerintah pusat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Anggaran rutin yang menyumbang sekitar 62 persen dari total belanja, meliputi biaya pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan BBM).

b. Anggaran pembangunan yang menyumbang sekitar 14 persen dari total pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Pada anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar.

2. Anggaran belanja untuk daerah

Anggaran belanja untuk daerah menyumbang sekitar 24 persen dari total pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya.

### G. Siklus Penganggaran Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa tahapan dalam penganggaran pemerintah.

#### 1. Tahap Perencanaan APBN

Pada tahap perencanaan APBN terdapat 6 (enam) langkah yang harus dilakukan, yaitu:

4

a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL)

Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga (Renja-KL) merupakan proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga untuk menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Renja-KL biasanya disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan Renja-KL biasanya melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

1) Persiapan

Melakukan analisis situasi internal dan eksternal, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

2) Penyusunan

Menyusun draft Renja-KL yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta anggaran yang dibutuhkan.

3) Verifikasi

Melakukan verifikasi terhadap Renja-KL yang telah disusun, termasuk mengevaluasi kelayakan program dan kegiatan yang direncanakan.

4) Persetujuan

Renja-KL diserahkan kepada pimpinan organisasi untuk mendapatkan persetujuan.

5) Pelaksanaan

20

Setelah Renja-KL disetujui, dilakukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja-KL merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga. Renja-KL juga merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja unit kerja (Renja-UK) yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga.

b. Pembahasan Renja-KL

Pembahasan Renja-KL adalah proses diskusi dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) yang telah disusun. Tujuan dari pembahasan Renja-KL adalah untuk memastikan bahwa Renja-KL sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembahasan Renja-KL biasanya dilakukan oleh pimpinan organisasi dan unit kerja yang terkait, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembahasan Renja-KL biasanya meliputi beberapa tahapan, di antaranya:

1) Persiapan

Mempersiapkan dokumen Renja-KL yang akan dibahas, serta menetapkan agenda dan jadwal pembahasan.

2) Penyajian

Penyajian Renja-KL kepada pimpinan organisasi dan unit kerja yang terkait, dengan menjelaskan program dan kegiatan yang direncanakan, serta anggaran yang dibutuhkan.

3) Pembahasan

Dilakukan diskusi dan evaluasi terhadap Renja-KL, termasuk membahas kelayakan program dan kegiatan yang direncanakan, serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

4) Persetujuan

Setelah pembahasan selesai, Renja-KL disetujui oleh pimpinan organisasi dan unit kerja yang terkait.

Pembahasan Renja-KL merupakan tahap penting dalam proses penyusunan Renja-KL, karena akan mempengaruhi pelaksanaan program

dan kegiatan yang direncanakan. Pembahasan Renja-KL juga dapat memberikan kesempatan bagi pimpinan organisasi dan unit kerja untuk berkontribusi dalam perencanaan strategis organisasi.

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKA-KL merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Unit Kerja (Renja-UK).

Proses penyusunan RKA-KL biasanya melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

1) Persiapan

Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk Renja-KL yang telah disetujui, serta menetapkan agenda dan jadwal penyusunan RKA-KL.

2) Penyusunan

Menyusun draft RKA-KL yang meliputi program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan.

3) Verifikasi

Melakukan verifikasi terhadap RKA-KL yang telah disusun, termasuk mengevaluasi kelayakan program dan kegiatan yang direncanakan.

4) Persetujuan

RKA-KL diserahkan kepada pimpinan organisasi untuk mendapatkan persetujuan.

5) Pelaksanaan

Setelah RKA-KL disetujui, dilakukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

RKA-KL merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai dasar bagi kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. RKA-KL juga merupakan dokumen yang



digunakan sebagai dasar bagi penyiapan anggaran yang akan diajukan kepada pemerintah.

d. Penyusunan Anggaran Belanja

Penyusunan anggaran belanja adalah proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan anggaran belanja yang akan digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan proyek yang direncanakan. Anggaran belanja merupakan bagian dari anggaran organisasi yang mencakup biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek yang direncanakan. Penyusunan anggaran belanja biasanya dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan, di antaranya:

1) Persiapan

Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disetujui, serta menetapkan agenda dan jadwal penyusunan anggaran belanja.

2) Penyusunan

Menyusun draft anggaran belanja yang meliputi program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan.

3) Verifikasi

Melakukan verifikasi terhadap anggaran belanja yang telah disusun, termasuk mengevaluasi kelayakan program dan kegiatan yang direncanakan.

4) Persetujuan

Anggaran belanja diserahkan kepada pimpinan organisasi untuk mendapatkan persetujuan.

5) Pelaksanaan

Setelah anggaran belanja disetujui, dilakukan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran belanja merupakan tahap penting dalam proses perencanaan dan penganggaran organisasi, karena akan mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek yang direncanakan. Anggaran belanja juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan keuangan organisasi.

e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara

Penyusunan perkiraan pendapatan negara adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari berbagai sumber dalam satu tahun anggaran. Perkiraan pendapatan negara merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Proses penyusunan perkiraan pendapatan negara biasanya melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

- 1) Persiapkan data dan informasi yang diperlukan, termasuk laporan keuangan tahunan yang lalu, serta menetapkan agenda dan jadwal penyusunan perkiraan pendapatan negara.
- 2) Analisis data dan informasi yang tersedia untuk menentukan sumber pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam satu tahun anggaran.
- 3) Penyusunan perkiraan pendapatan negara yang meliputi jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari berbagai sumber.
- 4) Verifikasi dan validasi terhadap perkiraan pendapatan negara yang telah disusun, termasuk mengevaluasi kerealistisan perkiraan tersebut.
- 5) Persetujuan, perkiraan pendapatan negara diserahkan kepada pimpinan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan.

Penyusunan perkiraan pendapatan negara merupakan tahap penting dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), karena akan mempengaruhi pengelolaan keuangan negara. Perkiraan pendapatan negara juga merupakan dasar bagi pemerintah dalam menetapkan anggaran belanja negara yang akan diajukan kepada parlemen.

f. Penyusunan Rancangan APBN

Setelah perkiraan pengeluaran dan pendapatan negara selesai disusun, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL yang sudah dianalisis untuk dibahas pada sidang cabinet bersamaan dengan nota keuangan dan RAPBN.

## 2. Tahap Penetapan UU APBN

Nota keuangan dan rancangan APBN serta RKA-KL yang dibahas pada Sidang Kabinet disampaikan oleh pemerintah kepada DPR paling lambat pertengahan Agustus agar dapat dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN paling lambat pada akhir bulan Oktober. Berikut ini pembicaraan antara pemerintah dengan DPR yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

a. Tingkat I

Pada tingkat I pemerintah menyampaikan keterangan atau penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN). Pada tingkat tersebut Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan sidang paripurna DPR.

b. Tingkat II

Pada tingkat II, sedang opini publik digelar dalam rapat paripurna DPR dimana masing-masing pihak di DPR menyampaikan pendapatnya tentang RUU APBN dan pernyataan pemerintah, Tanggapan pemerintah mengenai opini publik tersebut biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan.

c. Tingkat III

Pada tingkat III, pembahasan dilakukan dalam rapat komite, rapat gabungan komite atau rapat komite khusus. Pembahasan tersebut dilaksanakan bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan.

d. Tingkat IV

Pada tingkat IV rapat paripurna keada belangsung. Dalam rapat tersebut, hasil pembahasan tingkat III dan pendapat akhir masing-masing DPR disampaikan kepada forum. Kemudian DPR dapat menggunakan kewenangan anggarannya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN. Setelah itu DPR dapat mempersilahkan pemerintah untuk meyampaikan sambutan yang berhubungan dengan keputusan DPR tersebut. Jika DPR menyetujui RUU APBN, maka Presiden dapat mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi UU APBN.

**3. Tahap Pelaksanaan UU APBN**

UU APBN yang disetujui oleh DPR dan telah disahkan oleh Presiden disusun secara rinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti dalam mengubah pengeluaran yang berhubungan dengan unit organisasi, maka fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus disetujui oleh DPR. Misalnya, pemerintah harus merealokasi penggunaan anggaran antar belanja (satu belanja mungkin kelebihan/kekurangan dan belanja lain kekurangan dana), maka dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan dari DPR.

RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) mengenai rincian APBN paling lambat akhir bulan November. Keppres mengenai rincian APBN tersebut menjadi dasar bagi

Kementerian Negara/Lembaga dalam mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember. Dengan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, Kementerian/Lembaga dapat membuat pendapatan dan belanja yang terkait dengan bidang tugasnya mulai 1 Januari pada tahun anggaran berikutnya.

#### 4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN

Pengawasan pada pelaksanaan APBN dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itjen melakukan pengawasan pada masing-masing departemen/lembaga, sedangkan BPKP melakukan pengawasan pada semua departemen/lembaga dan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Menurut UUD 1945, tugas BPK antara lain pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup semua unsur keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Selain disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hasil pemeriksaan dari BPK juga akan disampaikan kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki wewenang untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan tersebut dilakukan oleh BPK untuk memberikan pernyataan mengenai tingkat kewajaran informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan terhadap aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas yang biasanya dilakukan untuk kepentingan manajemen yang dilakukan oleh unit pengawasan internal.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja, yang termasuk kategori pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN

Pada tahap ini, Presiden menyampaik<sup>22</sup>kan RUU mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan<sup>22</sup> keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Ke<sup>20</sup>rgan Negara, laporan keuangan tersebut merupakan laporan realisasi APNB, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

a. Berikut ini siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut waktunya.

- 1) Pemerintah akan menyampaikan landasan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro periode anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat pertengahan Mei tahun anggaran berjalan. Kemudian RAPBN dibahas dalam perundingan pendahuluan.
- 2) Pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan RUU APBN untuk tahun anggaran yang akan datang dengan disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Dalam pembahasan RUU APBN, DPR dapat memberikan usulan yang dapat mengubah besaran pendapatan dan belanja dalam RUU APBN. DPR dapat mengusulkan perubahan RUU APBN sepanjang tidak menambah defisit anggaran.
- 3) DPR memutuskan usulan mengenai RUU APBN paling lambat 2 (dua) bulan sebelum awal tahun anggaran. APBN yang disetujui DPR disusun berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPR tidak menyetujui usulan RUU APBN yang telah diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN dari tahun anggaran sebelumnya.

b. Berikut ini siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut waktunya.

- 1) Paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD bersama rencana kerja daerah sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD (Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian akan dibahas dalam pengarahannya pendahuluan RAPBD.

- 2) Pada minggu pertama bulan Oktober, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai APBD dan disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. DPRD kemudian membahas Raperda APBD sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan tersebut, DPRD dapat mengajukan usulan perubahan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkat pendapatan dan belanja dalam RAPBD tersebut.
- 3) DPRD memutuskan Raperda APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal tahun anggaran. Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD, maka pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar biaya tahun anggaran sebelumnya.

#### H. Penganggaran Pemerintah Pusat

Penganggaran biasanya akan dihadapkan pada ketidakpastian kedua sisi. Ketidakpastian dalam rumah tangga dan perusahaan dalam penyusunan anggaran juga dihadapi oleh perencanaan anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang nantinya akan menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) setelah adanya pengesahan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibedakan menjadi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Suatu anggaran rutin yang terdiri dari:
  - a. Anggaran penerimaan rutin (dalam negeri)
  - b. Anggaran belanja (pengeluaran) rutin
2. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) disusun anggaran pembangunan yang terdiri dari:
  - a. Anggaran penerimaan pembangunan
  - b. Anggaran belanja (pengeluaran) pembangunan
3. Berikut ini penjelasan mengenai Fungsi-fungsi APBN yaitu sebagai berikut.
  - a. Fungsi otorisasi  
Fungsi otorisasi menyatakan bahwa APBN merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  - b. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan menyatakan bahwa APBN merupakan pedoman bagi manajemen untuk merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan menyatakan bahwa APBN merupakan pedoman untuk dapat menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi menyatakan bahwa APBN harus diarahkan guna menciptakan lapangan kerja atau untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.

e. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi menyatakan bahwa APBN haruslah memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi menyatakan bahwa APBN dapat menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.

4. Penyusunan dan Penetapan APBN

Berikut ini penjelasan mengenai penyusunan dan penetapan APBN.

- a. APBN adalah bentuk pengelolaan keuangan pemerintah yang diatur setiap tahunnya dengan undang-undang.
- b. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- c. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan hibah.
- d. Pengeluaran negara digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Pengeluaran pemerintah dibagi berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- f. APBN disusun sesuai dengan keperluan pelaksanaan pemerintah negara dan kemampuan dalam penerimaan negara.

- g. Penyusunan RAPBN didasarkan pada rencana kerja pemerintah untuk mencapai tujuan negara.
- h. Rencana kerja dan anggaran dibuat berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran berbasis kinerja).
- i. Dalam hal anggaran yang diperkirakan akan defisit, maka sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diatur dalam UU APBN.
- j. Defisit anggaran yang direncanakan dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto.
- k. Dalam hal terjadinya anggaran surplus, maka pemerintah dapat menyampaikan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR.
- l. APBN yang disetujui oleh DPR dirinci menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- m. Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBN pada tahun anggaran sebelumnya.

#### I. Penganggaran Pemerintah Daerah

Sistem penganggaran keuangan pemerintah daerah adalah rencana masa depan, catatan masalah, dan mekanisme pengelolaan sumber daya. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah disingkat menjadi APBD. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh pengeluaran maupun penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang berkenaan pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Dasar hukum penganggaran harus digunakan dalam setiap penganggaran penerimaan maupun pengeluaran dalam APBD. Anggaran belanja daerah diutamakan untuk menjalankan kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Berikut ini Kebijakan Penyusunan APBD antara lain sebagai berikut.



- a. Kebijakan penganggaran pendapatan <sup>2</sup>
- 1) Pendapatan daerah terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
  - 2) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak diperbolehkan dikurangi dengan pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dengan tujuan untuk bagi hasil.
  - 3) Pendapatan daerah adalah perkiraan yang diukur secara rasional yang dapat diperoleh pada setiap sumber pendapatan.
- b. Kebijakan penganggaran belanja
- 1) Belanja daerah diutamakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan.
  - 2) Pengeluaran untuk urusan wajib berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat guna memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, kelembagaan sosial dan kemasyarakatan yang layak, pembangunan masyarakat serta pengembangan sistem keamanan social.
  - 3) Belanja daerah disusun dengan pola pikir efisiensi kerja yang berorientasi pada menghasilkan output dan hasil investasi yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perencanaan anggaran dan menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
  - 4) Penyiapan belanja daerah menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 5) Penyediaan dana yang digunakan dalam upaya penanggulangan bencana alam/bencana social dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dapat dilakukan dengan memanfaatkan saldo anggaran

yang tersedia pada sisa perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya yang masih lebih dan/atau dengan melakukan penggeseran pengeluaran yang tidak terduga atau dengan upaya penjadwalan ulang pada program dan kegiatan yang tidak mendesak.

c. Kebijakan penganggaran pembiayaan

Penyediaan pembiayaan digunakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau setiap pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Berikut ini penjelasan mengenai Struktur APBD terdiri dari antara lain sebagai berikut.

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dapat dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, kelompok, jenis, organisasi, obyek, serta rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi antara lain sebagai berikut.

- 1) Pendapatan asli daerah, seperti retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Dana perimbangan, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.
- 3) Pendapatan daerah yang sah lainnya, seperti dana hibah dari pemerintah atau pemda lainnya, badan atau Lembaga organisasi swasta dalam negeri.

b. Belanja daerah

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu kegiatan maupun program, maka belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak langsung, terdiri dari antara lain:  
Belanja bunga, belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, dan bantuan keuangan.
- 2) Belanja langsung terdiri dari antara lain:  
Belanja barang dan jasa, belanja pegawai (honorarium atau upah), serta belanja modal.
- 3) Surplus/Defisit.

Terjadinya surplus atau defisit APBD karena adanya selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. Apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja maka akan terjadi surplus anggaran.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka penggunaannya diprioritaskan untuk penyertaan modal atau investasi daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain serta untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan social.

Terjadinya surplus anggaran apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka ditetapkan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut yang dapat bersumber dari <sup>18</sup> sumber lain, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan Kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

c. Pembiayaan daerah

12

Pembiayaan daerah terdiri dari semua transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, kelompok, jenis, organisasi, obyek, dan rincian obyek pembiayaan. Pelaku Kunci Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Daerah.

- 1) Pihak Eksekutif yang terdiri dari antara lain sebagai berikut.
  - a) Kepala Daerah: Gubernur/Bupati/Walikota
  - b) Sekretaris Daerah; sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif, menyampaikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke DPRD.
  - c) Tim Panitia Anggaran Eksekutif (Bapeda, Bagian Keuangan/BPKD, Bagian Adpem); menyusun RKPD, KUA, Draft APBD.
  - d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Instansi; sebagai pengguna anggaran bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut anggarannya.

- e) Badan Perencanaan daerah (BAPEDA, sebagai penanggungjawab proses perencanaan daerah dan sekaligus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen rencana
  - f) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bagian Keuangan; sebagai penanggungjawab proses penganggaran
- 2) Pihak Legislatif (DPRD):
- a) Panitia Anggaran DPRD (Pangar DPRD); terdiri dari beberapa anggota DPRD (15 – 21 Org) dari berbagai Komisi dan Fraksi di DPRD, Ketuanya ex officio Ketua DPRD; bertugas melakukan pembahasan KUA, Draft RASK/RKA-SKPD dan draft APBD.
  - b) Komisi; alat kelengkapan DPRD yang digunakan untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra kerja dinas atau instansi berdasarkan sectoral. Dalam proses penganggaran komisi melakukan pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra kerjanya
- 3) Pihak Pengawas (Auditor)
- a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); pengawas eksternal dan independen, Memiliki tugas untuk mengaudit thd pengelolaan keuangan di Pusat maupun di Daerah, dari sisi laporan keuangan, kinerja dan lainnya.
  - b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lembaga Pemerintah non Departemen bertanggungjawab kepada Presiden, auditor internal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c) Badan Pengawas daerah (Bawasda); auditor internal di Kab/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Pihak Masyarakat
- a) Warga berbasiskan wilayah/geografi delegasi warga berdasarkan kewilayahan (Desa/Kecamatan).
  - b) Kelompok kepentingan (interest group) Asosiasi Profesi, Ormas.
  - c) Sektor Swasta seperti dunia usaha.

- d) Kelompok Peduli Anggaran, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran.

### Tugas Mandiri

#### Refleksi

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25%	50%	75%	100%
1	Memahami definisi anggaran.				
2	Memahami definisi anggaran pemerintah.				
3	Memahami prinsip-prinsip penganggaran.				
4	Memahami fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.				
5	Memahami tujuan penyusunan anggaran.				
6	Memahami Jenis-jenis anggaran.				
7	Memahami sistem anggaran negara.				
8	Memahami siklus penganggaran pemerintah.				
9	Memahami penganggaran pemerintah pusat.				
10	Memahami penganggaran pemerintah daerah.				

#### Uji Kompetensi

##### D. Soal Pilihan Ganda

*Pilihlah jawaban yang paling tepat.*

##### E. Soal Uraian

*Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.*

1. Jelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi defisit anggaran.
- 2.

##### F. Tugas Praktik

## **Bab 6**

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat**

#### **Tujuan Pembelajaran**

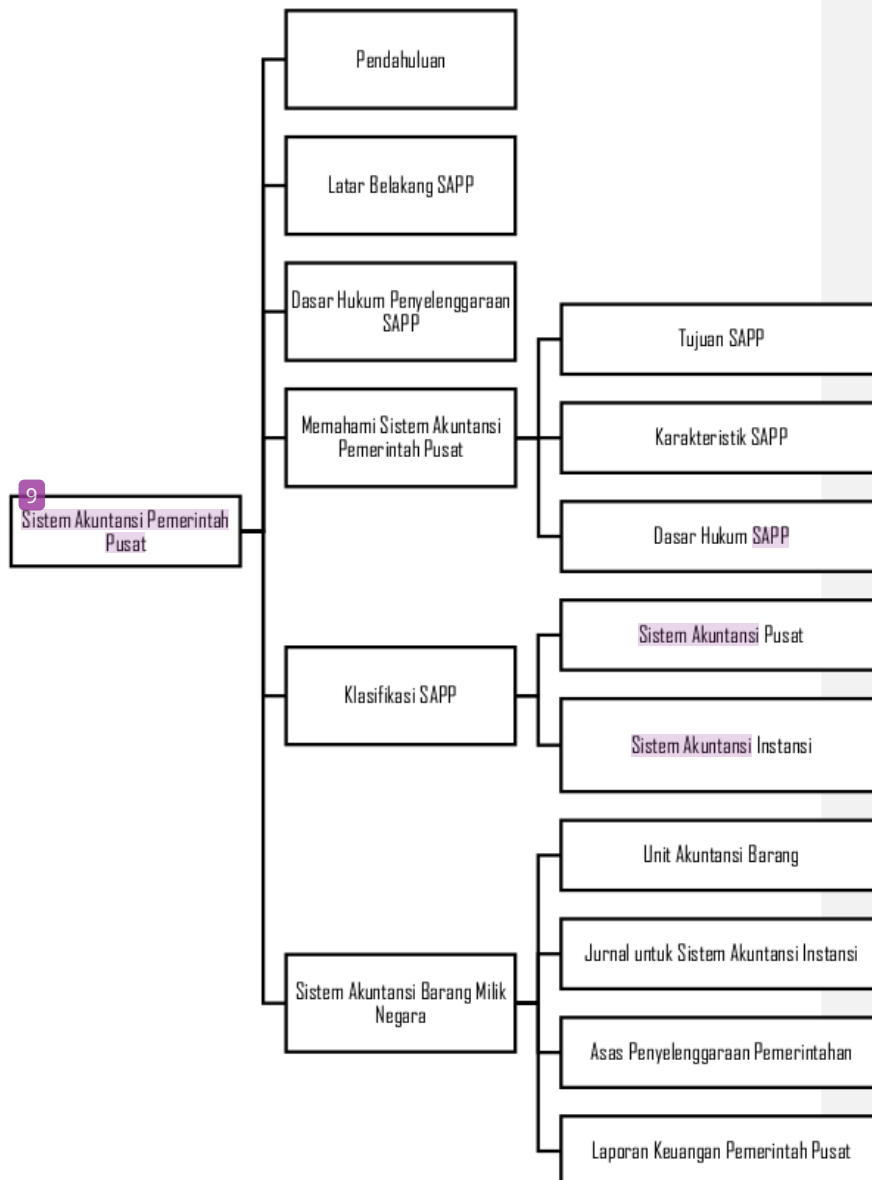
Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu

7. Memahami latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat
8. Memahami dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat
9. Memahami kualifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat
10. Memahami sistem akuntansi barang milik negara
11. Memahami laporan keuangan pemerintah pusat

#### **Profil Pelajar Pancasila**

- 2.

## Peta Konsep



Penggunaan akuntabilitas publik pada laporan keuangan pemerintah dapat berupa pemberian informasi, pengungkapan aktivitas, serta kinerja finansial pemerintah kepada beberapa pihak yang memang membutuhkan informasi keuangan. hal tersebut berguna untuk mewujudkan laporan keuangan yang semakin dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna sehingga penyusunan laporan harus dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang baik. Dalam hal ini, telah tercetus sistem akuntansi pada pemerintah pusat maupun pada daerah yang dapat digunakan. Lalu, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah khususnya pemerintah pusat? Apa saja klasifikasi dan dasar hukum dalam menyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan diatas, perhatikan materi dibawah ini dengan saksama.

#### A. Pendahuluan

36 Dalam melakukan penyusunan sistem akuntansi seharusnya memiliki beberapa karakteristik yang harus terdapat dalam laporan keuangan pemerintah. United Nations Organization telah mengemukakan pendapatnya terkait dengan penyusunan sistem akuntansi. Berikut penyusunan sistem akuntansi yang seharusnya memiliki karakteristik.

1. Sistem akuntansi memang dirancang untuk memenuhi persyaratan undang-undang dasar, undang undang dan peraturan lainnya.
2. Klasifikasi anggaran harus disesuaikan dengan sistem akuntansi.
3. Rekening dapat dikaitkan dengan jelas pada objek dan tujuan penerimaan pengeluaran, serta pejabat penanggungjawab penyimpangan yang terjadi.
4. Proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang akan diperiksa akan dibantu dengan adanya sistem akuntansi.
5. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengawasan administratif dana, program, pemeriksaan internal, penilaian kerja, dan kegiatan manajemen harus diselaraskan dengan sistem akuntansi.
6. Adanya rekening yang dapat menggambarkan segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk dalam identifikasi belanja dan pengkuran pendapatan serta hasil operasi pemerintah dan segala progaram-programnya.
7. Sistem akuntansi harus dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai penilaian kinerja dan perencanaan programnya.



8. Dengan adanya rekening dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis ekonomi serta reklasifikasi transaksi pemerintah.

Harapan dalam melakukan penyusunan sistem akuntansi agar dapat membantu dalam melakukan pengolahan terhadap bukti-bukti transaksi pelaksanaan anggaran yang berada pada lingkungan pemerintahan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah. Sementara itu, Abdul Rohman berpendapat bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah dan penerapan pengelolaan keuangan daerah dapat berpengaruh pada beberapa fungsi pengawasan intern.

#### **B. Latar Belakang SAPP**

Modernisasi akuntansi pemerintahan dimulai pada tahun 1982. Studi ini dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara (BAKUN) yang termasuk unit eselon 1 Departemen keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi (PPSAPA) dengan sokongan keuangan dari Bank Dunia. Proyek ini dilatar belakangi oleh keadaan sistem akuntansi dan pencatatan yang masih menggunakan single entry, sehingga sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut.

1. Proses penyusunan sangat lambat karena terdiri dari subsistem yang terpisah dan tidak terintegrasi.
2. Sistem single entry yang tidak lagi cukup untuk menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah.
3. Rekonsiliasi sulit untuk dilakukan.
4. Tidak berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.476/KMK.O1/1991 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama mulai dilakukan pada tahun anggaran 1993/1994, dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya pada tahun anggaran 1999/2000 yaitu pelaksanaan SAPP sudah mencakup seluruh Departemen/Lembaga di seluruh provinsi.

Meskipun target jangka waktu implementasi sistem ini adalah empat tahun yang dimulai pada anggaran 1993/1994, namun sampai dengan tahun 2001 masih belum ada departemen/non departemen yang menerapkan SAPP secara penuh. Rendahnya implementasi sistem ini di tingkat daerah antara lain disebabkan oleh kurangnya perencanaan kegiatan sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia, resistensi pengguna sistem terhadap <sup>31</sup>perubahan. Kurangnya koordinasi antar Lembaga yang terkait, hingga UU No.22 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola keuangannya. Masih belum ada Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat menyamakan persepsi dari para penyusun neraca juga menjadi pengambat dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah, sehingga penyusunan neraca pusat dan proses konsolidasi dengan pemerintah pusat masih belum dapat dilaksanakan.

Pemerintah terus melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan dalam upaya untuk mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan selaku p<sup>36</sup> pemerintah mengeluarkan Peraturan No.59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf o UU No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara memiliki wewenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan<sup>3</sup> negara sehingga perlu menerapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### C. Dasar H<sup>17</sup>um Penyelenggaraan SAPP

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 menyatakan bahwa "dalam rangka pelaksanaan p<sup>38</sup>usahaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang mer<sup>17</sup>kan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN."

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kem<sup>20</sup>erian Negara/Lembaga yang dipimpinnya."

Undang-undang Nomor 17<sup>20</sup>in 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa "Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang perta<sup>20</sup>ungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan bad<sup>3</sup> lainnya."

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa "Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ber<sup>3</sup>ang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara."

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan pertanggungjawabannya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/Lembaga masing-masing.”

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.”

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.”

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri/ Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi

anggaran dan neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

#### **D. Memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat**

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAPP) merupakan sekur<sup>33</sup>an proses yang terjadi baik secara manual maupun telah terkomputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran hingga adanya pelaporan keadaan keuangan pemerintah dan kegiatan ekonomi. Penerapan sistem akuntansi administrasi negara (SAPP) menyasar unit-unit organisasi pemerintahan negara yang keuangannya yang dikelola secara langsung oleh negara, seperti lembaga tertinggi negara atau MPR, lembaga tinggi negara atau DPR, DPA, dan MA, serta lembaga Departemen atau nondepartemen. Sementara itu, SAPP tidak berlaku untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, bank pemerintah, dan lembaga keuangan negara atau milik pemerintah.

##### **1. Tujuan SAPP**

Berikut beberapa tujuan dari Satuan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- a. Tujuan sisrem akuntansi pemerintah pusat yang pertama adalah menjaga aset atau *safe guarding asset*. Hal ini dilakukan agar aset-aset yang ada di pemerintah dapat terjaga dengan baik melaui serangkain proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar.
- b. Selain itu, sistem akuntansi pemerintah pusat juga dapat memberikan informasi yang relevan sehingga dapat menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat yang berkaitan dengan anggaran pada pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja, menentukan ketaatan terhadap penilaian kinerja, serta menentikan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.
- c. Sistem akuntansi pemerintah pusat akan memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan pada suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan yang dapat dipercaya kebenarannya.
- d. Tujuan SAPP yang terakhir adalah penyedia informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai tindakan yang harus dilakukan dalam merencanakan dan mengendalikan segala kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

##### **2. Karakteristik SAPP**

Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa karakteristik yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki sistem akuntansi pemerintah pusat.

a. Basis akuntansi

SAPP menggunakan cash basis pada laporan pelaksanaan anggaran (LRA) dan accrual basis pada neraca. Keduanya membantu pemerintah dalam mengelola pelaporan keuangan dan sistem akuntansi. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berbeda dengan basis kas, basis akrual mengakui adanya pengaruh transaksi hanya ketika transaksi atau peristiwa terjadi. Pemerintah menggunakan dasar kas untuk mencatat pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan dalam laporan penerapan anggaran sambil mengumpulkan aset, kewajiban, dan ekuitas ke neraca.

b. Sistem pembukuan berpasangan

Akuntansi dengan sistem pembukuan berpasangan atau *double entry system* didasarkan pada persamaan akuntansi dasar. Pembukuan double-entry adalah sistem yang didasarkan pada persamaan akuntansi dasar, yaitu aset dan kewajiban yang sama ditambah ekuitas dana. Setiap transaksi akan dicatat dengan mendebet dan mengkredit akun terkait.

c. Dana tunggal

Sebuah kegiatan akuntansi yang didasarkan pada UU-APBN yang digunakan sebagai landasan operasional. Dalam hal ini, dana tunggal merupakan tempat yang mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai kesatuan tunggal.

d. Sistem yang terpadu dan terkomputerisasi

Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari beberapa sistem yang terpadu dan terkomputerisasi sehingga dalam proses pembukuan dan pelaporannya tidak dapat dipisahkan serta telah terkomputerisasi dengan baik.

e. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi

Desentralisasi pelaksanaan akuntansi merupakan pelaksanaan segala kegiatan akuntansi yang dalam pelaksanaannya baik pada kegiatan akuntansi ataupun pelaporan akan dilakukan secara berjenjang pada unit-unit akuntansi yang berada di pusat maupun daerah.

f. Bagan perkiraan standar

Karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuannya yaitu dengan menggunakan bagan perkiraan standar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menjalankan SAPP dengan efektif. Dalam hal ini pemerintah akan membutuhkan akun-akun yang berkualitas untuk mengelolanya. Oleh karena itu, penggunaan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada SAPP untuk tujuan penganggaran maupun pencatatan akuntansi.

### 3. Dasar Hukum SAPP

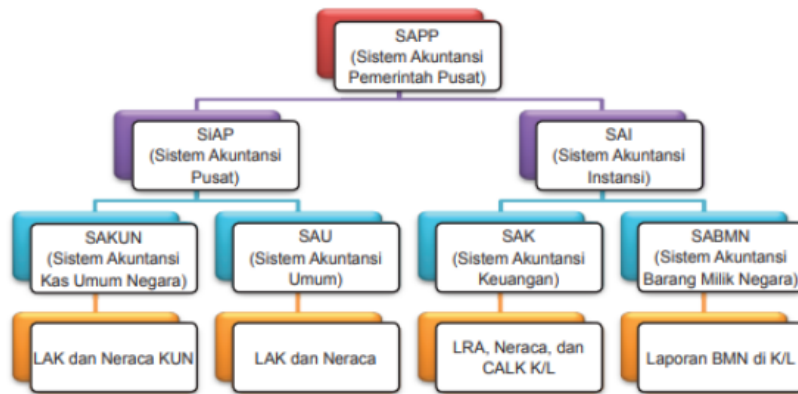
Dalam melakukan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan menggunakan basi double entry memiliki dasar hukum. Berikut beberapa dasar hukum yang digunakan untuk mendasari kegiatan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat.

- a. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
- d. Surat Menteri Keuangan RI No. S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah.

### E. Klasifikasi SAPP

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau yang disingkat dengan SAPP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat atau SiAp dan Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. SiAp merupakan salah satu bagian dari SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi atau DIA dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal ini, SiAP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Sementara itu, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan bagian kedua dalam bagian SAPP yang akan menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. SAI terbagi menjadi dua, Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Berikut penjelasan secara lengkap terkait dengan SiAP dan SAI.



Gambar 6.1 Sistem Akuntansi Instansi

Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

5

## 1. Sistem Akuntansi Pusat

Sistem Akuntansi Pusat atau SiAP merupakan sebuah rangkaian prosedur secara manual maupun yang telah terkomputerisasi. Proses tersebut dimulai pada tahap pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan yang terdapat pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). SiAP terdiri atas SAKUN yaitu subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN, serta SAU yaitu subsistem SiAP yang akan menghasilkan LRA Pemerintah Pusat dan Neraca.

Dalam pelaksanaannya, SiAP dilakukan oleh KPPN yang memproses data penerimaan dan transaksi pembayaran, KPPN Khusus yang memproses data transaksi belanja bantuan luar negeri (BLN), Departemen Perbendaharaan Negara (DPKN) yang memproses penerimaan. Data transaksi dan belanja BUN dari Kantor Pusat dan DIA yang mengolah data APBN dan memonitor data transaksi penerimaan dan belanja BUN dari Kantor Pusat.

### a. Proses pembuatan laporan

Dalam melakukan pembuatan laporan, perlu adanya proses yang dihasilkan oleh SiAP. Berikut proses pembuatan laporan yang dihasilkan oleh SiAP.

- 1) Proses pertama yaitu KPPN akan melakukan penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan LRA yang berada pada wilayah kerjanya. Laporan yang telah dibuat akan disampaikan setiap bulannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- 2) Data transaksi pengeluaran yang berasal dari BLN akan diproses oleh KPPN Khusus. Pada setiap bulannya, KPPN Khusus akan mengirimkan laporan dan informasi kejadian kepada DIA.
- 3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN dan LRA-SAU di tingkat daerah yang merupakan hasil gabungan laporan keuangan seluruh KPPN di lingkungan kerjanya. Laporan keuangan akan dikirimkan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DIA.
- 4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyusun laporan keuangan yang berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil dari penggabungan laporan keuangan yang terdapat pada seluruh unit Dirjen Perbendaharaan di tingkat pusat maupun daerah.

b. Jurnal untuk SAKUN

Terdapat beberapa jurnal yang digunakan untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara sebagai berikut.

1) Akuntansi APBN (estimasi pendapatan dan belanja)

Jurnal ini dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Jurnal ini hanya terdapat di SAKUN, tidak ada jurnal estimasi di subsistem akuntansi yang lain.

<i>Jurnal untuk mencatat estimasi penerimaan adalah :</i>		
Estimasi penerimaan perpajakan/PNBP/hibah	xxx	
- Surplus/Defisit		xxx
<i>Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja adalah :</i>		
Surplus/defisit	xxx	
- Apropriasi Belanja		Xxx
<i>Jurnal untuk mencatat eliminasi penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Estimasi penerimaan pembiayaan	Xxx	
- Pembiayaan neto		Xxx
<i>Jurnal untuk mencatat estimasi pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Pembiayaan neto	Xxx	
- Apropriasi pengeluaran pembiayaan		xxx

2) Akuntansi DIPA

Akuntansi DIPA dilaksanakan untuk membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, bagian (allotment) belanja, estimasi



penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan. Jurnal untuk DIPA tidak dilakukan dalam SAKUN. Jurnal ini hanya untuk SAI dan SAU.

3) Akuntansi realisasi anggaran

Akuntansi realisasi anggaran dilakukan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU, maupun SAI.

<i>Jurnal untuk UYHD adalah :</i>		
Pengeluaran transitio	Xxx	
--Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian/ penyetoran uang persediaan adalah:</i>		
Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)	Xxx	
--Penerimaan Transitio		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah :</i>		
Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)	Xxx	
--Pendapatan...		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah :</i>		
Pengembalian pendapatan ...	Xxx	
--Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi belanja adalah :</i>		
Belanja ....	Xxx	
--Kas di KPPN/BUN		xxx

Dalam SAKUN, tidak ada jurnal korolari untuk pengakuan aset yang dihasilkan dari belanja modal.

<i>Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah</i>		
Kas di KPPN/BUN	Xxx	
--Pengembalian belanja ...		Xxx

<i>Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah</i>		
Kas di Bank Indonesia	Xxx	
--Penerimaan Pembiayaan ...		Xxx
<i>Jurnal pengembalian penerimaan pembiayaan adalah</i>		
Pengembalian penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
---Kas di Bank Indonesia		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan adalah</i>		
Pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Kas di Bank Indonesia		Xxx

Tidak terdapat jurnal korolari dalam SAKUN yang digunakan untuk mengakui pengakuan utang jangka panjang maupun pendek yang berasal dari pengeluaran pembiayaan.

<i>Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah</i>		
Kas di Bank Indonesia	Xxx	
--Pengembalian pengeluaran pembiayaan ...		xxx

Dalam SAKUN terdapat jurnal yang digunakan untuk pengakuan penerimaan serta pengeluaran yang tidak bersumber dari anggaran. Jurnal ini termasuk jurnal akuntansi pihak ketiga dan pengiriman uang.

<i>Jurnal untuk penerimaan non anggaran adalah :</i>		
Kas di KPKN	Xxx	
--Penerimaan PFK/Kiriman uang/wesel pemerintah		Xxx
<i>Jurnal untuk pengeluaran nonanggaran adalah:</i>		
Pengeluaran PFK/kiriman uang/wesel pemerintah	Xxx	
--Kas di KPKN		xxx

4) Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran

Dengan adanya jurnal penutupan akhir tahun anggaran dibuat dengan tujuan untuk menutup segala perkiraan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

<i>Jurnal penutupan estimasi pendapatan adalah :</i>		
Pendapatan ...	Xxx	
Surplus/Defisit	Xxx	
--Estimasi pendapatan		Xxx

<i>Jurnal Penutupan apropriasi belanja adalah:</i>		
Apropriasi belanja ...	Xxx	
--Surplus/Defisit		Xxx
--Belanja ...		Xxx
<i>Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
Pembiayaan neto	Xxx	
--Estimasi penerimaan pembayaran		Xxx
<i>Jurnal penutupan pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Apropriasi pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Pembiayaan neto		Xxx
--Pengeluaran pembiayaan ...		Xxx
<i>Jurnal penutupan pembiayaan neto dan surplus defisit serta SILPA:</i>		
Pembiayaan neto	Xxx	
Surplus/Defisit	Xxx	
--SILPA		Xxx
<i>Jurnal penutupan SILPA adalah:</i>		
SILPA	Xxx	
--SAL		Xxx
<i>Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan penerimaan dan pengeluaran transit):</i>		
Penerimaan transit	Xxx	
Kas di bendaharawan pembayar	Xxx	
--Pengeluaran transit		Xxx
<i>Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan kiriman uang)</i>		
Penerimaan kiriman uang	Xxx	
Kas dalam transit	Xxx	
--Pengeluaran kiriman uang		Xxx
<i>Jurnal penutupan transaksi nonanggaran (penutupan PFK)</i>		
Penerimaan PFK	Xxx	
--Utang PFK		Xxx
--Pengeluaran PFK		xxx

c. jurnal untuk SAU

Terdapat beberapa jurnal yang digunakan untuk Sistem Akuntansi Umum sebagai berikut.

1) Dalam Akuntansi APBN (estimasi pendapatan dan belanja)

Tidak terdapat jurnal yang akan dilakukan dalam SAU dengan tujuan untuk transaksi anggaran APBN.

2) Akuntansi DIPA

Akuntansi DIPA dapat dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan yang dapat dialokasikan, bagian belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, serta bagian pengeluaran pembiayaan.

<i>Jurnal untuk estimasi penerimaan yang dialokasikan adalah:</i>		
Estimasi pendapatan ... yang dialokasikan	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk bagian belanja adalah</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Bagian belanja		Xxx
<i>Jurnal untuk estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan adalah:</i>		
Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk bagian pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Apropriasi pengeluaran pembiayaan		xxx

3) Akuntansi Realisasi Anggaran

Adanya Akuntansi Realisasi Anggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi Realisasi Anggaran ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP baik SAKUN, SAU maupun SAI.

<i>Jurnal untuk UYHD adalah :</i>		
Kas di bendaharawan pembayar	Xxx	
--Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah:</i>		
Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)	Xxx	
--Kas di bendaharawan pembayar		Xxx

<i>Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah:</i>		
Utang kepada KUN	Xxx	
--Pendapatan ...		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah:</i>		
Pengembalian pendapatan ...	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi belanja adalah:</i>		
Belanja ...	Xxx	
-Piutang dari KUN		xxx

Untuk belanja modal yang dapat mengakibatkan perolehan aset, jurnal tambahan akan diperlukan untuk digunakan dalam pengakuan aset tersebut (jurnal korolari).

<i>Jurnal kololari tersebut adalah:</i>		
Aset tetap sebelum disesuaikan	Xxx	
--Diinvestasikan dalam aset tetap		xxx

Penyesuaian jurnal akan dilakukan pada saat aset tetap telah diakui yang akan digunakan untuk membatalkan jurnal korolari yang pernah dibuat sebelumnya serta dapat digunakan untuk membuat jurnal pengakuan aset tetap.

<i>Jurnal tersebut adalah:</i>		
Aset tetap	Xxx	
--Diinvestasikan dalam aset tetap		Xxx
<i>Penghapusan korolari</i>		
Diinvestasikan dalam aset tetap	Xxx	
--Aset tetap sebelum disesuaikan		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah:</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Pengembalian belanja ...		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Utang kepada KUN	Xxx	
--Penerimaan pembiayaan		Xxx

<i>Jurnal pengembalian penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Pengembalian penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Piutang dari KUN		xxx

Transaksi pengeluaran pembiayaan akan membutuhkan jurnal korolari yang akan digunakan untuk mencatat segala kewajiban yang berkaitan.

<i>Jurnal tersebut adalah:</i>		
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang (jangka pendek/jangka panjang)	Xxx	
--Utang jangka pendek/panjang		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Piutang dari KUN	Xxx	
--Pengembalian pengeluaran pembiayaan		xxx

4) Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran

Pada jurnal penutupan akhir tahun anggaran bertujuan untuk menutup segala perkiraan sementara yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. pada jurnal penutup ini terdiri atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

<i>Jurnal penutupan bagian pendapatan adalah</i>		
Pendapatan ...	Xxx	
Utang kepada KUN	Xxx	
--Estimasi pendapatan ...		Xxx
<i>Jurnal penutupan bagian belanja adalah</i>		
Apropriasi belanja ...	Xxx	
--Piutang dari KUN		Xxx
--Belanja ...		Xxx
<i>Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah</i>		
Penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
Utang kepada KUN	Xxx	
--Estimasi penerimaan pembiayaan		Xxx

<i>Jurnal penutupan pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Apropriasi pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Piutang KUN		Xxx
--Pengeluaran Pembiayaan ...		xxx

## 2. Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi atau yang disingkat dengan SAI merupakan sebuah rangkaian prosedur yang dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga melaporkan posisi keuangan serta operasi keuangan kepada kementerian lembaga atau negara. Dalam hal ini, SAI terdiri atas dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atau SABMN.

SAK merupakan sebuah subsistem yang berasal dari SAI yang dapat menghasilkan berbagai informasi yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran atau LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dimiliki oleh kementerian maupun instansi. Sementara itu, SABMN merupakan salah satu subsistem yang berasal dari SAI yang terdiri atas beberapa rangkaian prosedur yang saling berkaitan dengan tujuan untuk melakukan pengolahan dokumen sumber dalam rangka menghasilkan berbagai informasi yang akan digunakan untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya berdasarkan pada ketentuan yang sedang berlaku.

Sama seperti SAU, SAK akan menghasilkan LRA, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan sebuah laporan keuangan yang berada pada tingkatan kementerian atau lembaga. Sementara itu, unit akuntansi keuangan pada sistem akuntansi keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut.

- a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yang berada pada level kementerian/Lembaga
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), yang berada pada level eselon 1.
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W), yang berada pada tingkat wilayah
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yang berada pada level Kuasa Pengguna Anggaran (Kantor)

Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing unit akuntansi yang telah disebutkan diatas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

No.	Unit Akuntansi	Dokumen Sumber	Proses	Dokumen Hasil
1	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	Dokumen penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan	Melakukan proses akuntansi terhadap dokumen tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan	LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat (kuasa pengguna anggaran) kantor.
			Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya	Berita acara rekonsiliasi
2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W)	Laporan Keuangan yang dihasilkan UAKPA	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA yang berada di bawahnya	LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat wilayah
			Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan setiap triwulan	Berita Acara Rekonsiliasi
3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1)	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-W	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-W yang berada di bawahnya	LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tingkat eselon 1
			Melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini DIA setiap semester	Berita Acara Rekonsiliasi
4	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-E1	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-W yang berada di bawahnya	LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan pada tingkat kementerian/ lembaga
			Melakukan rekonsiliasi dengan Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini DIA setiap semester	Berita Acara Rekonsiliasi

Gambar 6.2 Proses Pelaksanaan di Masing-Masing Unit Akuntansi

Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

34

## F. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

30

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Contoh dari perolehan yang sah yaitu hibah atau sitaan/rampasan, yang tidak termasuk dalam definisi Barang Milik Negara yaitu barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah (sumber dari APBN), BUMS/BUM, dan Bank Pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah.

### 1. Unit Akuntansi Barang



Tujuan dari sistem akuntansi milik negara adalah untuk menghasilkan neraca dan laporan barang milik daerah. Kementerian/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang dengan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai Unit Akuntansi Barang.

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) berkedudukan di tingkat Kementerian/Lembaga dengan penanggung jawabnya yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga.
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1), yang berkedudukan di level eselon 1 dengan penanggung jawabnya, yaitu pejabat eselon 1.
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) yang berkedudukan di tingkat wilayah dengan penanggung jawabnya, yaitu kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berkedudukan di Kantor Kuasa Pengguna Anggaran dengan penanggung jawabnya, yaitu kepala kantor/unit kerja. Berikut ini proses pelaksanaan akuntansi barang di setiap UAB yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.

No.	Unit Akuntansi	Dokumen Sumber	Proses	Dokumen Hasil
1	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)	Laporan BMN sebelumnya, dokumen perolehan/ pengembangan/penghapusan, serah terima BMN, faktur pembelian, dan dokumen lain yang sah	Melakukan proses terhadap data tersebut untuk menghasilkan data transaksi barang milik negara	Laporan barang milik negara pada tingkat kantor. Laporan ini disampaikan setiap semester ke UAPPB-W
2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W)	Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAKPB	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAKPB yang berada di bawahnya	Laporan barang milik negara pada tingkat wilayah. Laporan ini disampaikan setiap semester ke UAPPB-E1
3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1)	Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-W	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-W yang berada dibawahnya	Laporan barang milik negara pada tingkat eselon 1. Laporan ini disampaikan setiap semester ke UAPB
4	Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)	Laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-E1	Melakukan proses penggabungan seluruh laporan barang milik negara yang dihasilkan oleh UAPPB-E1 yang berada di bawahnya	Laporan barang milik negara pada tingkat kementerian / lembaga

Gambar 6.3 Proses Pelaksanaan Akuntansi Barang di Masing-Masing UAB

Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

## 2. Jurnal untuk Sistem Akuntansi Instansi

### a. Akuntansi APBN (estimasi pendapatan dan belanja)

Tidak ada jurnal yang dibuat dalam Sistem Akuntansi Instansi untuk transaksi anggaran APBN.

### b. Akuntansi DIPA

Akuntansi DIPA dibuat untuk membuat pembukuan perkiraan pendapatan yang dialokasikan, otorisasi anggaran belanja, perkiraan penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan otorisasi anggaran pengeluaran pembiayaan.

<i>Jurnal untuk estimasi penerimaan yang dialokasikan adalah:</i>		
Estimasi pendapatan ... yang dialokasikan	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk allotment belanja adalah :</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Allotment Belanja		Xxx
<i>Jurnal untuk estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan adalah:</i>		
Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk allotment pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Apropriasi pengeluaran pembiayaan		xxx

c. Akuntansi Realisasi Anggaran

Akuntansi realisasi anggaran digunakan untuk membuat pembukuan pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Akuntansi tersebut dilakukan oleh seluruh subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU, ataupun SAI.

<i>Jurnal untuk UYHD adalah:</i>		
Kas di bendaharawan pembayar	Xxx	
--Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah:</i>		
Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus)	Xxx	
--Kas di bendaharawan pembayar		Xxx

<i>Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah</i>		
Utang kepada KUN	Xxx	
--Pendapatan ...		Xxx
<i>Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah</i>		
Pengembalian pendapatan ...	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi belanja adalah</i>		
Belanja ...	Xxx	
--Piutang dari KUN		xxx

Untuk belanja modal yang menghasilkan perolehan aset, maka dibutuhkan jurnal tambahan untuk mencatat aset tersebut (Jurnal Korolari).

<i>Jurnal korolari tersebut adalah:</i>		
Aset tetap sebelum disesuaikan	Xxx	
--Diinvestasikan dalam aset tetap		Xxx

Ketika aset tetap tersebut diakui, maka jurnal penyesuaian dibuat untuk membatalkan jurnal korolari yang pernah dibuat sebelumnya dan membuat jurnal jangkauan aset tetap.

<i>Jurnal pengakuan aset tetap adalah:</i>		
Aset tetap	Xxx	
--Diinvestasikan dalam aset tetap		Xxx
<i>Jurnal Penghapusan Korolari adalah:</i>		
Diinvestasikan dalam aset tetap	Xxx	
--Aset tetap sebelum disesuaikan		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengembalian belanja adalah:</i>		
Piutang KUN	Xxx	
--Pengembalian belanja ...		Xxx
<i>Jurnal untuk realisasi penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Utang kepada KUN	Xxx	
--Penerimaan pembiayaan		Xxx

<i>Jurnal pengembalian penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Pengembalian penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
--Utang kepada KUN		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Piutang dari KUN		xxx

Pada transaksi pengeluaran pembiayaan tersebut dibutuhkan jurnal korolari untuk mencatat kewajiban yang terkait.

<i>Jurnal korolari untuk mencatat kewajiban adalah:</i>		
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban (jangka pendek/jangka panjang)	Xxx	
--Utang jangka pendek/panjang		Xxx
<i>Jurnal realisasi pengembalian pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Piutang dari KUN	Xxx	
--Pengembalian pengeluaran pembiayaan ...		xxx

d. Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran

Jurnal penutup dibuat untuk menutup seluruh perkiraan sementara yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan. Jurnal penutup terdiri dari jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

<i>Jurnal penutupan estimasi pendapatan yang dialokasikan adalah:</i>		
Pendapatan ...	Xxx	
Utang kepada KUN	Xxx	
--Estimasi pendapatan ...		xxx
<i>Jurnal penutupan allotment belanja :</i>		
Apropriasi belanja ...	Xxx	
--Piutang dari KUN		Xxx
--Belanja		Xxx
<i>Jurnal penutupan penerimaan pembiayaan adalah:</i>		
Penerimaan pembiayaan ...	Xxx	
Utang kepada KUN	Xxx	
--Estimasi penerimaan pembiayaan ...		Xxx

<i>Jurnal penutupan pengeluaran pembiayaan adalah:</i>		
Apropriasi pengeluaran pembiayaan ...	Xxx	
--Piutang KUN		Xxx
--Pengeluaran Pembiayaan		xxx

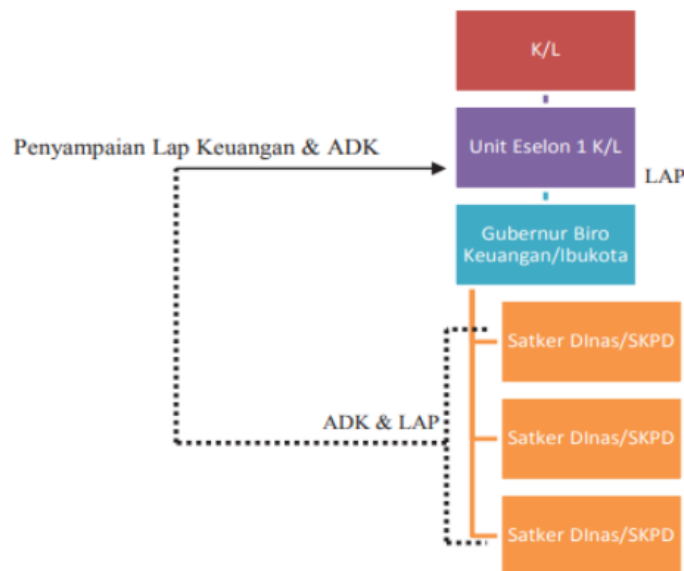
**3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa asas yang digunakan oleh pemerintah, yaitu:

- a. **21**entralisasi; pemerintah melimpahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dekonsentrasi; pemerintah telah melimpahkan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
- c. Tugas Pembantuan; penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dan dari pemkab/pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dana yang berkaitan dengan desentralisasi adalah dana yang diperoleh dari APBN yang pelaksanaannya ditransfer secara langsung ke Kas Umum Daerah. Pelaporan dan pertanggung jawaban dan tersebut dilakukan di setiap daerah. Berikut ini bagan alur pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 6.4 Bagan Alur Pertanggungjawaban

Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

#### 4. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pada pemerintah pusat, laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan dua sistemnya, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan SiAP dan SAI. Laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada DPR untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN. Pihak BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan

pemerintah pusat sebelum laporan tersebut disampaikan kepada DPR. Berikut ini bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat.

a. Laporan realisasi anggaran konsolidasi

Laporan realisasi anggaran dari seluruh Kementerian/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

b. Neraca Pemerintah

Neraca pemerintah pusat adalah konsolidasi dari neraca SAI dan neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan tersebut memberikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah pusat yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan modal dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.

c. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Kenaikan dan penurunan surplus anggaran pada setiap periode akan dicatat pada laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). Nantinya, laporan tersebut hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

d. Laporan operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang disusun untuk melengkapi pelaporan siklus akuntansi yang berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan modal, dan neraca memiliki hubungan yang dapat dipertanggung jawabkan. LO akan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dari entitas pelaporan seperti pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang telah dibandingkan dengan laporan pada tahun sebelumnya.

e. Laporan perubahan ekuitas

Sama seperti laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas (LPE) memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan data sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selama periode tertentu. Akan tetapi, hal yang menjadi subjek perbandingan dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu data ekuitas baru dengan data pada tahun sebelumnya.

10

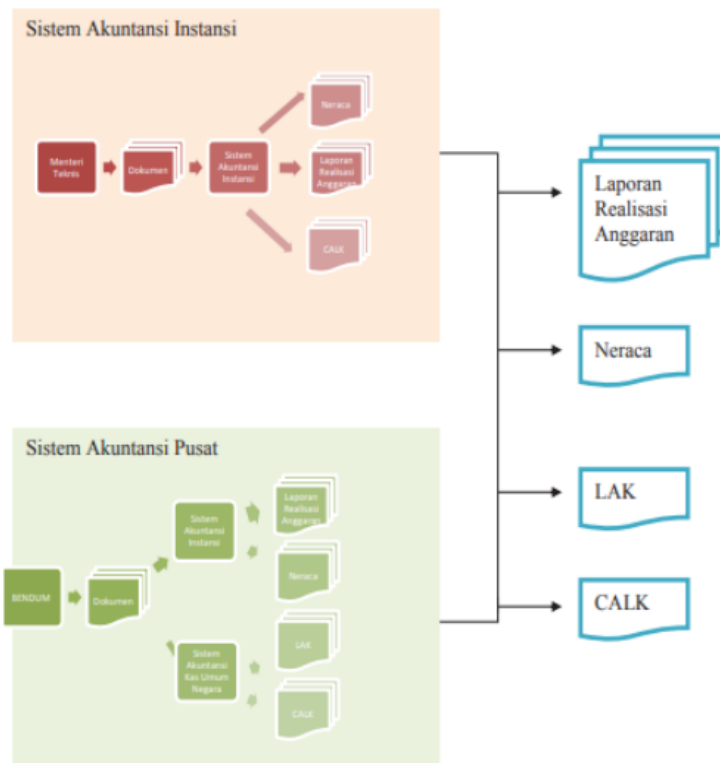
f. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CAL) adalah bagian yang harus ada dalam laporan keuangan. CAL memberikan penjelasan atau daftar rinci atau analisis terhadap nilai suatu pos yang ada pada laporan berkaitan dengan informasi realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas.

g. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pemerintah pusat adalah konsolidasi laporan arus kas dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen PBN. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atau perincian terhadap nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah dan laporan arus kas dalam upaya pengungkapan yang memadai. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.





Gambar 6.4 Bagan Proses Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  
 Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

**Tugas Mandiri/Kelompok**

Setelah mempelajari tentang sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Buatlah mindmap atau peta konsep dengan judul klasifikasi standar akuntansi pemerintah pusat pada kertas karton manila berwarna. Buatlah semenarik mungkin. Mindmap hanya berisi tentang poin-poin saja, bukan berbentuk kalimat panjang.

**Refleksi**

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25 %	50 %	75 %	100 %
1	Memahami latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat				
2	Memahami dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat				
3	Memahami kualifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat				
4	Memahami sistem akuntansi barang milik negara				
5	Memahami laporan keuangan pemerintah pusat				

### Uji Kompetensi

#### D. Soal Pilihan Ganda

***Pilihlah jawaban yang paling tepat.***

1. Perhatikan pernyataan dibawah ini.
  - (1) Proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang akan diperiksa akan dibantu dengan adanya sistem akuntansi.

- (2) Menggunakan cash basis pada laporan pelaksanaan anggaran (LRA) dan accrual basis pada neraca.
- (3) kegiatan akuntansi yang didasarkan pada UU-APBN yang digunakan sebagai landasan operasional.
- (4) Klasifikasi anggaran harus disesuaikan dengan sistem akuntansi.
- (5) Menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau *double entry system*.

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk dalam karakteristik yang harus ada dalam penyusunan sistem akuntansi adalah....

- A. (2) dan (3)
  - B. (1) dan (4)
  - C. (3) dan (5)
  - D. (4) dan (2)
  - E. (5) dan (1)
2. Dibawah ini yang termasuk dalam dasar hukum yang digunakan dalam pengenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah...
- A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
  - B. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
  - C. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000
  - D. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992
  - E. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991
3. Dalam klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terbagi menjadi dua subsistem. Pernyataan yang sesuai dengan klasifikasi SAPP adalah...
- A. SAPP terbagi menjadi dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Daerah dan Sistem Akuntansi Instansi.
  - B. Dalam subsistem SAI terbagi menjadi Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Keuangan.
  - C. Dalam subsistem SABMN akan menghasilkan LRA, Neraca, dan CALK K/L
  - D. Dalam subsistem SAKUN akan menghasilkan LAK dan Neraca KUN
  - E. SAI akan menghasilkan LAK, Neraca KUN, dan CALK K/L
4. Perhatikan contoh jurnal berikut ini.

<i>Jurnal untuk penerimaan non anggaran adalah :</i>		
Kas di KPKN	Xxx	
--Penerimaan PFK/Kiriman uang/wesel pemerintah		Xxx
<i>Jurnal untuk pengeluaran nonanggaran adalah:</i>		
Pengeluaran PFK/kiriman uang/wesel pemerintah	Xxx	
--Kas di KPKN		xxx

Berdasarkan jurnal diatas, termasuk dalam subsistem....

- A. SAI
  - B. SiAp
  - C. SAK
  - D. SABMN
  - E. SAPP
5. Pernyataan yang sesuai dengan Akuntansi Realisasi Anggaran pada subsistem SAI adalah....
- A. Terdapat jurnal korolari yang digunakan untuk pengakuan aset
  - B. Tidak terdapat jurnal korolari yang digunakan untuk pengakuan utang jangka panjang saja
  - C. Tidak terdapat jurnal yang digunakan untuk pengakuan penerimaan
  - D. Tidak terdapat jurna; korolari yang digunakan untuk pengakuan aset
  - E. Terdapat jurnal yang digunakan untuk pengakuan penerimaan yang bersumber dari anggaran.
6. sebuah subsistem yang berasal dari **S30** yang dpat menghasilkan berbagai informasi yang berhubungan dengan **Laporan Realisasi Anggaran** atau LRA, **neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dimiliki oleh kementrian** maupun instansi merupakan definisi dari....
- A. SAU
  - B. SAI
  - C. SiAP
  - D. SAK
  - E. SABMN
7. Dibawah ini pernyataan yang sesuai dengan proses pelaksanaan unit akuntansi keuangan pada sistem akuntansi instansi adalah....
- A. UAPPA-W membutuhkan dokumen sumber seperti laporan keuangan yang dihasilkan UAKPA

- B. UAPA akan menghasilkan dokumen yang berupa LRA, Neraca, CALK pada tingkat eselon1
- C. Pada proses melakukan rekonsiliasi dengan KPPN pada unit akuntansi UAKPA akan menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi
- D. UAPPA-E1 membutuhkan dokumen sumber seperti laporan keuangan yang dihasilkan UAKPA
- E. UAKPA akan membutuhkan dokumen sumber seperti laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAPPA-E1

**E. Soal Essai Uraian**

*Jawablah dengan tepat dan benar.*

1. Jelaskan jurnal yang digunakan untuk sistem akuntansi umum pada sistem akuntansi pusat.
2. Jelaskan karakteristik yang dimiliki sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah pusat tentunya memiliki tujuan. Sebutkan beberapa tujuan dari sistem akuntansi pemerintah pusat.

**F. Tugas Praktik**

**Daftar pustaka**

Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintah. Bogor: In Media

<https://www.hashmicro.com/id/blog/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/#ruang>

<https://id.scribd.com/doc/313914501/Sistem-Akuntansi-Pemerintah-Pusat-dan-Dokumen-Pelaksanaan-Anggaran>

**Bab 7**  
**Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

**Tujuan Pembelajaran**

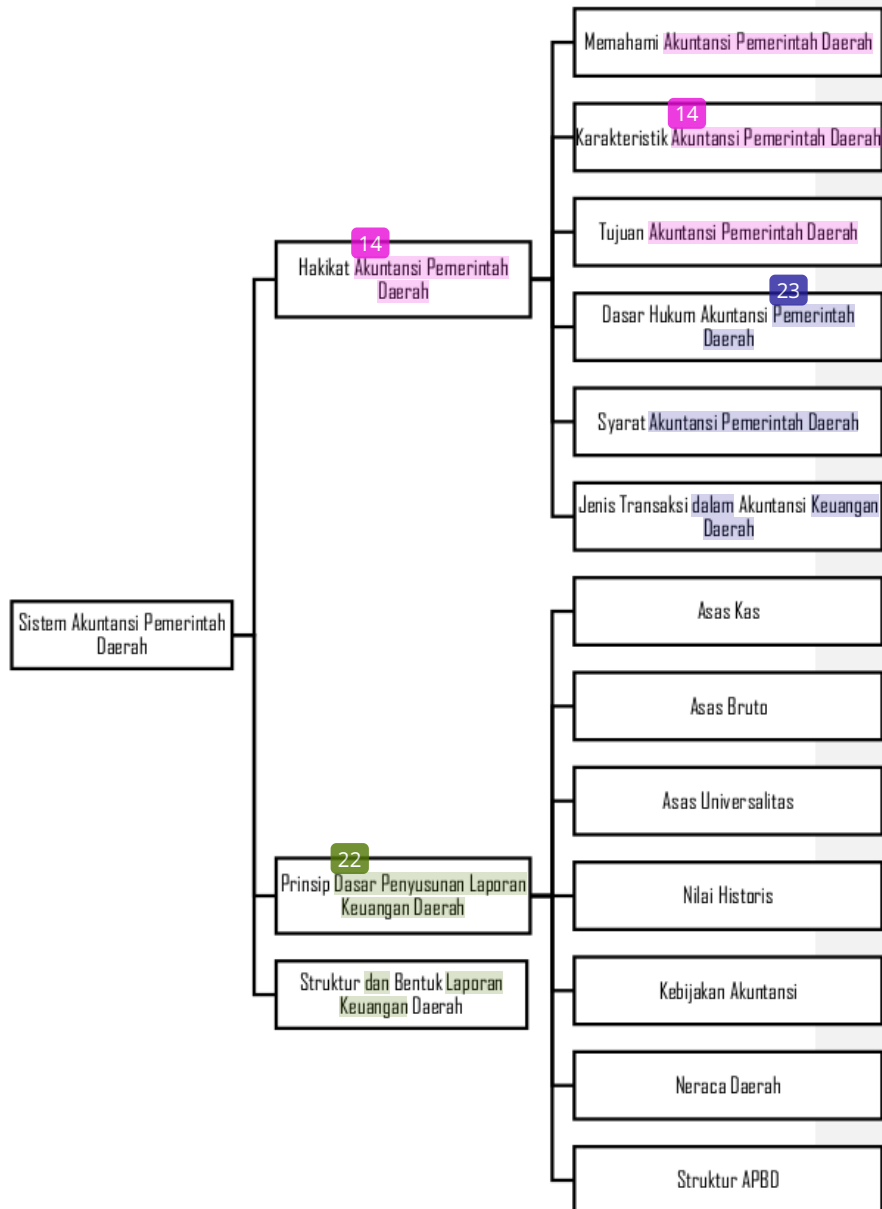
Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu

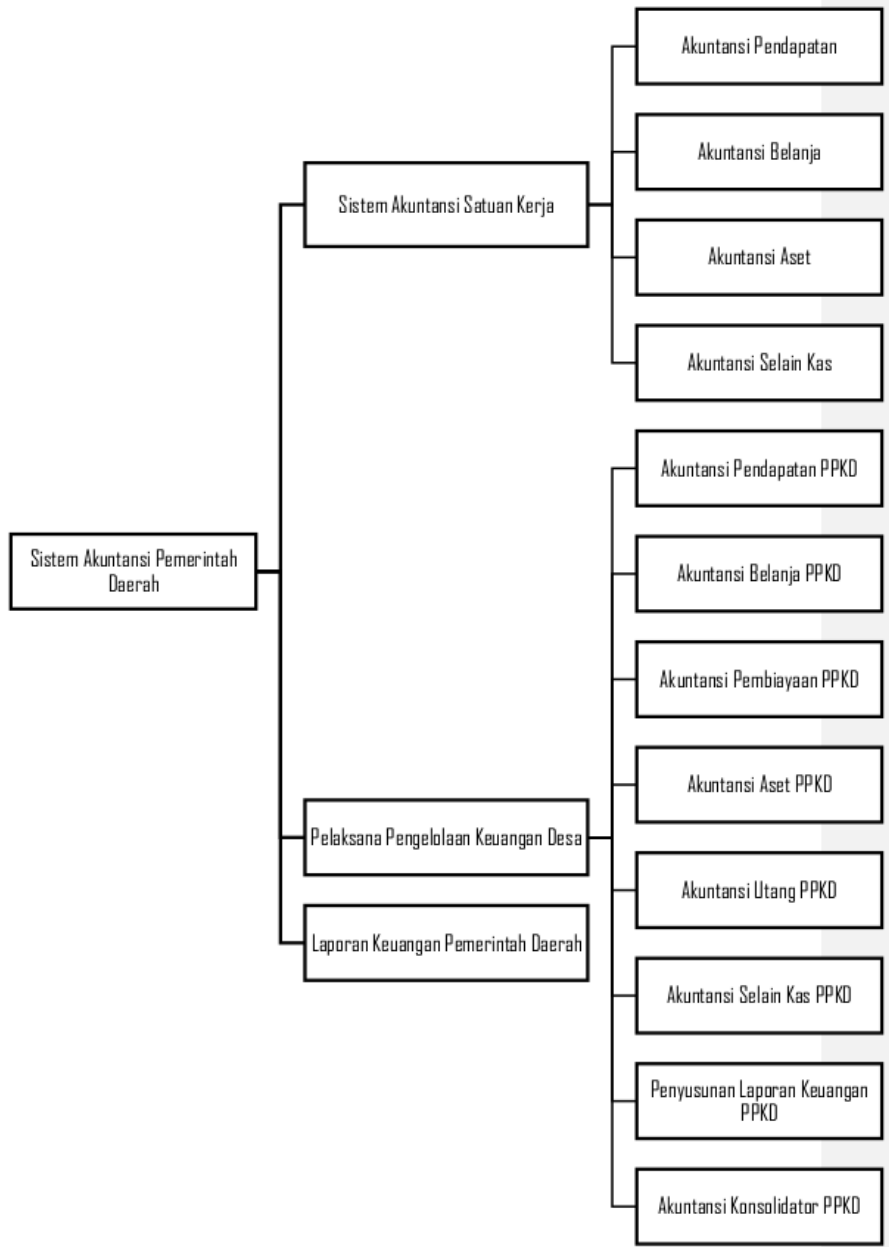
12. Memahami hakikat akuntansi dalam pemerintah daerah
13. Memahami prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah
14. Memahami struktur dan bentuk laporan keuangan daerah
15. Memahami sistem akuntansi satuan kerja
16. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa
17. Memahami laporan keuangan pemerintah daerah

**Profil Pelajar Pancasila**

- 3.

## Peta Konsep







Pada pemerintah daerah juga memiliki sistem akuntansi yang mengatur segala keuangan dalam lingkungan kerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, sistem akuntansi melakukan pencatatan, penggolongan, melakukan analisis, mengikhtisarkan serta melaporkan berbagai jenis transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan kerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Lalu, apa saja prinsip dasar dalam melakukan sistem akuntansi pemerintah daerah? Apa dasar hukum dalam melakukan sistem akuntansi pemerintah daerah? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, pelajarilah materi dibawah ini dengan saksama.

#### A. Hakikat Akuntansi Pemerintah Daerah

Segala informasi yang berhubungan dengan keuangan negara muncul akibat dari dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Informasi-informasi yang muncul akibat paket Undang-Undang tersebut meliputi informasi keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Informasi keuangan tersebut perlu untuk dilengkapi dengan beberapa informasi yang berhubungan dengan laporan realisasi APBN atau APBD, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan pembuatan peraturan daerah harus membuat sistem akuntansi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

##### 1. Memahami Akuntansi Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa pendapat dari ahli dan juga pemerintah mendefinisikan akuntansi pemerintah dan akuntansi keuangan daerah. Berikut definisi dari akuntansi pemerintah dan akuntansi keuangan daerah yang dijelaskan oleh pemerintah dan para ahli.

###### a. Pemerintah

Pendapat yang pertama datang dari pemerintah yang mendefinisikan akuntansi pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengartikan akuntansi pemerintah bahwa serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah.

b. Bakhtiar Arif dkk

Sementara itu, pendapat ahli terkait dengan definisi akuntansi pemerintah dikemukakan oleh Bakhtiar Arif dkk yaitu salah satu penyedia jasa yang menyajikan beberapa informasi terkait dengan informasi keuangan yang terdapat dalam pemerintah yang berdasarkan pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta penafsiran atas berbagai transaksi dan informasi keuangan yang terdapat pada pemerintah daerah.

c. Kustadi Arinta

Pendapat ahli terkait dengan akuntansi pemerintah disampaikan oleh Kustadi Arinta. Beliau berpendapat bahwa akuntansi pemerintah diartikan sebagai sebuah sistem dalam akuntansi yang menerapkan beberapa peraturan-peraturan pada bagian keuangan negara atau *public finance* yang dikhususkan pada tahap pelaksanaan anggaran atau *budget execution*. Dalam tahap anggaran atau *budget execution* yang menggunakan sistem akuntansi pemerintah termasuk pada pengaruh yang dapat ditimbulkan yang bersifat sementara atau permanen dalam seluruh lapisan pemerintahan.

d. Abdul Hakim dkk

Abdul Hakim dkk juga mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai sebuah proses dalam akuntansi yang didalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang berasal dari berbagai entitas pemerintah daerah baik pada kabupaten, kota, maupun provinsi. Beberapa informasi terkait kegiatan ekonomi pada pemerintah daerah akan dijadikan sebagai sebuah informasi oleh beberapa pihak internal pemerintah daerah yang memerlukannya dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi.

e. Revrison Baswir

Pendapat yang terakhir terkait dengan akuntansi pemerintah dikemukakan oleh Revrison Baswir. Beliau berpendapat bahwa akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi yang berhubungan erat dengan sebuah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan dalam hal ini mencakup banyak hal dan sangat luas

cakupannya, akan tetapi lembaga pemerintahan dalam sebuah perusahaan termasuk dalam lembaga mikro.

Berdasarkan beberapa definisi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah dari ahli dan dari pemerintah sendiri dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang dalam akuntansi yang didalamnya terdapat beberapa informasi terkait dengan keuangan pemerintah dan penafsirannya yang pembuatannya mengacu pada standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAP. Sementara itu, akuntansi pada pemerintah daerah diartikan sebagai suatu proses akuntansi yang didalamnya terdapat kegiatan identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang akan dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang terdapat pada desa, kabupaten, kota, maupun provinsi.

## 2. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah tentunya memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan karakteristik pada akuntansi bisnis. Karakteristik akuntansi pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut.

### a. Tidak berorientasi pada keuntungan atau laba

Tidak adanya pemasukan dalam lembaga pemerintah seperti kementerian yang berupa laba atau keuntungan. Pemasukan terbesar dari lembaga pemerintah didapatkan dari pemasukan negara yang sifatnya memaksa yaitu pajak dan pendapatan lainnya yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, dalam pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak terdiri dari laporan laba atau *income statement* dan perlakuan sesuai dengan hakikat akuntansi yang berkaitan dengan hal tersebut.

### b. Memungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis dana

Pemasukan yang didapatkan oleh lembaga keuangan tidak hanya dari pajak saja, namun juga terdapat beberapa sumber pemasukan yang termasuk pada penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Oleh karena itu, akan sangat memungkinkan bahwa lembaga pemerintah akan menggunakan dana lebih dari satu jenis sumber dana.

### c. Bersifat kaku

Penerapan akuntansi pemerintah sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikan akuntansi pemerintah tidak dapat ditambah apapun sehingga pemakaiannya bersifat kaku.

- d. Terdapat pembukuan dalam pengeluaran modal.
- e. Pembuatan pembukuan sebuah anggaran dilakukan apabila anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat.
- f. Perkiraan modal dan laba yang ditahan tidak terdapat pada neraca.

### **3. Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah**

Berbanding terbalik dengan karakteristik akuntansi pemerintah daerah yang sangat berbeda dengan akuntansi bisnis, tujuan akuntansi pemerintah daerah memiliki kesamaan dengan tujuan akuntansi bisnis. Tujuan dalam akuntansi pemerintah daerah yaitu dapat menyajikan beberapa informasi yang berhubungan dengan keuangan yang telah dilakukan sebuah organisasi dalam hal ini pemerintah daerah pada periode tertentu dan posisi keuangan yang berada pada tanggal tertentu kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi atau keuangan. Sementara itu, akuntansi pemerintah daerah juga memiliki tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut.

#### **a. Akuntabilitas**

Tujuan utama dalam akuntansi pemerintah daerah yang pertama adalah akuntabilitas. Pada tujuan utama dari akuntabilitas ini sangat ditekankan. Hal tersebut dikarenakan segala bentuk keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Sementara itu, akuntabilitas memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Akan tetapi, akuntabilitas tetap memperhatikan segala penggunaan sumber daya yang dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, serta bijaksana.

#### **b. Manajerial**

Tujuan utama dalam akuntansi pemerintah yang kedua adalah manajerial. Akuntansi pemerintah akan sangat memungkinkan dengan dilakukannya perencanaan yang berupa sebuah penyusunan strategi pembangunan maupun anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

#### **c. Pengawasan**

tujuan utama dalam akuntansi pemerintah yang terakhir adalah pengawasan. dengan adanya akuntansi pemerintah akan memungkinkan terjadinya pengawasan dalam hal pengurusan keuangan negara yang berben<sup>20</sup> sebuah badan agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan seperti BPK-RI atau Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia.

#### 4. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah Daerah

Berikut dasar hukum yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pinjaman Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Hibah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Akuntansi Pemerintahan.

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

#### 5. Syarat Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mencapai akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas keuangan negara terdapat dalam sebuah pedoman untuk akuntansi pemerintah atau *A Manual Governmental Accounting* yang dikeluarkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian dirangkum sebagai berikut.

- a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU dan persyaratan lainnya

Persyaratan-persyarat yang terdapat dalam UUD, UU dan persyaratan lainnya digunakan untuk mengatur akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah pada dasarnya memiliki dua sifat yaitu pada salah satu sisinya sangat bermanfaat untuk kepentingan ekonomis dan efisiensi. Sementara itu, sisi lainnya yang bertentangan dengan UUD, UU dan peraturan lainnya akan tetap disesuaikan dengan UUD, UU serta peraturan lainnya yang sudah ada.

- b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran

Pengembangan dalam sistem akuntansi pemerintah harus senantiasa dikembangkan dan disesuaikan dengan beberapa pembagian anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta lembaga legislatif. Anggaran dan akuntansi memiliki fungsi yang harus selalu melengkapi serta dapat diintegrasikan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.

- c. Perkiraan yang harus diselenggarakan

Tidak hanya mengembangkan sistem akuntansi pemerintah yang sesuai dengan klasifikasi anggaran, namun juga harus dikembangkan sistem akuntansi pemerintah yang dapat memperkirakan dalam pencatatan transaksi uang yang terjadi. Perkiraan yang harus diselenggarakan harus dapat membuktikan akuntabilitas keuangan negara yang andal apabila dilihat dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana serta organisasi maupun pejabat yang telah melakukan pengelolaan.

- d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara

Dalam melakukan pengembangan sistem akuntansi pemerintah harus dapat memudahkan dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam melakukan tugas-tugasnya.

- e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan

Dengan adanya perubahan pada lingkungan dan sifat transaksi yang terjadi serta selalu menuntut untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan terhadap sistem akuntansi pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya sebuah efisiensi, relevansi dan efektivitas.

- f. Perkiraan harus dikembangkan secara efektif

Perkiraan-perkiraan yang perlu untuk dikembangkan secara efektif pada sistem akuntansi pemerintah akan berhubungan dengan perubahan lingkungan dan sifatnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh pelaksana pada sebuah program.

- g. Dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan

Pengembangan dalam sistem akuntansi pemerintah harus terus dilakukan agar dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan yang berguna untuk pengguna informasi keuangan seperti pemerintah, lembaga legislatif, lembaga donor, Bank Dunia, dan sebagainya. Selain itu, pengembangan dalam sebuah sistem akuntansi pemerintah diharapkan mampu untuk mengembangkan program kerja dan rencana bagi para penggunanya.

- h. Pengadaan suatu perkiraan

Pengadaan suatu perkiraan yang telah dibuat harus memungkinkan untuk melakukan analisis ekonomi yang berdasar pada data keuangan serta melakukan klasifikasi ulang pada transaksi-transaksi pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

## 6. Jenis Transaksi dalam Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah tentunya memiliki berbagai jenis transaksi yang dilakukan. Berikut penjelasan terkait dengan jenis transaksi yang terdapat dalam akuntansi keuangan daerah.

- a. Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Sementara itu, rekening kas umum merupakan sebuah rekening yang telah ditentukan oleh kepala

daerah yang digunakan untuk menyimpan uang daerah, menampung seluruh penerimaan daerah, serta digunakan juga untuk melakukan pembayaran seluruh pengeluaran daerah dari bank yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pendapat daerah yang termasuk dalam salah satu jenis transaksi yang terdapat dalam akuntansi keuangan daerah meliputi segala bentuk penerimaan uang yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

1) Sumber pendapatan daerah

25 Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lainnya.

Berikut 25 penjelasan terkait dengan sumber pendapatan daerah.

a) Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah yang memiliki singkatan PAD merupakan perolehan 33 dana yang didapatkan dari berbagai sumber kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pengambilan pendapatan asli daerah atau PAD dilakukan dengan pemungutan atau pengambilan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, PAD meliputi retribusi daerah, pajak daerah, dan bagian laba usaha daerah.

b) Dana pertimbangan

Sumber pendapatan daerah yang kedua adalah 4 dana pertimbangan. Definisi dari dana pertimbangan adalah sebuah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah untuk pemenuhan kebutuhan atau 4 pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, dana pertimbangan meliputi dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana alokasi umum atau DAU.

c) Pendapatan lainnya

Selain kedua sumber pendapatan daerah terdapat pula sumber pendapatan lainnya yang didapatkan oleh suatu daerah. Pendapatan lain yang sah merupakan seluruh pendapatan yang tidak termasuk pada dana pendapatan asli daerah dan dana pertimbangan. Yang termasuk dalam pendapatan lainnya adalah dana darurat, dana hibah, serta pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



2) Ketentuan penerimaan daerah

12

Berdasarkan pada Pasal 57 ayat (1) hingga ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pendapatan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

12

Sementara itu, pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

9 Ketentuan penerimaan daerah juga dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dalam peraturan menteri dalam negeri ini dijabarkan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Dokumen sumber yang digunakan

Dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah diperlukan beberapa dokumen sumber yang berguna sebagai bukti bahwa transaksi tersebut telah dilakukan. Dokumen-dokumen sumber yang berguna untuk dasar pencatatan transaksi pendapatan daerah sebagai berikut.

a) Surat ketetapan pajak daerah

9 Dokumen yang digunakan dalam pencatatan transaksi pendapatan daerah yang pertama adalah surat ketetapan pajak daerah. Dokumen ini dibuat langsung oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan PPKD. Tidak hanya PPKD yang membuat dokumen tersebut, namun pejabat yang telah diberikan amanah untuk menetapkan pajak daerah maupun wajib pajak juga dapat membuat dokumen yang berupa surat ketetapan pajak daerah.

b) Surat tanda setoran

Dokumen yang dibutuhkan kedua adalah Surat Tanda Setoran atau STS. Dokumen ini biasanya digunakan oleh bendahara penerimaan untuk melakukan penyetoran atau pencatatan transaksi penerimaan daerah serta diperuntukkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satu Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c) Surat ketetapan retribusi daerah

Dokumen yang ketiga dalam pencatatan transaksi pendapatan daerah adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD. Pembuat dari dokumen ini adalah pengguna anggaran maupun pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan penetapan retribusi atau wajib retribusi.

d) Surat lainnya.

Selain ketiga dokumen yang telah disebutkan diatas, beberapa dokumen atau surat tanda bukti pembayaran dan surat tanda bukti penerimaan yang dapat berupa bukti transfer atau nota kredit bank juga termasuk dalam dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah.

4) Jurnal standar

Terdapat beberapa kondisi yang diharuskan untuk mengembalikan pengembalian dalam kelebihan pendapatan yang sifatnya berulang atau (*recurring*) baik kelebihan yang terjadi pada periode yang sedang berjalan atau bahkan kelebihan pada periode sebelumnya kepada pihak ketiga. Akan tetapi, pengembalian kelebihan juga berlaku pada kelebihan pendapatan yang sifatnya tidak berulang namun terjadi dalam periode berjalan PPK SKPD. Untuk informasi terkait dengan kelebihan pendapatan yang sifatnya tidak berulang didapatkan

dari Bendahara Umum Daerah (BUD) mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut.

Pendapatan	xxx
R/K PPKD	xxx

Pada saat pengambilan kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, akuntansi PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan jurnal berikut

R/K SKPD	xxx
Kas di Kasda	xxx

Jika pengembalian kelebihan pendapat tersebut bersifat tidak berulang (*non recurring*) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, satuan kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut.

SILPA	xxx
Kas di Kasda	xxx

b. Belanja daerah

Jenis transaksi yang terdapat dalam akuntansi keuangan daerah yang kedua adalah belanja daerah. Dalam hal ini, belanja daerah meliputi segala bentuk pengeluaran uang yang berasal dari rekening kas umum sehingga dapat mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan salah satu kewajiban daerah yang harus dilakukan pada periode satu tahun anggaran serta tidak akan didapatkan kembali pembayarannya oleh daerah tersebut.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1) Klasifikasi belanja daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun menurut Permendagri 64 Tahun 2013, belanja daerah dikelompokkan atas belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

2) Dokumen sumber yang digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi belanja daerah antara lain sebagai berikut.

- a) Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran.
- c) Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD.
- d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e) Bukti pembayaran lainnya, seperti kuitansi pembayaran, bukti transfer, nota debit bank, dan bukti pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

3) Jurnal transaksi pengeluaran kas

Jurnal transaksi pengeluaran kas pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Pelaksana belanja dengan menggunakan uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dan kas diterima terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran dicatat dengan jurnal berikut.

Dr. Belanja	xxx
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

- b) Transaksi pemberian panjar kepada peminjam panjar dicatat dengan jurnal berikut.

Dr. Piutang lainnya-Panjar	xxx
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

c. Pembiayaan daerah

Dalam jenis transaksi akuntansi pemerintah daerah yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis transaksi ini meliputi segala bentuk transaksi keuangan yang dilakukan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

1) Klasifikasi pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah sendiri diklasifikasi ke dalam pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Pos-pos pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/ Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan membentuk dana cadangan.
- b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Dokumen yang digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembiayaan daerah diantaranya peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, naskah perjanjian kredit, SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, nota kredit, dan dokumen lainnya.

3) Jurnal standar

Pada dasarnya transaksi pembiayaan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Adapun jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Jurnal Pengakuan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

No	Transaksi	Pencatatan Oleh PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1.	Saat Penerimaan Pembiayaan	Kas di kas daerah	xxx	-
		Kewajiban jangka panjang	-	xxx
		Perubahan SAL	xxx	-
		Penerimaan Pembiayaan	-	xxx
4.	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	-
		Kas di kas daerah	-	xxx
		Bunga utang	xxx	-
		Perubahan SAL	-	xxx
3.	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban jangka panjang	xxx	-
		Kas di kas daerah	-	xxx
		Pengeluaran pembiayaan	xxx	-
		Perubahan SAL	-	xxx
4.	Saat Reklasifikasi	Kewajiban jangka panjang	xxx	-

		Bagian lancar kewajiban jangka panjang	-	xxx
--	--	--	---	-----

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

d. Transaksi selain kas

Jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah yang terakhir adalah transaksi yang dilakukan selain kas. Pada jenis ini, transaksi yang dilakukan meliputi segala bentuk proses yang dilakukan seperti pencatatan, pengikhtisaran hingga proses pelaporan keuangan yang berhubungan dengan segala kejadian atau transaksi selain kas. Maksudnya transaksi selain kas adalah transaksi yang terdiri atas koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, ekuitas, depresiasi, utang jangka panjang, hibah selain kas, serta transaksi yang berbentuk akrual dan *prepayment*.

1) Aset daerah

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti sumbangan hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

a) Jenis aset daerah

Aset daerah biasanya dibagi dalam kelompok aset lancar dan aset tetap. Berikut penjelasan terkait dengan aset lancar dan aset tetap.

(1) Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat (biasanya satu tahun) serta berupa kas dan setara kas. Aset lancar dalam akuntansi pemerintahan daerah disajikan dalam neraca yang meliputi kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

(2) Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut.

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

(c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



(f) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dalam akuntansi pemerintahan daerah, aset tetap disajikan dalam sebuah jurnal. Dimana proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berhubungan dengan rekening realisasi anggaran. Agar kamu lebih memahami aset tetap pemerintah daerah, materi selanjutnya akan menjabarkan pihak-pihak yang terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem

akuntansi aset tetap serta jurnal standarnya

b) Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain sebagai berikut.

- (1) Bendahara barang atau pengurus barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/ pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.
- (2) Bendahara pengeluaran. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
- (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

c) Dokumen yang digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain sebagai berikut.

- (1) Bukti belanja/pembayaran aktiva tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva

tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran uang persediaan (UP).

- (2) Berita acara serah terima barang/pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran langsung (LS).
  - (3) Surat perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.
  - (4) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang penghapusan aset tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.
  - (5) Surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan aset. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.
  - (6) Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.
- d) Jurnal standar

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa berita acara penerimaan barang atau berita acara serah terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh pengguna anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK- SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan membuat jurnal berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No mor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xx x	Aset tetap	xx xx	-
		xx x	U ang belanja modal...	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D-LS terbit Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat dua jurnal berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xx x	Uang belanja modal...	xxx x	-
		xx x	K PPKD	-	xxx x

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**Tabel 7. Jurnal LRA**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xx x	x xx	Belanja modal	xx xx	-
		x xx	Pe rubahan SAL	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP, ganti uang persediaan (GU), atau tambahan uang persediaan (TU), maka pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya) Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xx x	Aset tetap....	xx xx	-
		xx x	as di bendah	-	xx xx

			ara pengel uaran		
--	--	--	------------------------	--	--

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**Tabel 7. Jurnal LRA**

Ta nggal	N omor Bukti	K ode Rekenin g	Uraian	D ebet	K redit
xxx	xx x	x xx	Belanja modal....	xx xx	-
		x xx	Pe rubahan SAL	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**3** Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memur**3**inkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan Untuk aset tetap yang dibangun dengan **3** cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya ndak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

e) Prinsip dasar pengelolaan aset daerah

Prinsip dasar pengelolaan aset daerah meliputi tiga hal sebagai berikut.

(1) Adanya Perencanaan yang Tepat

Dalam menyusun perencanaan yang tepat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melihat kondisi daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang.

(2) Pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien dan Efektif

Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas publik yang dimaksud meliputi sebagai berikut.

(a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountabilty for Probity and Legality)

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan menghindari dan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah. Adapun akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.

(b) Akuntabilitas Proses (Process Accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah termasuk dilakukannya compulsory competitive tendering contract (CCTC) serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya mark up. Ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah, dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

(c) Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan, hingga kepada tahap penghapusan barang daerah.

(3) Pengawasan (Monitoring)

Setelah ada penyusunan perencanaan yang tepat serta diikuti dengan tahapan pelaksanaan, maka prinsip dasar ketiga atau yang terakhir adalah tahapan pengawasan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting.

Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Selain itu, keterlibatan auditor internal juga sangat penting dalam penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan, baik menyangkut pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement) maupun penilaiannya (evaluation). Tentu dengan adanya pengawasan yang jeli dan ketat, penyimpangan penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah bisa dihindari. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar setiap anggota masyarakat mudah mengetahui oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah tersebut.

f) Manfaat pengelolaan aset daerah

Pengelolaan aset daerah sesuai prinsip dasarnya akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yang melakukannya. Manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

- (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, maupun penghapusan dan penjualan aset daerah.
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah.
- (3) Pengamanan aset daerah.
- (4) Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

2) Kewajiban daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban dijelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintah daerah, kewajiban muncul karena melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban sendiri sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a) Klasifikasi kewajiban daerah

Kewajiban dikategorisasi<sup>26</sup> berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berikut penjelasan terkait dengan klasifikasi<sup>26</sup> kewajiban daerah.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah kepada pegawai utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fili Ketiga (PEK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 1 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang sendiri terdiri atas utang daerah<sup>9</sup> negeri dan utang jangka panjang lainnya.

b) Pihak-pihak terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD diantaranya pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pengguna anggaran.

(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut.

- (a) Melakukan pembelian atau pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (b) Menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
  - (c) Menyiapkan dokumen pembayaran.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut.

- (a) Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
  - (b) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian jelek).
  - (c) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK)
- (3) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki dua tugas berikut.

- (a) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD.
  - (b) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD
- (4) Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi Akuntansi SKPD

- c) Dokumen yang digunakan



Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, nota pesanan, berita acara serah terima kuitansi surat perjanjian kerja, SP2D UP/GU/TU, SP2D-LS, dan surat pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD

d) Jurnal standar

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang. Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan atau pembelian barang/jasa juga dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Berikut penjelasan bentuk jurnalnya.

(1) Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan atau pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan:

(a) Apabila menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD sebagai berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	x xx	Beban ATK	xx xx	-
		x xx	Utang belanja bahan pakai habis	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

(b) Apabila menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD akan tersusun seperti berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	x xx	Persediaan alat tulis kantor	xx xx	-
		x xx	Utang belanja bahan pakai habis	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

(2) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU:

(a) Apabila menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD akan tersusun seperti berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xx x	Utang belanja bahan pakai habis	xx xx	-
		xx x	Kas di bendahara pengeluaran	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**Tabel 7. Jurnal LRA**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xx x	x xx	Belanja ATK	xx xx	-

		x xx	Pe rubahan SAL	-	xx xx
--	--	---------	----------------------	---	----------

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

- (b) Apabila menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD akan tersusun seperti berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xx x	Utang belanja bahan pakai habis	xx xx	-
		xx x	as di bendah ara pengel uaran	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**Tabel 7. Jurnal LRA**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xx x	x xx	Belanja ATK	xx xx	-
		x xx	Pe rubahan SAL	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

- (3) Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD akan tersusun sebagai berikut.

**Tabel 7. Jurnal LO**

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
---------	-------------	------------------	--------	-------	--------

xxx	xxx	x	Utang belanja bahan pakai habis	xxx x	-
		xx x	K PPKD	-	xxx x

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

**Tabel 7. Jurnal LRA**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xx x	x xx	Belanja ATK	xx xx	-
		x xx	Pe rubahan SAL	-	xx xx

Sumber: Enjen Jaelani, 2020

Catatan:

Dalam melakukan pengakuan terkait dengan adanya utang yang berhubungan dengan segala bentuk transaksi pembelian maupun pengadaan barang dan jasa perlu untuk melakukan pertimbangan terkait dengan ketersediaan anggaran, dana untuk menyelesaikan, atau membayar utang.

3) Ekuitas dana daerah

15 Ekuitas dana daerah merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Berikut penjelasan terkait dengan pembagian ekuitas dana daerah.

a) Ekuitas dana lancar

Jenis ekuitas dana daerah yang pertama adalah ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar merupakan adanya selisih yang terjadi antara kewajiban jangka pendek dan aset lancar. Sementara itu, ekuitas dana lancar terdiri atas sisa lebih pembiayaan anggaran atau

SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, pendapatan yang ditangguhkan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar apabila disajikan dalam neraca sebagai berikut.

	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)
Rp xxx	
	Cadangan piutang
Rp xxx	
	Cadangan persediaan
Rp xxx	
	Pendapatan yang ditangguhkan
Rp xxx	
	Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
<u>Rp xxx +</u>	
	Total ekuitas dana lancar
Rp xxx	

b) Ekuitas dana investasi

Jenis ekuitas dana daerah yang kedua adalah ekuitas dana investasi. Pada jenis ini, pemerintah daerah memiliki kekayaan yang tertanam dalam aset non lancar. Aset yang non lancar tersebut selain dari dana cadangan yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri atas diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset tetap lainnya (tidak termasuk dana cadangan), serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Penyajian ekuitas dana investasi di neraca adalah sebagai berikut.

	<sup>26</sup> Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
Rp xxx	
	Diinvestasikan dalam aset tetap
Rp xxx	

Diinvestasikan dalam aset tetap lainnya

Rp xxx

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Rp xxx +

Total ekuitas dana investasi

Rp xxx

c) Ekuitas dana cadangan

Sebuah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku merupakan definisi dari ekuitas dana cadangan.

22

## B. Prinsip Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan laporan keuangan daerah tentunya memiliki prinsip dasar yang selama ini telah diterapkan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah dapat berupa laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, serta neraca yang mengacu pada pedoman SAKD Tim Pokja SK Menkeu Nomor 355 Tahun 2001, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta praktek-praktek akuntansi yang telah berlaku pada dunia internasional yaitu *Government Finance Statistic* (GFS). Berikut prinsip-prinsip dasar dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah.

### 1. Asas Kas

Pengakuan pendapatan daerah dilakukan pada saat menerima kas daerah yang diterima oleh kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Sementara itu, pengakuan belanja daerah akan diakui pada saat adanya pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan untuk daerah tersebut. Pada asas kas merupakan gambaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 36 ayat (1) berbunyi "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran

**Commented [FE47]:** Link halaman Nomor 17 Tahun 2003 (<https://peraturan.bpk.go.id/Ho17-tahun-2003>)

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas". Maksudnya adalah masa transisi penggunaan akrual dari pengukuran berbasis kas dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang yang baru telah diberlakukan. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja baru dapat dilakukan pada tahun buku 2008.

## 2. Asas Bruto

Prinsip dasar dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah yang kedua adalah asas bruto. Dalam hal ini, asas bruto diartikan sebagai tidak adanya bentuk kompensasi yang didapatkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Contohnya yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah akan mendapatkan pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan diperlukan adanya belanja sehingga pelaporannya harus dilakukan sebesar nilai pendapatan yang telah diperoleh atau *gross income*. Sementara itu, belanja akan dibukukan pada pos belanja yang berkaitan dengan jumlah belanja yang telah dikeluarkan.

Contoh nyata di lapangan adalah Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum atau PPJU yang harus diserahkan oleh PLN tidak dapat dikompensasi dengan tunggakan listrik Pemda kepada PLN. Sementara itu, pencatatan transaksi yang telah dilakukan dapat dicatat sebagai berikut.

- a. Pada akhir tahun, timbulnya utang piutang dicatat (pos neraca)

	Debet	Kredit
Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum	xxx	-
Ekuitas Dana Lancar	-	xxx
Ekuitas Dana Lancar		xxx
Utang atau Tunggakan Listrik	-	-

- b. Pada saat pembayaran kas, pencatatan dilakukan sebagai berikut

	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	-
Pendapatan PPJU	-	xxx
Belanja Listrik	xxx	-
Kas di Kas Daerah	-	xxx

Diikuti dengan jurnal korolarinya, yaitu mengurangi piutang pajak (mengkredit) dengan mendebet Ekuitas Dana Lancar. Sebaliknya, utang listrik dikurangi (didebet) dengan mengkredit Ekuitas Dana Lancar.

### 3. Asas Universalitas

Prinsip dalam melakukan penyusunan laporan akuntansi pemerintahan daerah yang ketiga adalah asas universalitas. Asas universalitas merupakan segala bentuk pengeluaran yang telah dilakukan harus tercermin ke dalam anggaran. Hal tersebut menjadikan anggaran belanja merupakan batas komitmen yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Tidak hanya di Indonesia, Asas Universalitas juga berlaku pada negara-negara lain.

### 4. Nilai Historis

Selain ketiga aspek diatas, prinsip dalam melakukan penyusunan laporan akuntansi pemerintah daerah adalah memiliki nilai historis. Nilai historis atau nilai perolehan serta penyusunannya dalam neraca dengan tanpa memperhitungkan penyusunannya ini digunakan dalam melakukan penilaian aset tetap daerah. Kegiatan inventarisasi secara fisik atas seluruh aset yang ada dilakukan untuk menilai aset daerah pada neraca awal daerah. selain kegiatan inventarisasi, juga dilakukan konversi dalam mengelompokkan aset daerah yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi aset sehingga sesuai dengan pedoman SAKD yang telah ada.

Namun, dalam menerapkannya pasti terdapat kendala yang akan dihadapi dalam melakukan penilaian aset daerah pada saat penyusunan neraca awal daerah. Hambatan atau kendala yang akan dihadapi dijabarkan sebagai berikut.

- a. Beberapa bangunan bersejarah yang ditinggalkan oleh zaman belanda maupun nenek moyang atau yang disebut dengan *heritage assets* yang daerahnya menginginkan untuk memasukkan bangunan bersejarah tersebut ke dalam neraca yang dicatat sebagai aset daerah yang disebabkan bangunan bersejarah tersebut memiliki nilai yang tinggi. Contoh beberapa bangunan bersejarah adalah masjid, tugu-tugu, dan museum.
- b. Terdapat beberapa aset yang tidak tercatat dalam daftar aset daerah namun secara fisiknya aset tersebut ada. Terdapat juga beberapa aset yang dikuasai oleh pihak ketiga namun dokumen legalnya tidak terdapat pada pihak ketiga namun dipegang oleh pihak Pemda. Atau terdapat pula aset yang dokumen legalnya belum lengkap namun telah dikuasai oleh Pemda.
- c. Pada setiap daerah memiliki berbagai sumber daya alam atau yang disebut dengan *natural resources* agar dimasukkan menjadi aset daerah. Apabila hal



tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mencerminkan kekayaan yang nyata pada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut.

- d. Beberapa dokumen historis atau beberapa aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN (sebelum otonomi daerah) yang telah diserahkan kepada daerah tersebut. Contoh dokumen atau aset yang berasal dari APBN adalah jalan raya, bangunan irigasi, tanah, serta bangunan gedung kantor yang sulit untuk ditemukan.

#### 5. Kebijakan Akuntansi

Dalam melakukan penilaian aset daerah memiliki beberapa hambatan yang telah dijelaskan diatas. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut perlu untuk daerah menerapkan beberapa kebijakan akuntansi dalam penilaian aset tetap pada saat melakukan penyusunan neraca awal. Berikut penjelasan terkait dengan mengatasi kendala-kendala dengan kebijakan akuntansi.

- a. Untuk beberapa aset yang berupa bangunan atau tanah yang sulit untuk diperoleh nilai historisnya maka akan menggunakan nilai yang dapat diperkirakan atau diestimasikan. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk khusus oleh pemerintah daerah yaitu dengan melibatkan beberapa dinas teknis yang memiliki kompetensi tinggi sebagai berikut.
  - 1) Untuk bangunan akan dilakukan sebuah penilaian yang disesuaikan dengan kondisi fisik dari bangunan tersebut yang berdasarkan pada pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dinas Teknis terkait.
  - 2) Sementara itu, untuk tanah akan dilakukan sebuah penilaian dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan tahun pada saat memperolehnya.
  - 3) Selain itu juga dapat dilakukan penilaian dengan menggunakan independent appraisal. Penilaian tersebut akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan memberatkan daerah sementara manfaat ekonomisnya tidak dapat dipastikan. Sementara itu, perkara yang paling penting bagi daerah tersebut adalah akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan segala hal yang dimiliki oleh daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan historisnya.
- b. Untuk aset tetap yang berupa bangunan dan kendaraan tidak dapat dilakukan depresiasi karena beberapa alasan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah bukan *proftt organization*, sehingga "*concept matching cost against revenues*" (penandingan beban dan pendapatan) dengan mengakui depreasiasi sebagai beban tidak relevan.
  - 2) Sementara itu, depresiasi pada aset tetap dapat dilakukan sekaligus yaitu dengan melakukan penghapusan yang berdasarkan pada hasil inventarisasi tim yang telah dibentuk oleh Kepala Daerah.
- c. Sementara itu, pada aset-aset yang bersejarah dan sumber daya alam dengan alasan adanya unsur ketidakpastian atau *uncertainties* yang berhubungan dengan biaya ekspertis dan nilai ekonomisnya yang tidak murah untuk melakukan penilaian kandungan terhadap sumber daya alam pada sebuah daerah, maka pencatatan laporan daerah tidak dicatat pada neraca namun hanya dimasukkan sebagai catatan atas laporan keuangan atau *disclosures*.

#### **6. Neraca Daerah**

Neraca daerah akan menggunakan *classified balance sheet* yang artinya adalah pengelompokan neraca berdasarkan pada aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban lancar dan tidak lancar, serta ekuitas dana sebagai kelompok penyeimbang.

#### **7. Struktur APBD**

Dalam hal ini, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut klasifikasi ekonomi pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan menggunakan istilah belanja tak tersangka, belanja terdiri atas belanja modal, belanja operasi dan belanja lainnya. Klasifikasi belanja sudah berjalan beriringan dengan penerapan-penerapan internasional.

#### **C. Struktur dan Bentuk Laporan Keuangan Daerah**

Struktur dan bentuk laporan keuangan daerah akan dijelaskan sebagai berikut.

Aktiva	Kewajiban dan Ekuitas Dana
	- Bagian lancar utang jangka panjang - Utang pajak (potongan PPN, PPH yang belum disetor sampai dengan tgl neraca)
Investasi Jangka Panjang (seperti penyertaan modal pada BUMD atau pembelian obligasi jangka panjang)	Utang Jangka Panjang (utang yang akan jatuh tempo lebih setahun):
<b>Aktiva Tetap (nilai perolehan):</b> Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan/Jaringan irigasi Bangunan gedung Kendaraan Peralatan dan Mesin Meubelair dan perlengkapan Dana Cadangan Aktiva Lain-lain (seperti bangunan dalam pengerjaan dan	<b>Ekuitas Dana :</b> Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Diinventasikan Ekuitas Dana Dicadangkan

Gambar 7.1 Bentuk Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

**Commented [FE48]:** Hasanah Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintah

Sementara itu, struktur dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD dapat digambarkan sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi
Pendapatan:		
Pendapatan Asli Daerah	xxxx	xxxx
Pendapatan Dana Perimbangan		xxxx
xxxx		
Pendapatan lain-lain yang sah		xxxx
xxxx		
Belanja:		
Belanja Operasional		xxxx
xxxx		
Belanja Modal		xxxx
xxxx		
Belanja Lainnya		xxxx
xxxx		

Surplus/(Defisit)	xxxx
xxxx	
Pembiayaan:	
Penggunaan SiLPA	xxxx
xxxx	
Penggunaan Pinjaman	xxxx
xxxx	
Penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan	xxxx
xxxx	
Penggunaan Dana Cadangan	xxxx
xxxx	

#### D. Sistem Akuntansi Satuan Kerja 30

Yang termasuk dalam sistem akuntansi pada satuan kerja adalah akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas. Berikut penjelasan terkait dengan pembagian pada sistem akuntansi satuan kerja yang telah disebutkan.

##### 1. Akuntansi Pendapatan

Pelaksanaan akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan asas bruto. Maksudnya adalah dengan melakukan pembukuan penerimaan bruto saja sehingga jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) tidak perlu untuk mencatat. Pelaksanaan akuntansi pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD hanya dilakukan untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang berada dibawah wewenang SKPD. Pejabat Pembuat Komiten atau PPK ketika menjalankan tugasnya hanya mencatat SKPD yang terdapat dalam buku jurnal khusus pendapatan dengan menggunakan berbagai dokumen yang telah diberikan oleh Bendahara Penerimaan. Dokumen khusus yang diberikan Bendahara Penerimaan biasanya berupa SPJ Penerimaan beserta lampirannya. Berikut contoh jurnal pendapatan SKPD.

**Tabel 7.1 Jurnal Pendapatan SKPD**

Dr. Kas di bendahara penerimaan	80.000.000
Cr. Pendapatan	80.000.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

Bendahara Penerimaan SKPD akan menerima pendapatan yang kemudian disetorkan ke dalam rekening Kas Daerah atau Kasda. Kemudian PPK akan mencatat transaksi-transaksi penyetoran dengan penulisan menggunakan jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7.2 Jurnal Transaksi Penyetoran**

Dr. RK PPKD	80.000.000
Cr. Kas di Bendahara Penerimaan	80.000.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

Apabila pada Rekening Kas Daerah telah menerima dana setoran tersebut maka sistem akuntansi PPKD akan otomatis mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan melakukan penulisan menggunakan jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7.3 Jurnal Transaksi Penerimaan**

Dr. Kas di bendahara penerimaan	80.000.000
Cr. Pendapatan	80.000.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

## 2. Akuntansi Belanja

Sistem akuntansi satuan kerja yang kedua adalah akuntansi belanja. Dalam hal ini, akuntansi belanja mencakup Uang Persediaan atau UP, Ganti Uang atau GU, Tambah Uang atau TU, serta Langsung atau LS. Uang Persediaan atau UP merupakan uang muka yang memiliki sifat dapat diisi kembali atau *revolving*. UP akan didapatkan oleh SKPD pada awal tahun anggaran yang berasal dari Bendahara Umum Daerah atau BUD. PPK SKPD akan mencatat UP yang telah diterimanya dengan menggunakan pencatatan jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7.4 Jurnal Penerimaan UP**

Dr. Kas di bendahara penerimaan	200.000.000
Cr. RK PPKD	200.000.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

Setelah melakukan penerimaan dan penjurnalan tersebut, sistem akuntansi PPKD akan mencatat RK PPKD pada kolom debit sedangkan Kas di Kasda akan dicatat pada kolom kredit. Kemudian, SKPD akan menggunakan uang persediaan tersebut untuk melakukan pembelanjaan yang telah terdapat dalam buku jurnal khusus belanja. Pencatatan dilakukan dengan mendebit akun belanja yang sesuai

dan mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ pengeluaran serta melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP yang dilakukan secara periodik.

Sementara itu, Ganti Uang atau GU merupakan penggantian uang persediaan atau *reimbursement*. Penjurnalan yang dilakukan pada jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan Gu memiliki cara yang sama dalam melakukan penjurnalan pada UP. Sedangkan Tambah Uang atau TU merupakan uang tambahan yang digunakan untuk uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat tercukupi oleh uang persediaan yang tersisa. Dalam hal ini, TU atau Tambahan Uang akan dibutuhkan untuk mengisi kekurangan yang terdapat pada uang persediaan apabila terdapat kegiatan yang bersifat sangat mendesak. Dalam melakukan penjurnalan cara yang digunakan sama antara penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU dengan penjurnalan yang dilakukan pada UP dan GU.

Terdapat beberapa jenis belanja yang dananya langsung mengalir dari rekening Kasda yang dilakukan oleh SKPD. Dana tersebut langsung menuju pihak ketiga atau pihak lainnya yang telah ditetapkan oleh SKPD. Jenis belanja yang dimaksudkan adalah jenis belanja LS atau Langsung. Contoh jenis belanja LS adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan serta Belanja LS Barang dan Jasa. Pencatatan akuntansi yang dilakukan untuk mencatat belanja LS adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sementara itu pengeluaran kas akan dicatat oleh PPKD sebagai berikut.

**Tabel 7.5 Pencatatan Belanja LS**

SKPD			PPKD		
Dr. Belanja.....	xxxx		Dr. RK SKPD	xxxx	
	Cr.	RK PPKD		Cr. Kas di Kasda	
xxxx				xxxx	

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

**Commented [FE49]:** Hasanah Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerint

### 3. Akuntansi Aset

Akuntansi aset memiliki beberapa jenis transaksi yang dilakukan didalamnya. Transaksi tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap. Kedua jenis transaksi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Penambahan nilai aset tetap

Penambahan pada nilai aset tetap dapat diperoleh dari belanja modal, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, perolehan aset tetap

dari bantuan, hibah atau donasi, serta pemerolehan penambahan dari sumber lain sebagainya.

b. Pengurangan nilai aset tetap

Pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi apabila adanya penghapusan atau pelepasan barang daerah, pentranferan aset tetap kepada SKPD lainnya, serta adanya penyusutan atau depresiasi.

Dalam melakukan penjurnalan pada kasus penambahan nilai aset tetap, PPK akan mengakui penambahan aset tetap dengan bentuk penjurnalan sebagai berikut.

**Tabel 7.6 Jurnal Penambahan Nilai Aset Tetap**

Dr. Aset Tetap	xxx
Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap	xxx

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

Sementara itu, untuk penjurnalan dalam kasus pengurangan nilai aset tetap, PPK akan mengakui pengurangan aset tetap dengan memasukkan "Diinvestasikan dalam aset tetap" diletakkan pada debit dan "Aset Sesuai Jenisnya" berada pada kredit. Berikut penjurnalan pengurangan nilai aset tetap

**Tabel 7.7 Jurnal Pengurangan Nilai Aset Tetap**

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap	xxx
Cr. Aset Sesuai Jenisnya	xxx

Sumber: Satria Indra Kusuma

#### 4. Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas memiliki prosedur yaitu koreksi kesalahan pencatatan, pengakuan aset, utang dan ekuitas, jurnal depresiasi, serta jurnal yang terkait dengan transaksi yang bersifat *prepayment* dan *accrual*. Berikut penjelasan dari prosedur akuntansi selain kas.

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Koreksi kesalahan dalam pencatatan merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam pencatatan jurnal dan telah dimasukkan ke dalam buku besar. Koreksi kesalahan dilakukan oleh PPK SKPD. Contoh dari mengoreksi kesalahan pencatatan adalah adanya belanja ATK sebesar Rp 25.000.000,00 yang dicatat sebagai Belanja Dokumen. Berdasarkan kesalahan tersebut maka PPK SKPD membuat jurnal koreksi seperti contoh dibawah ini.

**Tabel 7.8 Jurnal Koreksi**

Dr. Belanja ATK	25.000.000,00
Dokumen	Cr. Belanja
	25.000.000,00

Sumber: Satria Indra Kusuma

b. Pengakuan aset, utang dan ekuitas

Pengakuan aset, utang dan ekuitas merupakan sebuah pengakuan yang dilakukan terhadap perubahan nilai atau perolehan nilai atau pelepasan aset, utang dan ekuitas yang telah terjadi pada SKPD. Sementara itu, perolehan aset didapatkan dari belanja modal, penghapusan barang atau aset daerah, dan revaluasi aset yang digunakan sebagai hasil dari sensus barang daerah. Contoh pengakuan aset, utang dan ekuitas adalah adanya Surat Keputusan penghapusan barang yang disebabkan oleh kebakaran sebuah gudang. Dalam neraca, nilai mesin tik sebesar Rp 300.000. berikut pencatatan jurnal yang dilakukan.

**Tabel 7.8 Jurnal Penghapusan Aset**

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap	300.000
tik	Cr. Mesin
	300.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

c. Jurnal depresiasi

Seluruh aset tetap yang terdapat pada SKPD (tidak hanya konstruksi bangunan dalam pengerjaan dan tanah) dapat dilakukan penyusutan yang disesuaikan dengan karakteristik dan sifat dari aset tersebut. Penjurnalan yang dilakukan dalam penyusutan aset tetap ini biasanya dilakukan pada akhir tahun. Contoh dari jurnal depresiasi adalah jurnal penyusutan papan tulis elektronik oleh SKPD sebagai berikut.

**Tabel 7.9 Jurnal Penyusutan**

Dr. Diinvestasikan dalam aset tetap	600.000
papan tulis elektronik	Cr. Akumulasi penyusutan –
	600.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

d. Jurnal yang terkait dengan transaksi yang bersifat *prepayment* dan *accrual*

Pada jurnal jenis ini merupakan sebuah jurnal yang dilakukan akibat adanya transaksi yang telah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan. Hal tersebut dinamakan dengan jurnal dengan transaksi yang



bersifat *accrual*. Sementara itu, transaksi pengeluaran kas untuk dibelanjakan pada masa yang akan datang. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat *prepayment*.

## E. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntansi PPKD atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD ini meliputi akuntansi pendapatan PPKD, akuntansi belanja PPKD, akuntansi pembiayaan PPKD, akuntansi aset PPKD, akuntansi utang PPKD, akuntansi selain kas PPKD, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta akuntansi konsolidator PPKD. Berikut penjelasan terkait dengan sistem akuntansi PPKD.

### 1. Akuntansi Pendapatan PPKD

Akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level pemda seperti Dana Perimbangan. Dokumen sumber untuk penjournalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD. Dari Laporan Posisi Kas Harian tersebut, PPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari dana perimbangan adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.10 Jurnal Penerimaan Kas Dana Perimbangan**

Dr. Kas di Kas Daerah	60.000.000
Cr. Pendapatan Dana	60.000.000
Pertimbangan	

Sumber: Satria Indra Kusuma

### 2. Akuntansi Belanja PPKD

Akuntansi Belanja PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Proses akuntansi belanja PPKD dimulai dengan PPKD menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D tersebut, PPKD mencatat transaksi belanja dengan jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7.10 Jurnal Transaksi Belanja**

Dr. Belanja bunga/subsidi/.....	24.000.000
Cr. Kas di kas daerah	24.000.000

Sumber: Satria Indra Kusuma

### 3. Akuntansi Pembiayaan PPKD

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan-penerimaan, di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus. Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemda lain. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus.

### 4. Akuntansi Aset PPKD

Prosedur akuntansi aset pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, misalnya pengakuan atas Investasi Jangka Panjang dan Dana Cadangan. PPKD akan mencatat transaksi perolehan maupun pelepasan aset ini dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial. Bukti memorial dibuat oleh PPKD sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Pencatatan aset dalam buku jurnal PPKD merupakan proses lanjutan dari pencatatan pembiayaan daerah yang menghasilkan aset (Investasi dan Dana Cadangan).

### 5. Akuntansi Utang PPKD

Seperti halnya aset, utang atau kewajiban pemda muncul sebagai akibat dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Prosedur akuntansi utang PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka panjang yang muncul dari transaksi penerimaan pembiayaan serta pelunasan/pembayaran utang (pengeluaran pembiayaan).

### 6. Akuntansi Selain Kas PPKD

Prosedur akuntansi selain kas pada PPKD meliputi beberapa hal sebagai berikut.

#### a. Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dipindahkan ke buku besar.

b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/pelepasan aset, utang dan ekuitas yang dilakukan oleh PPKD (pada kapasitas pemda) dan tidak ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Salah satu contoh yang sesuai dengan hal tersebut adalah pengakuan utang jangka pendek yang berasal dari bagian lancar utang jangka panjang.

c. Jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).

#### 7. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD sebagai Satuan Kerja akan mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD yang lain. Dengan demikian, yang akan muncul dalam Laporan Keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Format dan prosedur penyusunannya pun sama dengan laporan keuangan SKPD yang telah dijelaskan sebelum. Laporan keuangan PPKD ini nantinya juga akan dikonsolidasikan bersama laporan keuangan semua SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

#### 8. Akuntansi Konsolidator PPKD

Dalam pelaksanaan transaksinya, SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (home office) dan SKPD sebagai kantor cabang (branch office). Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD pada kapasitas pemda dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah R/K PPKD dan R/K SKPD.

Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian dari BUD, PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD (rekening Kas Daerah) kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit). PPKD kemudian akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi aliran kas tersebut. Aliran dana dari Kas Daerah ke kas bendahara pengeluaran SKPD akan di jurnal sebagai berikut.

**Tabel 7.11 Jurnal Aliran Dana**

Dr. RK SKPD	xxx
Cr. Kas di Kas Daerah	xxx

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

Sedangkan untuk mencatat aliran dana dari Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal sebagai berikut

**Tabel 7.11 Jurnal Aliran Dana**

Dr. Kas di Kas Daerah	xxx
Cr. RK SKPD	xxx

Sumber: Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, 2017

#### F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam melakukan pelaporan keuangan daerah pada 15 arnya memiliki kesamaan seperti basis akuntansi dalam keuangan negara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam melakukan pelaporan 13 realisasi anggaran. Sementara itu, basis kas digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Tidak hanya basis akuntansi pemerintah daerah dan basis akuntansi keuangan negara yang sama, namun juga komponen yang terdapat pada laporan keuangan sama seperti dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Berikut penjelasan secara singkat terkait dengan komponen pada keuangan pemerintah daerah.

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran atau LRA

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta penggunaan sumber ekonomi yang telah dikelola oleh Pemda merupakan definisi dari laporan realisasi anggaran atau LRA. Anggaran yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dapat dilakukan perbandingan antara anggaran yang telah dilaksanakan dengan periode berikutnya.

##### 2. Neraca

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya terdapat neraca yang berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan yang terdapat pada sebuah entitas pelaporan yang berhubungan dengan ekuitas dana, aset, dan kewajiban yang terdapat pada tanggal neraca.

##### 3. Laporan Arus Kas atau LAK

Sementara itu, Laporan Arus Kas yang disingkat dengan LAK merupakan sebuah laporan keuangan yang menyajikan beberapa informasi yang berkaitan

11

dengan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, penggunaan kas, serta saldo kas dan setara kas yang terdapat pada tanggal pelaporan

24

4. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berisikan catatan-catatan terkait dengan informasi keuangan pada pemerintahan yang dibuat untuk memudahkan pemahaman pengguna laporan keuangan secara luas dan tidak terbatas untuk pengguna laporan tertentu bahkan manajemen entitas pelaporan.

#### Tugas Mandiri

#### Refleksi

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan tingkat pemahaman pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi.

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Tingkat Pemahaman			
		25 %	50 %	75 %	100 %
1	Memahami hakikat akuntansi dalam pemerintah daerah				
2	Memahami prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah				
3	Memahami struktur dan				

	bentuk laporan keuangan daerah				
4	Memahami sistem akuntansi satuan kerja				
5	Melaksanakan pengelolaan keuangan desa				
6	Memahami laporan keuangan pemerintah daerah				

### Uji Kompetensi

#### G. Soal Pilihan Ganda

*Pilihlah jawaban yang paling tepat.*

#### H. Soal Essai Uraian

*Jawablah dengan tepat dan benar.*

#### I. Tugas Praktik

#### Daftar Pustaka

Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintah. Bogor: In Media

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jaelani, Enjen. 2020. Peaktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah 1. Bogor: Yudhistira

**Commented [FE50]:** <https://fetails/49730/pp-no-58-tahun-2005>

# Buku Perpajakan

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Rahmat Ilyas. "KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016  
Publication 1%
- 2 Submitted to Udayana University  
Student Paper 1%
- 3 Deni Herdiyana, Muhammad Luqman Rokhim. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021  
Publication 1%
- 4 Agus Darmawan. "POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH", FIAT JUSTISIA, 2015  
Publication 1%
- 5 Jean Gabriel Oflagi, Hendrik Manossoh, Stanley Kho Walandouw. "ANALISIS APLIKASI E-REKON-LK TERHADAP 1%

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA PROVINSI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018

Publication

---

6

Debora Christiani Wola, David Paul Elia Saerang, Een Novritha Walewangko. "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA LANGSUNG DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BITUNG 2005-2014", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

---

1 %

7

Veybie Komaling, Stanley Kho Walandow. "EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINASS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2015

Publication

---

1 %

8

Akhmad Priharjanto, Yusniar Yuliana Wardani. "PENGARUH TEMUAN, TINGKAT PENYIMPANGAN, OPINI AUDIT, DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

<1 %



# PROVINSI DI INDONESIA", INFO ARTHA, 2017

Publication

---

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 9  | Miki Indika, Abdika Jaya, Novi Septianah. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2020<br>Publication  | <1 % |
| 10 | Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia<br>Student Paper   | <1 % |
| 11 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper  | <1 % |
| 12 | Christian D. Sumual, Lintje Kalangi, Natalia Y. T. Gerungai. "ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017<br>Publication  | <1 % |
| 13 | Sri Wahyuningsih, A.A. Miftah, Melly Embun Baining. "PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2023<br>Publication | <1 % |
-

- 14 Yanni Yanni, Fransiskus Randa, Yakobus K Bangun. "PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL", AJAR, 2020  
Publication <1 %
- 
- 15 Fitria Lestari, Meily `Kalalo. "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai PSAP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di kantor Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023  
Publication <1 %
- 
- 16 Cahyo Anggoro. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", Varia Justicia, 2018  
Publication <1 %
- 
- 17 Janitra Yoga Indratama, Agung Praptapa, Agus Sunarmo. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, 2018  
Publication <1 %
- 
- 18 Pika Pika, Saiful Saiful, Nila Aprila. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PINJAMAN DAERAH TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL SUMATERA SELATAN", JURNAL FAIRNESS, 2021  
Publication <1 %
- 
- 19 Ferly Christian Kolinug, Anderson Guntur Kumenaung, Debby Christina Rotinsulu. <1 %

"ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

---

20

Boby Segah. "Peranan Pengawasan Internal Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2020

Publication

---

21

Desriani N. Tarigan, Lidia M. Mawikere. "ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 DI PEMERINTAH KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016

Publication

---

22

Emi i Nelawat, Suharto Suharto, Afdal Mazni. "ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO", SIMPLEX: Journal of Economic Management, 2023

Publication

---

<1 %

<1 %

<1 %

23

Eriza Khosakiyah, Vhika Meiriasari, Andini Utari Putri. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan", Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, 2020

Publication

&lt;1 %

24

Ni Wayan Wiriyantini, I Ketut Mustika. "DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM", Journal of Applied Management Studies, 2021

Publication

&lt;1 %

25

Ely Steven Ingratubun, Wilhaminus Sombolayuk. "PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA TUAL PERIODE 2010-2013", SIMAK, 2019

Publication

&lt;1 %

26

Calvin Liawan. "EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGOLAHAN ASET (STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SORONG)", Jurnal Pitis AKP, 2017

Publication

&lt;1 %

27

Intan Puspitarini S.E., M.Acc.Fin. "PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DALAM TATA KELOLA

&lt;1 %

BARANG MILIK NEGARA: ANALISA ATAS DAMPAK DAN MANFAAT", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

Publication

---

28

Marsella Lasut, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. "EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI BELANJA PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MINAHASA SELATAN SESUAI PP NO 71 TAHUN 2010", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

---

<1 %

29

Nathania Ch. E. Sasuwuk, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan. "ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016

Publication

---

<1 %

30

Christina Randalayuk, Meinarni Asnawi, Anthonius H. Citra Wijaya. "ANALISIS EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019

Publication

---

<1 %

31

Raden Yudhy Pradityo Setiadiputra. "The role of competency improvement of accrual-based financial management report

<1 %

on the preparation of local government financial report", Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 2019

Publication

---

32

Fitria Fitria, Ridham Priskap, Afif Syarif. "Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

---

33

Abul A'la Alrahim, Puji Wibowo. "Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2022

Publication

---

34

Imam Muhasan. "MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

Publication

---

35

Yuli Fitriyani, Mufrida Zein, Jevry Jevry. "PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DESA DENGAN METODE AKRUAL PADA KANTOR DESA PANJARATAN KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE 2017-2019", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2023

Publication

---

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

36

Ika Sartika, Puji Wibowo. "Penyajian Dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2021

Publication

&lt;1 %

37

Lynda L, Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow. "PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019

Publication

&lt;1 %

38

Angelina Putu Winda Savira, Indrawati Yuhertina. "Kesiapan dan Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Rangka Reformasi Akuntansi dan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010: Berdasarkan Tinjauan Literatur", Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, 2021

Publication

&lt;1 %

39

Ramdany Ramdany, Yusuf Setiawan. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN

&lt;1 %

40

Sria Kogoya, Agustinus Salle, Anthonius H.C Wijaya. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN-KOTA DI PROVINSI PAPUA", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

---

<1 %

41

Dwince Oktasari, Saiful Saiful, Nila Aprila. "EKSPLORESI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU", JURNAL FAIRNESS, 2021

Publication

---

<1 %

42

Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, Emi Suryati. "FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH", JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

---

<1 %

43

Erasmoo Moreira de Carvalho. "Bens públicos de infraestrutura: um estudo qualitativo das práticas relacionadas ao reconhecimento e evidenciação contábil", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2004

Publication

<1 %



---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On